



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019



Pemerintah Kota Balikpapan
Balikpapan Kubangun, Kujaga, dan Kubela
TAHUN 2020



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan amanat dalam peraturan tersebut di atas, LKjIP Kota Balikpapan tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja Kota Balikpapan tahun 2019 yang diukur berdasarkan capaian indikator sasaran Wali Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018. Perjanjian Kinerja tahun 2019 tersebut disusun berdasarkan atas penggalan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, Wali Kota Balikpapan menetapkan 10 sasaran dan 20 indikator kinerja (IKU) berikut targetnya. Pencapaian sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh program prioritas dan program penunjang tahun 2019.

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran terhadap indikator kinerja (IKU) Kota Balikpapan tahun 2019 per sasaran strategisnya, maka capaian sasaran strategis (sasaran kinerja) Kota Balikpapan tahun 2019 dinyatakan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**" pada tahun 2019 sebesar 95,58% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah dengan realisasi 10,67 Tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah dengan realisasi 14,13 Tahun. Berdasarkan capaian 2 (dua) IKU tersebut dinyatakan "**BELUM TERCAPAI**" karena melampaui target yang diperjanjikan.
2. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan**" pada tahun 2019 sebesar 100,50% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup. dengan realisasi 74,41 Tahun. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui target yang diperjanjikan.
3. Capaian Sasaran Strategis "**Menurunnya Jumlah Pengangguran**" pada tahun 2019 sebesar 81,01% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi 62,41% dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja dengan realisasi 64,66%. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**BELUM TERCAPAI**" karena kurang dari target yang diperjanjikan khususnya pencapaian IKU Tingkat Pengangguran.
4. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan**" pada tahun 2019 sebesar 97,76% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi 80,11, Tingkat Kemiskinan dengan realisasi 2,42% dan Indeks Pembangunan Gender dengan realisasi 89,71. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**BELUM TERCAPAI**" karena kurang

- dari target yang diperjanjikan khususnya pencapaian IKU Tingkat Kemiskinan dan IKU Indeks Pembangunan Gender.
5. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**" pada tahun 2019 sebesar 99,64% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi 59,58. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**BELUM TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
 6. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan**" pada tahun 2019 sebesar 104,13% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) *Livable City Index* dengan realisasi 77,58. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
 7. Capaian Sasaran Strategis "**Terwujudnya Infrastruktur yang Handal**" pada tahun 2019 sebesar 98,42% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar dengan realisasi 83,35. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**BELUM TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
 8. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**" pada tahun 2019 sebesar 106,78% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Gini Ratio dengan realisasi 0,32 dan PDRB Perkapita dengan realisasi Rp. 151,73 Juta. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan, tetapi perlu upaya peningkatan pada IKU PDRB Perkapita yang kurang memenuhi capaian target.
 9. Capaian Sasaran Strategis "**Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**" pada tahun 2019 sebesar 105,15% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PDRB Non Migas dengan realisasi Rp. 40,61 Triliun. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena target yang diperjanjikan sesuai dengan capaian realisasi.
 10. Capaian Sasaran Strategis "**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**" pada tahun 2019 sebesar 100,18% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini Laporan Keuangan dengan realisasi WTP (diasumsikan tercapai), Indeks Persepsi Korupsi dengan realisasi 6,89, Survey Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 81,65, Nilai Evaluasi LAKIP dengan realisasi 68,68 (B), Penilaian Kepatuhan dengan realisasi 83,19 dan Indeks Profesionalitas ASN dengan realisasi 89,38. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan, tetapi perlu upaya peningkatan capaian pada IKU Survey Kepuasan Masyarakat yang kurang memenuhi capaian target.

Berdasarkan capaian IKU pada 20 indikator terhadap 10 sasaran strategis terdapat 5 sasaran strategis belum tercapai pada tahun 2019 dan 5 sasaran strategis tercapai. Berkenaan dengan 5 sasaran strategis yang belum tercapai maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu berupaya meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2020 khususnya pada IKU HLS, TPT, TPAK, TKm, IPG, IKLH, IKLID, GR, IPK, dan Nilai Evaluasi LAKIP.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan tahun 2019. LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 menyajikan gambaran informasi tentang pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Walikota Balikpapan tahun 2019.

LKjIP tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019. Pedoman penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (*stakeholder*) yang berwenang untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

Balikpapan 27 April 2020

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI



DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DALAM.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LANDASAN HUKUM.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. DATA ORGANISASI.....	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN	8
B. PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
B. REALISASI ANGGARAN.....	127
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	141
BAB IV PENUTUP.....	148
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan	12
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2019	15
Tabel 2.3. Program dan Anggaran yang Mendukung Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2019	16
Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019	31
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019.....	47
Tabel 3.3 Predikat Penilaian IKLH.....	61
Tabel 3.4 Realisasi Capaian IKU sampai dengan 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD	77
Tabel 3.4 Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019	127
Tabel 3.5 Rincian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019.....	
Tabel 3.6 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2012-2019	128
Tabel 3.7 Komponen Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah.....	129
Tabel 3.8 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Balikpapan.	131
Tabel 3.9 Perincian Dana Perimbangan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019	132
Tabel 3.10. Perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2019	134
Tabel 3.11. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019...	136
Tabel 3.12. Perincian Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019.....	137
Tabel 3.13. Perincian Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019	139
Tabel 3.17. Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019	141
Tabel 4.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2019	141
Tabel 5.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2019	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Rapat Evaluasi Kelas Jabatan oleh Kemendagri (18 Maret 2019).....	33
Gambar 3.2.	Rapat Perubahan Uraian Tugas Penyesuaian Dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 (28 November 2019).....	33
Gambar 3.3.	Pembinaan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Dalam Rangka Kesiapan Evaluasi AKIP (9 Juli 2019)	35
Gambar 3.4.	Workshop pelaksanaan RB dan penguatan AKIP Terbuka Tahun 2019 (16 Desember 2019)	36
Gambar 3.5.	Peta Proses Bisnis Kota Balikpapan.....	37
Gambar 3.6.	Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis (2 Oktober 2019).....	38
Gambar 3.7.	Foto Halaman Portal esakip.balikpapan.go.id.....	39
Gambar 3.8.	Foto Halaman Beranda Akun Perangkat Daerah pada esakip.balikpapan.go.id	39
Gambar 3.9.	Rakor penyempurnaan e-SKP	40
Gambar 3.10.	Rapat Uji Coba e-SKP di Perangkat Daerah	40
Gambar 3.11.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU <i>Livable City Index</i> (20 Juni 2019).....	41
Gambar 3.12.	Coaching Clinic BKPSDM penyusunan SKP berbasis IKI (12 Februari 2019).....	42
Gambar 3.13.	Dokumentasi suasana <i>desk/coaching clinic</i> OPD Dinsos, P3AKB, DKUMKMP, DPMPT, DPU, Diskominfo, DPPR, DLH, Kec. Balikpapan Utara, Setda, Dispustakar dan Disnaker.....	45
Gambar 3.14.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah Huruf Tahun 2019	49
Gambar 3.15.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019.....	50
Gambar 3.16.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Harapa Hidup Tahun 2019	51
Gambar 3.17.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Tingkat Pengganguran Terbuka Tahun 2019	53
Gambar 3.18.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019	55
Gambar 3.19.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019	56
Gambar 3.20.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2019.....	57
Gambar 3.21.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019	59
Gambar 3.22.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019	61
Gambar 3.23.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU <i>Livable City Index</i> Tahun 2019.....	62

Gambar 3.24. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah Tahun 2019	64
Gambar 3.25. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Gini Ratio Tahun 2019.....	65
Gambar 3.26. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai PDRB Perkapita Tahun 2019.....	67
Gambar 3.27. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU PDRB Perkapita Tahun 2019.....	68
Gambar 3.28. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Opini Laporan Keuangan Tahun 2019	69
Gambar 3.29. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019.....	70
Gambar 3.30. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	72
Gambar 3.31. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP Tahun 2019	73
Gambar 3.32. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Penilaian Kepatuhan Tahun 2019.....	74
Gambar 3.33. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN terhadap kebersihan dan Keindahan kota Tahun 2019.....	76
Gambar 3.34. Capaian IKU RLS sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU RLS pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan.....	80
Gambar 3.35. Capaian IKU HLS sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU HLS pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	81
Gambar 3.36. Capaian IKU AHH sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU AHH pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	82
Gambar 3.37. Capaian IKU TPT sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU TPT pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan.....	84
Gambar 3.38. Capaian IKU TPAK sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU TPAK pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	85
Gambar 3.39. Capaian IKU IPM sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IPM pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan.....	86
Gambar 3.40. Capaian IKU TKm sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU TKm pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	88
Gambar 3.41. Capaian IKU IPG sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IPG pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	89
Gambar 3.42. Capaian IKU IKLH sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IKLH pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	90
Gambar 3.43. Capaian IKU LCI sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU LCI pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	92
Gambar 3.44. Capaian IKU IKLID sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IKLID pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	93

Gambar 3.45. Capaian IKU GR sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU GR pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	94
Gambar 3.46. Capaian IKU PDRB Perkapita sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU PDRB Perkapita pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	96
Gambar 3.47. Capaian IKU PDRB Non Migas sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU PDRB Non Migas pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	97
Gambar 3.48. Capaian IKU OLK sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU OLK pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	98
Gambar 3.49. Capaian IKU IPK sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IPK pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	100
Gambar 3.50. Capaian IKU SKM sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU SKM pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	101
Gambar 3.51. Capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Nilai Evaluasi LAKIP pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	103
Gambar 3.52. Capaian IKU Penilaian Kepatuhan sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Penilaian Kepatuhan pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	104
Gambar 3.53. Capaian IKU IPASN sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IPASN pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan	106
Gambar 3.54. Perbandingan Capaian Realisasi IKU RLS Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	107
Gambar 3.55. Perbandingan Capaian Realisasi IKU RLS Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	108
Gambar 3.56. Perbandingan Capaian Realisasi IKU AHH Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	109
Gambar 3.57. Perbandingan Capaian Realisasi IKU TPT Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	110
Gambar 3.58. Perbandingan Capaian Realisasi IKU TPAK Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	111
Gambar 3.59. Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPM Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	112
Gambar 3.60. Perbandingan Capaian Realisasi IKU TKm Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	113

Gambar 3.61. Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPG Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	114
Gambar 3.62. Perbandingan Capaian Realisasi IKU IKLH Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	115
Gambar 3.63. Perbandingan Capaian Realisasi IKU LCI Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	116
Gambar 3.64. Perbandingan Capaian Realisasi IKU IKLID Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	117
Gambar 3.65. Perbandingan Capaian Realisasi IKU GR Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	118
Gambar 3.66. Perbandingan Capaian Realisasi IKU PDRBPK Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	119
Gambar 3.67. Perbandingan Capaian Realisasi IKU PDRBNM Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	120
Gambar 3.68. Perbandingan Capaian Realisasi IKU OLK Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	121
Gambar 3.69. Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPK Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	122
Gambar 3.70. Perbandingan Capaian Realisasi IKU SKM Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	123
Gambar 3.71. Perbandingan Capaian Realisasi IKU RLS Nilai Evaluasi LAKIP Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	124
Gambar 3.72. Perbandingan Capaian Realisasi IKU PK Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	125
Gambar 3.73. Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPASN Tahun 2019 Kota Balikpapan pada terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	126



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LKjIP yang disusun dan dilaporkan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang harus dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2019, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan janji yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun tahun 2016-2021 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2019

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Kota Balikpapan Tahun 2019 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;



12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Kota Balikpapan tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan periode 2016-2021.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP tersebut bermaksud untuk memberikan gambaran tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 terhadap target sasaran RPJMD tahun 2016-2021 ;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019;
3. Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2019 dengan target kinerja 2016-2021 (5 tahun) yang direncanakan (RPJMD Kota Balikpapan).

Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP tersebut adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. DATA ORGANISASI

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengatur susunan perangkat daerah Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi



kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 4. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A , menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu;
 8. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan sub urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
 9. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;



12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja;
 14. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
 15. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 17. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan yang terdiri atas:
1. Kecamatan Balikpapan Barat dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Tipe A;

3. Kecamatan Balikpapan Kota dengan Tipe A;
4. Kecamatan Balikpapan Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Balikpapan Timur dengan Tipe A.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan tahun 2019, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi / capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan 2019 (2 tahun) dengan target jangka menengah (5 tahun) yang terdapat dalam dokumen RPJMD periode 2016-2021;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan realisasi kab/kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan realisasi kinerja



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (yang ada) dan realisasi tingkat nasional (yang ada);

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019.

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019.
3. Surat Keputusan Walikota Tentang Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan.
4. Hasil Reviu Inspektorat Kota Balikpapan Terhadap LKjIP Tahun 2019.
5. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021
6. Prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Balikpapan Tahun 2019.
7. Foto-foto kegiatan peningkatan kualitas dokumen SAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* terkait Disamping itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJMN dan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021 dan juga merupakan tahun ketiga kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2016-2021.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam program kegiatan tahun 2019.

1. VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

VISI
MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN



Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

a. **KOTA TERKEMUKA** adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan *Coastal Road*, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

b. **KOTA NYAMAN DIHUNI** (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;



4. Keamanan, bebas dari rasa takut;
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

c. **KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN** adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

d. **MADINATUL IMAN**, mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Untuk mewujudkan Visi jangka menengah di atas, ditetapkan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021, sebagai berikut :

MISI 1	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi	
Tujuan Ke-1	: Mewujudkan sumber daya yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing tinggi
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
Tujuan Ke-2	: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara keseluruhan
Sasaran	: 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan.
Tujuan Ke-3	: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan.
Sasaran	: 3. Menurunnya jumlah pengangguran; 4. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

MISI 2	
Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan	
Tujuan Ke-4	: Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan.
Sasaran	: 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 6. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan.

MISI 3	
Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif	
Tujuan Ke-5	: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur.
Sasaran	: 7. Terwujudnya infrastruktur yang handal;

MISI 4	
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif	
Tujuan Ke-6	: Menggerakkan Sendi-sendi Perekonomian Masyarakat.
Sasaran	: 8. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
Tujuan Ke-7	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau.
Sasaran	: 9. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

MISI 5

Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan Ke-8	: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Penyediaan Layanan Publik yang Prima
Sasaran	: 10. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021, maka perlu disusun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan IKU Kota Balikpapan melalui Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indiktor Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan, RSUD Kota Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Dinas Tenaga Kerja
		2.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



		2.	Tingkat Kemiskinan (persen)	Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.	Indeks Pembangunan Gender (indeks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i> (indeks)	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan penataan Ruang
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio (indeks)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		2.	PDRB perkapita (persen)	Bappeda Litbang
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB non migas (persen)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup

10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini laporan keuangan (Kategori)	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		2.	Indeks Persepsi Korupsi (indeks)	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (indeks SKM)	Bappeda Litbang
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (skor Kinerja)	Bappeda Litbang
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	Bappeda Litbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah
		6.	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah se Kota Balikpapan

Sumber : Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

B. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka sebagai wujud tindak lanjut dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, maka Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Walikota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB. Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transpa-ransi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan



- supervisi atas perkembangan/-kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja perangkat daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 ini memuat informasi tentang sasaran strategis, di mana setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Penetapan target IKU tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 kepada Menteri PAN dan RB disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.49
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.73
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	73.99
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.05
		2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.09
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. IPM	79.13
		2. Tingkat Kemiskinan (%)	2.32
		3. Indeks Pembangunan Gender	92
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.82
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. <i>Livable City Index</i>	73.50
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	77
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Indeks Gini Ratio	0.32
		2. PDRB perkapita (Rp. Juta)	151.15



9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. PDRB non migas (Rp. Triliun)	48.65
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP
		2. Indeks Persepsi Korupsi	6.75
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	79.76
		4. Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	71 (BB)
		5. Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	83.19
		6. Indeks Profesionalitas ASN	85

Sumber : Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan Tahun 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut di atas, target capaian IKU akan didukung oleh program dan anggaran tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Salinan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB tahun 2019 disajikan dalam lampiran LKjIP ini.

Tabel 2.3. Program dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2019

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
I	PROGRAM PRIORITAS			
1	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara	10,610,567,500.00	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	1.01.05.01.1.05.01.02.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	8,346,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.01.05.01.1.05.01.04	Program Sarana dan Prasarana Logistik	1,100,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	680,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
5	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9,684,886,900.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RSKB Sayang Ibu
6	3.00.02.3.00.02.01.01	Program Penelitian dan Pengembangan	1,786,626,000.00	Bappeda Litbang
7	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,306,171,000.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2,100,000,000.00	Dinas Kesehatan
9	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,864,250,000.00	Dinas Kesehatan
10	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	34,559,915,000.00	Dinas Kesehatan
11	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	45,028,273,400.00	Dinas Kesehatan
12	1.02.10.10.2.10.10.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	889,350,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	22,863,748,000.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
14	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	53,000,000.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
15	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	71,500,000.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
16	1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,142,567,500.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
17	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	55,000,000.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
18	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	105,000,000.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
19	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	68,683,374,500.00	Dinas Lingkungan Hidup
20	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,442,974,390.00	Dinas Lingkungan Hidup
21	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	550,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
22	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4,600,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
23	2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1,523,700,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
24	2.00.03.2.00.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	200,000,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
25	2.00.01.2.00.03.01.20.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,348,194,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
26	2.00.03.2.00.03.01.18.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	393,500,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
27	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,519,090,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
28	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	12,821,375,500.00	Dinas Pekerjaan Umum
29	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan Pedestrian Kota	9,787,505,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
30	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	41,188,125,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
31	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	27,261,011,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
32	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	27,422,083,250.00	Dinas Pekerjaan Umum
33	1.01.03.1.01.03.01.71.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	39,212,950,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
34	1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	123,245,960,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
35	1.02.02.01.1.2.2.1.15.	Program Keluarga Berencana	3,392,363,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
36	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3,598,686,500.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	1.02.02.1.02.02.01.22.	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	556,203,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	1.02.02.1.02.02.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	214,097,500.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
39	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	275,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	7,516,085,000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
41	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,605,000,000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,319,000,000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
43	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	100,000,000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
44	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,480,000,000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
45	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2,615,000,000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
46	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	18,252,000,000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
47	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,752,040,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
48	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,936,124,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	194,655,494,400.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	17,303,102,400.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,326,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
52	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2,532,552,900.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	287,500,000.00	Dinas Perdagangan
54	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	4,894,925,700.00	Dinas Perdagangan
55	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	11,625,959,000.00	Dinas Perdagangan
56	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	912,500,000.00	Dinas Perdagangan
57	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	34,000,000,000.00	Dinas Perdagangan
58	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	500,000,000.00	Dinas Perhubungan
59	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1,400,000,000.00	Dinas Perhubungan
60	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	335,000,000.00	Dinas Perhubungan
61	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	237,500,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
62	1.01.01.1.02.17.01.01.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4,180,168,700.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
63	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	540,775,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kecamatan
64	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	1,500,000,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
65	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5,517,576,250.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
66	1.02.04.1.02.04.01.29	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	220,000,000.00	Dinas Perumahan dan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Bidang Perumahan dan Permukiman		Permukiman
67	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	300,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	1.01.06.1.01.06.01.27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	50,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
69	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,777,961,700.00	Dinas Sosial
70	1.01.06.1.01.06.01.28.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	825,000,000.00	Dinas Sosial
71	1.01.02.1.01.02.00.35.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	9,061,724,100.00	Dinas Sosial
72	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	177,949,000.00	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan
73	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	717,712,500.00	Dinas Tenaga Kerja
74	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	189,933,500.00	Dinas Tenaga Kerja
75	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	908,736,000.00	Dinas Tenaga Kerja
76	5.00.01.1.01.05.02.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3,099,100,000.00	Inspektorat
77	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	30,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
78	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	360,999,700.00	Satuan Polisi Pamong Praja
79	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	146,436,500.00	Sekretariat Daerah
80	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	616,097,000.00	Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
81	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	15,780,500,000.00	Sekretariat Daerah
82	1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	300,000,000.00	Sekretariat Daerah
83	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	9,253,001,804.00	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
84	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	500,000,000.00	Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH I			890,122,503,094.00	
II	PROGRAM PENUNJANG			
85	6.00.01.6.00.01.01.44.	Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	506,264,400.00	Kecamatan Se Kota Balikpapan
86	5.00.01.1.01.05.01.27	Program Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	400,000,000.00	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
87	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	898,346,000.00	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
88	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	123,710,000.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
89	4.00.01.4.00.01.01.69.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	269,097,500.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
90	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	3,378,125,000.00	Bappeda Litbang
91	2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	387,300,000.00	Bappeda Litbang
92	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55,100,000.00	Bappeda Litbang
93	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	220,000,000.00	Dinas Kesehatan
94	6.00.01.6.00.01.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	887,805,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
95	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,646,665,200.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
96	4.00.01.4.00.01.01.02.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3,778,885,900.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
97	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	125,000,000.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
98	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	19,854,600,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
99	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	980,000,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
100	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	500,000,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
101	4.00.01.4.00.01.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	199,650,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
102	1.02.04.1.02.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	520,473,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
103	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,082,049,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
104	2.00.03.2.00.03.01.21.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	847,600,000.00	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
105	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	1,367,281,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
106	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	5,000,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
107	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	27,250,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
108	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	22,920,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
109	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	574,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
110	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	400,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
111	1.02.12.1.02.12.02.20	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	50,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
112	1.02.10.1.02.10.10.10.	Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	81,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
113	1.01.04.1.01.04.01.04.	Program pengelolaan areal pemakaman	4,387,180,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,750,049,200.00	Dinas Perdagangan
115	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6,940,756,500.00	Dinas Perdagangan
116	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	660,000,000.00	Dinas Perhubungan
117	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	3,500,000,000.00	Dinas Perhubungan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
118	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	95,000,000.00	Dinas Perhubungan
119	1.02.05.1.01.04.01.05.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17,685,015,000.00	Dinas Perhubungan
120	1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Pengelolaan Rumah Susun	4,500,000,000.00	Dinas Perhubungan
121	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	200,000,000.00	Dinas Perhubungan
122	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	866,486,000.00	Dinas Perhubungan
123	1.02.01.1.02.01.01.19	Program Pengembangan Data dan Informasi	100,340,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
124	1.02.09.1.02.09.01.26.	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	700,000,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
125	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	618,760,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
126	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	123,900,000.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
127	4.00.01.4.00.01.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	479,682,715.00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
128	2.00.01.2.00.03.01.24.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	64,218,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
129	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,007,339,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
130	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	385,796,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
131	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	547,300,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
132	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	653,500,000.00	Dinas Sosial
133	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	596,007,500.00	Dinas Sosial dan Dina Tenaga Kerja
134	5.00.01.5.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,136,290,000.00	Inspektorat
135	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,583,824,000.00	Kantor Kesbangpol
136	4.00.01.4.00.01.01.22.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	1,131,601,000.00	Kantor Kesbangpol
137	2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	645,935,000.00	Kantor Kesbangpol
138	1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	18,124,046,300.00	Kantor Kesbangpol
139	1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	112,875,953,700.00	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
140	4.00.01.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	265,000,000.00	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
141	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21,179,494,000.00	Kecamatan Se Kota Balikpapan
142	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,450,973,000.00	Kecamatan Se Kota Balikpapan
143	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	986,640,000.00	Kecamatan, Sekretariat Daerah
144	3.00.04.3.00.04.01.20.	Program Peningkatan Kinerja ASN	72,871,450.00	Kecamatan, Sekretariat Daerah
145	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	204,095,400.00	RSKB Sayang Ibu
146	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada	84,789,825,000.00	Sekretariat Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Masyarakat		
147	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,028,050,000.00	Sekretariat Daerah
148	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,951,993,300.00	Sekretariat Daerah
149	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	16,000,000,000.00	Sekretariat Daerah
150	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,187,301,500.00	Sekretariat Daerah
151	5.00.01.5.00.01.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	50,000,000.00	Sekretariat Daerah
152	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5,792,146,700.00	Sekretariat Daerah
153	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,153,000,000.00	Sekretariat Daerah
154	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	19,834,209,650.00	Sekretariat Daerah
155	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	377,840,000.00	Sekretariat Daerah
156	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,086,997,200.00	Sekretariat Daerah
157	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	330,000,000.00	Sekretariat Daerah
158	1.02.10.1.02.10.10.19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	2,608,500,000.00	Sekretariat Daerah
159	1.02.10.1.02.10.10.01.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50,000,000.00	Sekretariat Daerah
160	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	150,000,000.00	Sekretariat Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
161	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	400,000,000.00	Sekretariat Daerah
162	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,209,888,300.00	Sekretariat Daerah
163	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	607,000,000.00	Sekretariat Daerah
164	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,250,000,000.00	Sekretariat Daerah
165	1.01.03.1.01.03.01.22.	Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum	68,320,000.00	Sekretariat Daerah
166	1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	338,500,000.00	Sekretariat Daerah
167	5.00.01.1.01.05.01.17.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	230,000,000.00	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah
168	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133,679,572,750.00	Sekretariat DPRD
169	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	495,000,000.00	Seluruh OPD Kota Balikpapan
170	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	200,000,000.00	Seluruh OPD Kota Balikpapan
171	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	489,836,500.00	Seluruh OPD Kota Balikpapan
JUMLAH II			658,180,387,165.00	
JUMLAH I + JUMLAH II			1,548,302,890,259.00	

Sumber : APBD Kota Balikpapan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, bahwa dalam mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2019 yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan dialokasikan 171 program dengan alokasi Rp. 1.548.302.259,00,-.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan adalah antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia.

Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB tahun 2019. Dasar PK tersebut mengacu pada hasil analisis antara target dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media **formulir Pengukuran Kinerja**, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Laporan LKjIP Tahun 2019

Berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai 68,68 (B). Nilai tersebut meningkat dari hasil evaluasi tahun 2018 yaitu dengan nilai 68,13 (B) atau meningkat 0,55 poin. Rincian hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan
Pada Tahun 2019

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2018	2019
a. Perencanaan Kinerja	30	21,42	21,49
b. Pengukuran Kinerja	25	15,10	15,26
c. Pelaporan Kinerja	15	10,69	10,82
d. Evaluasi Internal	10	6,53	6,64
e. Capaian Kinerja	20	14,39	14,47
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,13	68,68
Tingkat Akutabilitas Kinerja		B	B

Sumber: Surat KemenpanRB Nomor: B/619/AA.05/2019

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah kota Balikpapan memperoleh nilai 68,68 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terbangun budaya kinerja sampai pada level unit terkecil.
2. Penjabaran kinerja dari tingkat kabupaten sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang. namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka keterkaitan hasil proses antar level jabatan, sehingga belum dapat tergambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi.
3. Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun sistem pengendalian dan evaluasi kinerja , namun pelaksanaannya perlu dioptimalkan terutama dalam mengawal target RPJMD agar memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan relevan dengan sasaran strategis dalam mewujudkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Capaian Kinerja individu telah dijadikan ukuran dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara Indikator Kinerja Individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam sasaran kerja



pegawai SKP, ukuran kinerja dalam belum seluruhnya menggambarkan tolak ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai.

5. Laporan kinerja yang telah disusun oleh seluruh perangkat daerah perlu disempurnakan terutama pada kedalaman analisis atas capaian kinerja dan agar dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan kinerja. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya juga perlu ditingkatkan keandalannya.
6. Evaluasi atas program yang dilakukan belum optimal dan baru sebatas mengevaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil dari implementasi program tersebut, sehingga masih terdapat ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program, serta sasaran strategis setiap perangkat daerah.
7. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui Inspektorat. Hasil evaluasi secara internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Pihak Kementerian PANRB telah merekomendasikan beberapa hal dan berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana uraian berikut ini.

1. Rekomendasi :

Menerapkan *Performance Based Organization* dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam membangun organisasi selain memperhatikan ketentuan terhadap penyusunan Organisasi Perangkat Daerah.

Langkah tindak lanjut :

Dalam rangka menerapkan Organisasi yang berbasis kinerja, telah dilakukan :

- a. Evaluasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan MENPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;



Gambar 3.1
Rapat Evaluasi Kelas Jabatan oleh Kemendagri (18 Maret 2019)

- b. Indikator Kinerja dalam RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- c. Melakukan evaluasi atas masing-masing uraian tugas dengan menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai salah satu acuannya;



Gambar 3.2
Rapat Perubahan Uraian Tugas Penyesuaian Dengan
Permendagri No. 90 tahun 2019 (28 November 2019)



2. Rekomendasi :

Menyempurnakan penjabaran kinerja dari level Pemerintah Kota sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga kontribusi kinerja individu secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah;

Langkah tindak lanjut :

- a. Penjabaran kinerja dari level Pemerintah Kota sampai ke tingkat individu diupayakan melalui pendampingan dan workshop kepada Perangkat Daerah terkait penyempurnaan Indikator Kinerja Individu melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi.





Gambar 3.3
Pembinaan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Dalam Rangka
Kesiapan Evaluasi AKIP (9 Juli 2019)

- b. Pelaksanaan Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan peserta perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Balikpapan





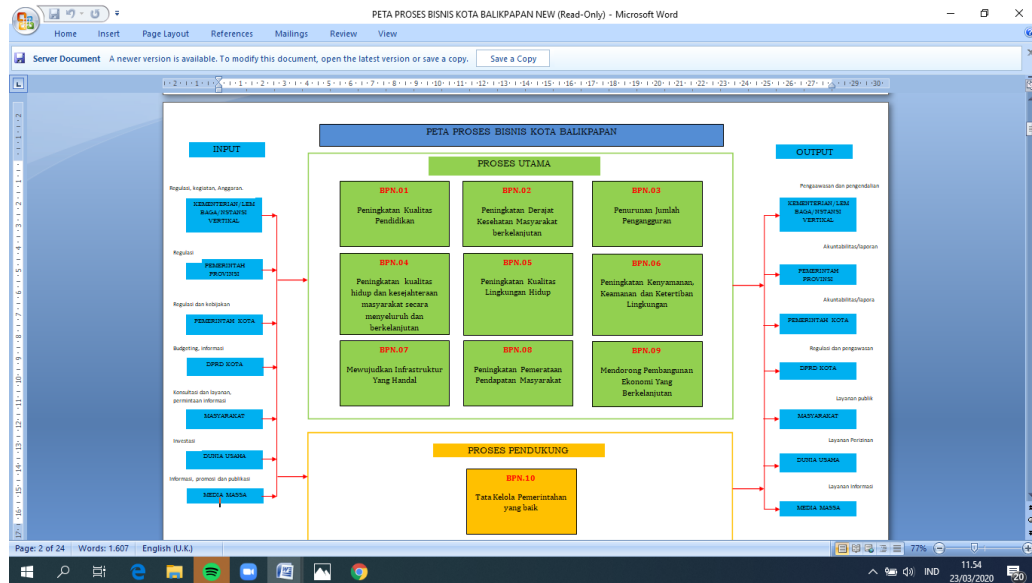
Gambar 3.4
Workshop pelaksanaan RB dan penguatan AKIP
(16 Desember 2019)

3. Rekomendasi :

Menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. Peta Proses Bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. Peta Proses Bisnis ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam perumusan penjabaran kinerja utama pada setiap jenjang organisasi hingga individu. Hasil penjabaran kinerja tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan IKU.

Langkah tindak lanjut :

- a. Melaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis Kota Balikpapan gambar di bawah ini.



Gambar 3.5
Peta Proses Bisnis Kota Balikpapan

- b. Melaksanakan Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis kepada seluruh Kasubbag Program/Perencanaan Perangkat Daerah dengan mengundang nara sumber Sammy Primadi Bakrie, Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Tata Laksana Kementerian PAN RB.





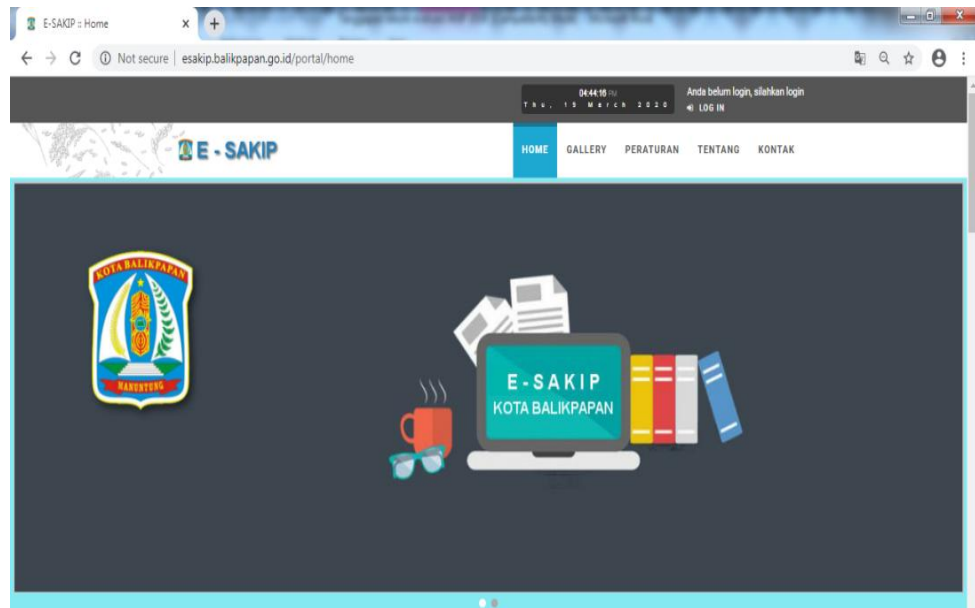
Gambar 3.6
Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis (2 Oktober 2019)

4. Rekomendasi :

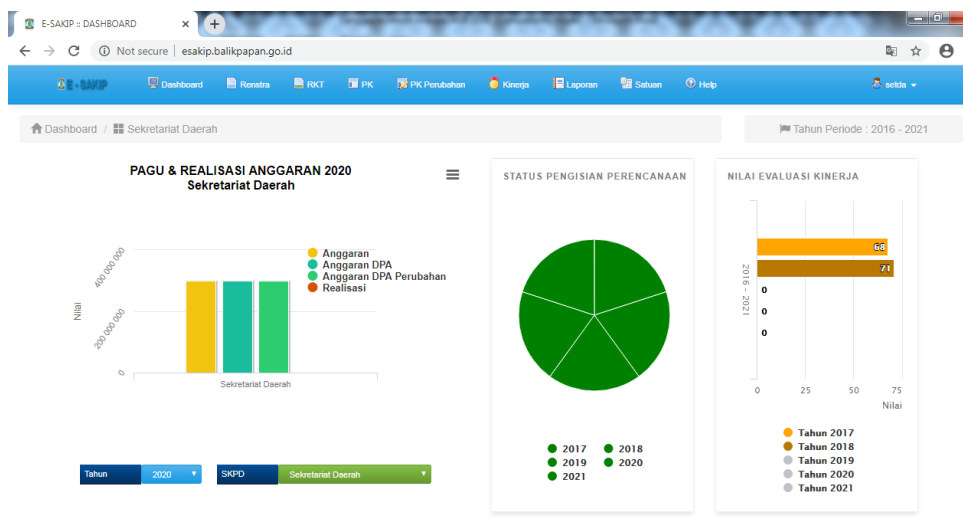
Menyempurnakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar *reward and punishment*. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, aplikasi tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun tingkat capaian kinerja.

Langkah tindak lanjut :

Melakukan replika terhadap aplikasi Silakip Pemkot Bandung. Aplikasi ini beralamat di esakip.balikpapan.go.id yang merupakan aplikasi pemantauan dokumen SAKIP di Pemerintah Kota Balikpapan. Pimpinan dan seluruh masyarakat dapat dengan mudah memantau terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja bahkan hingga seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.



Gambar 3.7
Foto Halaman Portal esakip.balikpapan.go.id



Gambar 3.8
Foto Halaman Beranda Akun Perangkat Daerah pada esakip.balikpapan.go.id

5. Rekomendasi :

Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja individu serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.

Langkah tindak lanjut :



- a. Membangun aplikasi SKP online, penggunaan SKP online yang beralamat di skp.balikpapan.go.id dipergunakan untuk memudahkan dalam memperoleh hasil pengukuran kinerja dari pegawai, untuk selanjutnya akan diintegrasikan dengan aplikasi e-Kinerja dan sebagai penghitung dalam pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang berdampak pada kesadaran berbudaya kinerja bagi pegawai.



Gambar 3.9
Rakor penyempurnaan e-SKP



Gambar 3.10
Rapat Uji Coba e-SKP di Perangkat Daerah

- b. Melakukan pembinaan Bimtek Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Sosialisasi SKP Online kepada pegawai terkait penyusunan SKP yang berbasis IKU, sehingga SKP yang disusun benar-benar mencerminkan kinerja dari pegawai.



Nara sumber acara tersebut dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dan Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan



Gambar 3.11
Bimtek penguatan akuntabilitas kinerja dan sosialisasi SKP online
(20 Juni 2019)

- c. melalui BKPSDM Kota Balikpapan, melakukan Coaching Clinic penyusunan SKP dengan nara sumber Direktur Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (Ibu Neny Rochyany). Penyusunan SKP tidak hanya berdasarkan uraian tugas



semata namun berbasis pada Indikator Kinerja Individu, memiliki target yang dapat diukur dan mencerminkan kinerja dari setiap pegawai.



Gambar 3.12
Coaching Clinic BKPSDM penyusunan SKP berbasis IKI
(12 Februari 2019)

6. Rekomendasi :

Memperbaiki penyajian laporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis capaian kinerja dan analisis efektifitas penggunaan anggaran serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi perbaikan pencapaian kinerja ke depan.

Langkah tindak lanjut :

Bagian Organisasi bersama Bappeda Litbang Kota Balikpapan selalu melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait evaluasi terhadap capaian kinerja per triwulan, sehingga dapat dilakukan fokus dan percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan (baik target IKU maupun IKI). Percepatan terhadap program dan kegiatan yang *men-support* langsung terhadap pencapaian kinerja harus menjadi fokus. Evaluasi kinerja tersebut juga telah difasilitasi oleh aplikasi eSAKIP Kota Balikpapan.

7. Rekomendasi :

Melakukan reuiu dan *refocusing* terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reuiu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Langkah tindak lanjut :



Reviu dan *refocusing* tersebut dilakukan dengan melakukan pembentukan Klinik SMART sebagai wadah khusus untuk melakukan analisis, penajaman dan perbaikan indikator kinerja secara berjenjang dalam RENSTRA Perangkat Daerah (PD) berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable/Actuating, Reliable* dan *Timebound*). Kegiatan Klinik SMART adalah melakukan reviu dan *refocusing* melalui *desk/coaching* terhadap setiap PD dengan menghadirkan para pejabatnya untuk membahas secara berjenjang melalui 8 langkah (*step*), yaitu :

- 1) Reviu dan analisis terhadap penetapan tujuan organisasi dengan tupoksi dan peraturan lainnya;
- 2) Reviu dan analisis antara tujuan dengan indikator tujuan;
- 3) Reviu dan analisis antara indikator tujuan dengan sasaran/sasaran strategis;
- 4) Reviu dan analisis antara sasaran strategis dengan indikator sasaran (IKU);
- 5) Reviu dan analisis antara IKU dengan program;
- 6) Reviu dan analisis antara program dengan indikator program;
- 7) Reviu dan analisis antara indikator program dengan kegiatan; dan
- 8) Reviu dan analisis antara kegiatan dengan indikator kegiatan.

Tata cara dalam melakukan *desk/coaching* telah dibuat acuan dalam bentuk Petunjuk Teknis Klinik SMART.

Setelah melakukan *desk/coaching*, melalui Klinik SMART tersebut dapat teridentifikasi beberapa hal di samping tujuan utama tersebut di atas, antara lain :

- 1) Program dan kegiatan yang tidak mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan alias program dan kegiatan yang mubazir;
- 2) Tumpang tindih kewenangan urusan dan indikator sasaran, program dan kegiatan antar Perangkat Daerah;
- 3) Tumpang tindih indikator program dan kegiatan antar jabatan dalam internal Perangkat Daerah sendiri;

Klinik SMART di-*launchng* secara resmi oleh Wali Kota Balikpapan pada tanggal 11 Juni 2019 di hadapan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Di samping itu Klinik SMART telah mendapat dukungan dari Kementerian PANRB (melalui Ibu Nadimah), Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Tahap awal Klinik SMART dilaksanakan pada 12 Perangkat Daerah sesuai jadwal yang telah disepakati. *Desk/coaching* pertama kali (perdana) pada



tanggal 12 Juni 2019 pada Dinas Sosial, selanjutnya diikuti oleh Perangkat Daerah lainnya. Tahap berikutnya dilakukan kepada 24 Perangkat Daerah lainnya dan sampai saat ini sudah terlaksana untuk 22 Perangkat Daerah, dan akan terus berlanjut sampai sekarang.





Gambar 3.13

Dokumentasi suasana desk/coaching clinic OPD Dinsos, P3AKB, DKUMKMP, DPMPT, DPU, Diskominfo, DPPR, DLH, Kec.Balikpapan Utara, Setda, Dispustakar dan Disnaker

8. Rekomendasi :

Meningkatkan kapasitas Inspektorat Kota Balikpapan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memastikan terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Inspektorat harus mampu memastikan terdapat

keselarasan antara kinerja organisasi dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam penganggaran.

Langkah tindak lanjut :

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas Inspektorat Kota Balikpapan selalu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Balikpapan dengan mengalokasikan anggaran sekitar 0,15% (sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019). Berbagai pelatihan dan bimtek telah diikuti, termasuk pelatihan/ bimtek yang terkait evaluasi kinerja.

2. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada 2019 didasarkan atas minimal 4 pengukuran yaitu :

- a. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 berdasarkan perbandingan target dan realisasi Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2019;
- b. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian tahun 2017 dan realisasi capaian tahun 2019; dan
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 terhadap Capaian Target Akhir Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan Kota Balikpapan.
- d. Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 Kota Balikpapan dengan capaian kinerja Pemerintah Kab/Kota lain, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Nasional (jika ada).

Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan atas target yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB, dan telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019.



Target yang diperjanjikan pada tahun 2019 terdiri atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tergambar pada Bab II Laporan ini. Sejalan hal tersebut, pengukuran capaian kinerja atas 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dipengaruhi oleh hasil realisasi dari setiap sasaran strategis yang terintegrasi atas tiap-tiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi capaian dari indikator tersebut merupakan hasil final yang terukur atas pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal yang berkewenangan dalam mempublikasikan data realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun hasil capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2019 untuk 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.49	10.67	101.72%
		2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.73	14.13	95.93%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	73.99	74.41	100.57%
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.05	7.29	69.27%
		2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.09	64.66	100.89%
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1	Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks)	79.13	80.11	101.24%
		2	Tingkat Kemiskinan (%)	2.32	2.42	95.87%
		3	Indeks Pembangunan Gender (angka indeks)	92	89.71	97.51%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka indeks)	59.82	60.42	101%
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1 <i>Livable City Index</i> (angka indeks)	73.50	77.58	105.55%
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (angka indeks)	77	77.75	100.97%
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1 Indeks Gini Ratio (angka indeks)	0.32	0.32	100.00%
		2 PDRB perkapita (Rp. Juta)	151.15	151.73	100.38%
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1 PDRB non migas (Rp.Triliun)	48.65	40.61	83.47%
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1 Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP	WTP	100.00%
		2 Indeks Persepsi Korupsi (angka indeks)	6.75	6.89	102.07%
		3 Survey Kepuasan Masyarakat (angka skala)	79.76	81.65	102.37%
		4 Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	71,00 (BB)	68,68 (B)	96.73%
		5 Penilaian Kepatuhan (angka skala)	83.19	83.19	100%
		6 Indeks Profesionalitas ASN (angka indeks)	85.00	89.38	105.15%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bappeda Litbang tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.2. dari 20 Indikator Kinerja Utama yang diukur capaian kinerjanya terdapat 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan tercapai/melebihi dari target yang ditetapkan, dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai dari target PK Wali Kota Balikpapan tahun 2019.

2.2. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA

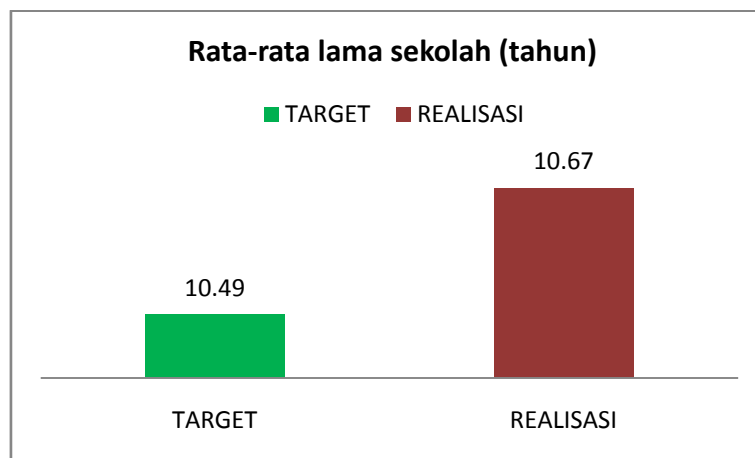
2.2.1. Perbandingan Realisasi Terhadap Target IKU Tahun 2019

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2019, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut.

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target IKU Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,49 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 10,67. Berdasarkan realisasi tersebut maka tingkat capaian IKU realisasi berbanding target IKU RLS adalah 101,72%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU RLS pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Rata-rata Lama Sekolah tergambar pada grafik dibawah ini



Gambar 3.14

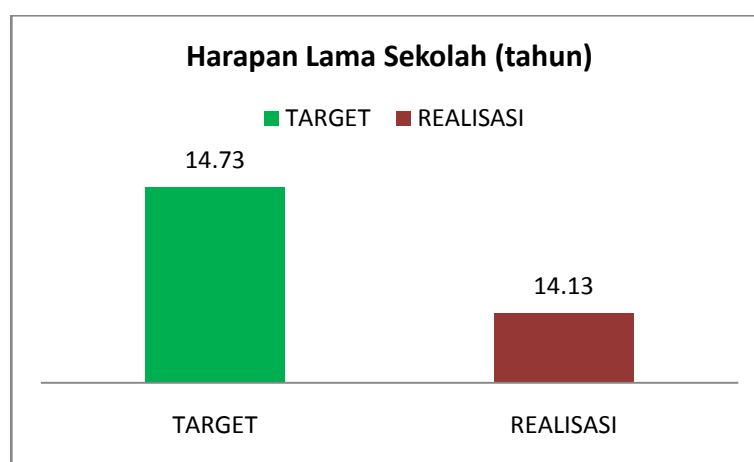
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa secara rata-rata penduduk kota Balikpapan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,67 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Capaian hasil akuntabilitas kinerja RLS pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 10,58 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Target IKU angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 10,73 tahun sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 14,13 tahun. Berdasarkan realisasi tersebut maka tingkat capaian IKU realisasi berbanding target IKU HLS adalah 95,93%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU HLS pada tahun 2019 “TIDAK TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Harapan Lama Sekolah tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.15
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,13 tahun atau setara dengan Diploma III. Capaian hasil akuntabilitas kinerja HLS pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,10 tahun dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 14,23 tahun.

Penurunan capaian dipengaruhi oleh tidak berbandingnya antara jumlah tenaga pengajar terhadap jumlah siswa di Kota Balikpapan, sehingga hal tersebut menurunkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan tingkat dasar, dan lanjutan menengah pertama. Terkait menurunnya Harapan Lama Sekolah tersebut Pemerintah

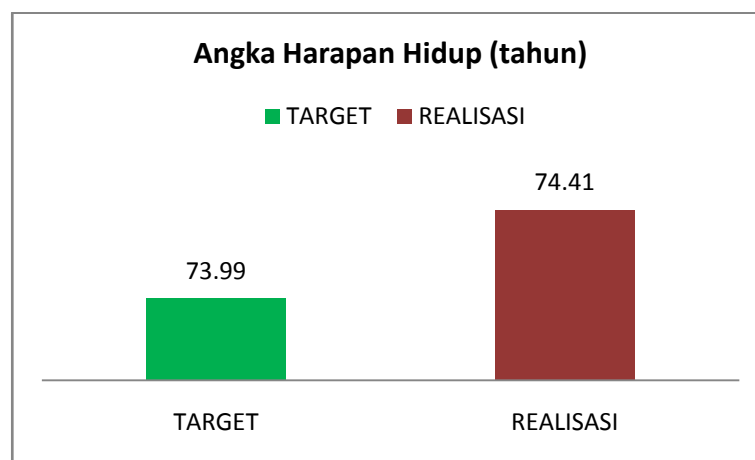


Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta instansi perlu melakukan pengangkatan tenaga pengajar berdasarkan kebutuhan dalam rangka memenuhi rasio jumlah tenaga pengajar dan jumlah siswa serta memberdayakan tenaga bantu pengajar dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Balikpapan.

c. Angka Harapan Hidup (AHH)

Target IKU Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 73,99 tahun sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 74,41 tahun. Berdasarkan realisasi tersebut maka tingkat capaian IKU realisasi berbanding target IKU AHH adalah 100,57%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU AHH pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Angka Harapan Hidup tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.16
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Angka Harapan hidup Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan di Kota Balikpapan menjelang tahun 2019 (periode 2015-2017) akan dapat hidup sampai 74,41 atau 75 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahn 2028 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 78 tahun, meningkat lagi menjadi 85 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2048, dan bayi yang



dilahirkan tahun 2060 usia harapan hidupnya mencapai 90 tahun.

Capaian hasil akuntabilitas kinerja AHH pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,43 tahun dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 73,98 tahun.

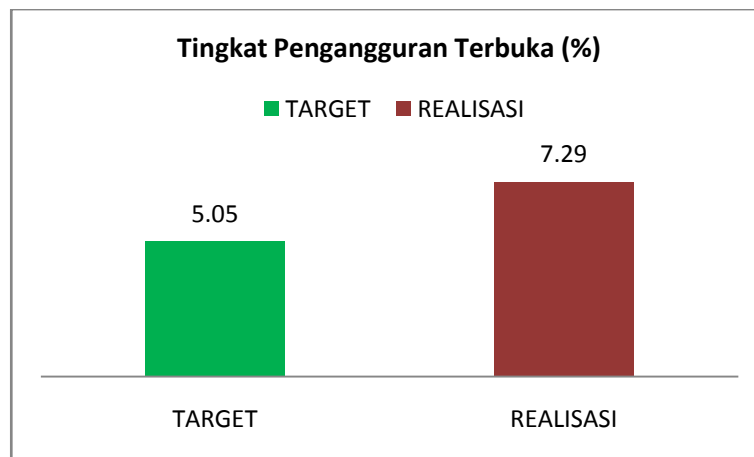
Capaian IKU Angka Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2019, keberhasilan tersebut ditinjau dari lamanya usia penduduk kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik.

Upaya dan tindak lanjut pemerintah kota bersama perangkat daerah terkait perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Antara lain terus menggalakkan program GERMAS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penurunan *stunting* dan lain-lain. Selain meningkatkan program pembangunan kesehatan, integrasi dengan program bidang lainnya, antara lain bidang lingkungan hidup, sosial dan sebagainya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

d. Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)

Target IKU Tingkat Pengganguran Terbuka (TPTk) sebesar 5,05% sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 7,29%. Berdasarkan realisasi tersebut maka tingkat capaian IKU realisasi berbanding target IKU TPT adalah 69,27%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU TPT pada tahun 2019 “TIDAK TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian TPT tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.17
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa TPT di kota Balikpapan masih tinggi yang tinggi hal ini menggambarkan kondisi banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TPT pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,23% dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 9,52%. Berdasarkan capaian TPT tersebut menunjukkan penurunan tingkat pengangguran di kota Balikpapan yang cukup signifikan.

Belum tercapainya target kinerja TPT, disebabkan oleh sejumlah factor permasalahan ketenagakerjaan di kota Balikpapan sebagai berikut:

- Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya bahwa jumlah pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja masih rendah pada tahun sebelumnya, sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2019.
- Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.
- Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2019.
- Angkatan kerja yang tersedia kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja yang berasal dari luar kota Balikpapan lebih



mendominasi dalam pemenuhan permintaan lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan.

- e. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai untuk menyelesaikan pengangguran terbuka.

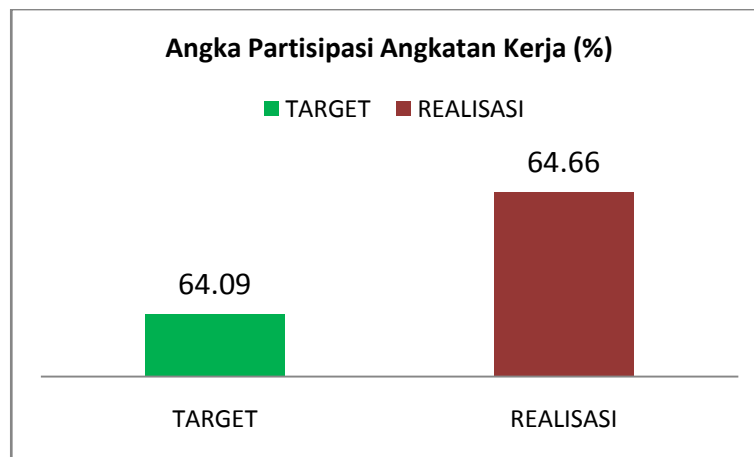
Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka, maka pemerintah kota berupaya :

- a. Menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan di daerah seperti UMKM.
- b. Mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta membangun minat investor untuk menanamkan modalnya.
- c. Membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja.
- d. Menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah.
- e. Melaksanakan review dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,09% sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 64,66%. Berdasarkan realisasi tersebut maka tingkat capaian IKU realisasi berbanding target IKU TPAK adalah 100,89%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU TPAK pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian TPAK tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.18
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa semakin tinggi TPAK maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di kota Balikpapan untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TPAK pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,33% dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 64,33%. Capaian tersebut merupakan nilai tambah (*add value*) bagi pemerintah kota Balikpapan sehubungan dengan tersedianya potensi angkatan kerja diusia produktif, hal ini berarti pemerintah kota Balikpapan telah memasuki masa bonus demografi.

Bonus demografi diartikan sebagai bonus atau peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tersebut perlu dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun disisi lain apabila bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan secara baik maka akan menimbulkan peluang efek negatif yaitu banyaknya usia produktif yang tidak memiliki pendidikan serta tidak memiliki pekerjaan serta kurangnya kesehatan dan juga gizi yang cukup. Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat.

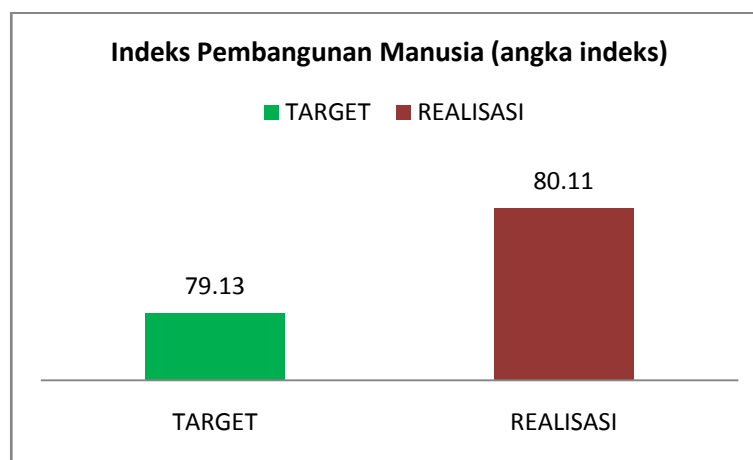


Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah kota perlu menindaklanjuti dan mengupayakan perkuatan yang berfokus pada : a) Investasi SDM (Sumber Daya Manusia) Berkualitas, b) Meningkatkan Pendidikan, c) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, d) Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, e) Memperkuat Investasi di bidang Kesehatan, f) Meningkatkan Produksi Pangan dan f) Melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,13 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 80,11%. Berdasarkan realisasi tersebut maka tingkat capaian IKU realisasi berbanding target IKU IPM adalah 101,24%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU IPM pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IPM tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.19
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa semakin tinggi IPM maka kualitas hidup manusia dan pembangunan di kota Balikpapan semakin baik. Pencapaian IPM dihasilkan atas nilai dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IPM pada tahun 2019

mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 79,71.

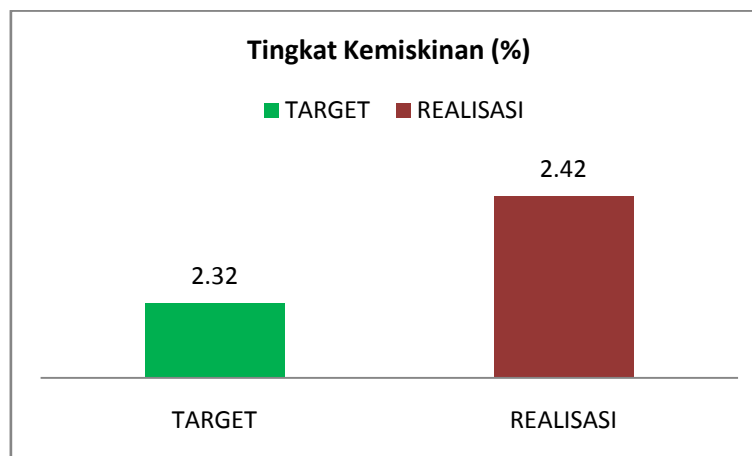
Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada tahun 2019 adalah :

- a. Meningkatkan nilai capaian dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kota Balikpapan.
- b. Meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
- c. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat kota Balikpapan.

g. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Target IKU Tingkat Kemiskinan (TKm) sebesar 2,32% sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 2,42%. Berdasarkan realisasi tersebut maka tingkat capaian IKU realisasi berbanding target IKU TKm adalah 95,87%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU TKm pada tahun 2019 “TIDAK TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian TKm tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.20
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Tingkat Kemiskinan Tahun 2019



Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa masih terdapatnya sejumlah penduduk di kota Balikpapan yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TKm pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,22% dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 2,64%.

Garis kemiskinan ini didasarkan atas sejumlah penduduk di kota Balikpapan tidak dapat memenuhi nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, dan sejumlah penduduk di kota Balikpapan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan jumlah penduduk miskin Balikpapan sampai akhir 2018 mencapai 17.008 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,64%. Kondisi sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai 15.591 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan mencapai 2,42% artinya capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dalam menurunkan tingkat Kemiskinan pada tahun 2019 dinilai berhasil ditinjau dari penurunan tingkat kemiskian sebesar 0,22%.

Faktor penyumbang kemiskinan di Kota Balikpapan didasarkan atas rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sejumlah penduduk kota Balikpapan masih terdapat di bawah Garis Kemiskinan (GK), .

Kondisi nilai Tingkat Kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan Tingkat Pengganguran Terbuka, artinya Tkm tidak berarti bahwa Tingkat Pengganguran Terbuka juga harus rendah. Penjelasan nya adalah bahwa para pekerja terdiri atas kelas-kelas penghasilan yang diterimanya, sehingga kondisi ekonominya bisa di atas Garis Kemiskinan atau di bawah Garis Kemiskinan, tergantung penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini penduduk Kota Balikpapan rendah TKm-nya yang berarti bahwa sebagian besar kondisi ekonomi penduduk Balikpapan di atas Garis Kemiskinan. Adapun kondisi Tingkat Pengganguran Terbuka di Balikpapan masih tinggi, terutama pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup tinggi disebabkan oleh para pencari kerja terutama eks PHK masih memiliki kemampuan ekonomi yang relatif cukup baik (di atas Garis Kemiskinan).

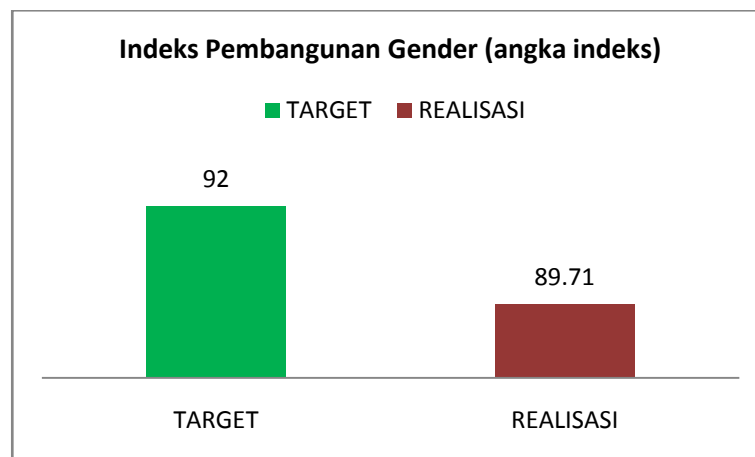


Upaya tindak lanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU TKm pada tahun 2019 adalah 1) Mengusahakan ketersediaan lapangan kerja dan meningkatkan keahlian pencari kerja berdasarkan kebutuhan bursa lapangan kerja di Kota Balikpapan, 2) Mengendalikan gini ratio, c). Mengendalikan inflasi.

h. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 92 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 89,71. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Gender antara target dan realisasi sebesar 97,51%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU IPG pada tahun 2019 “TIDAK TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IPG tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.21
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa nilai indeks pembangunan gender di Kota Balikpapan pada tahun 2019 sebesar 89,71 arti mendekati angka 100, hal ini mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IPG pada tahun 2019 mengalami penurunan indeks sebesar 0,03 dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 89,74%.



Berdasarkan interpretasi atas hasil akuntabilitas kinerja diatas menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam menurunkan ketimpangan gender di kota Balikpapan berdasarkan capaian 4 tahun terakhir.

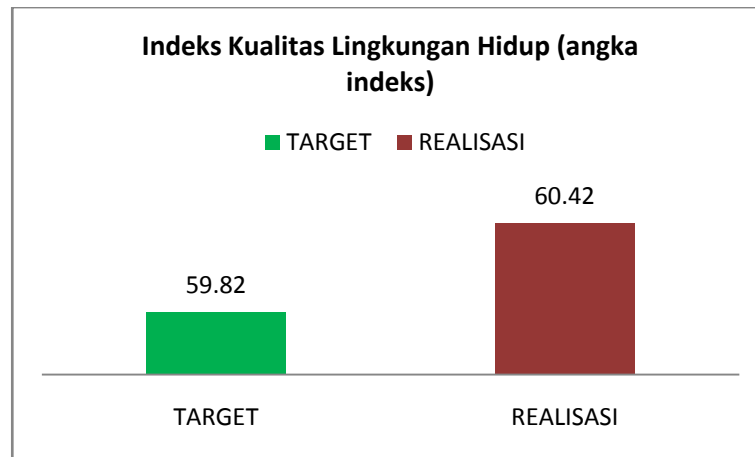
Bahwa berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka capaian IPG kota Balikpapan pada tahun 2015 mencapai 89,97, tahun 2016 angka indeks capai sebesar 90,11 dan capaian angka Indeks Pembangunan Gender tahun 2017 adalah 89,73 dan pada tahun 2018 angka Indeks Pembangunan Gender adalah 89,74. Berdasarkan realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, terkait capaian tersebut pada tahun 2019 capaian IPG kota Balikpapan sebesar 89,71. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2019 tersebut menunjukkan kesenjangan antar gender berpredikat sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.

Upaya yang telah pemerintah kota Balikpapan lakukan adalah meningkatkan pemberian pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 59,82 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 60,42. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IKLH antara target dan realisasi sebesar 101,00%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU IKLH pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.22
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa capaian IKLH di Kota Balikpapan dengan predikat cukup baik hal ini didasarkan atas nilai indeks kualitas lingkungan hidup berada pada rentang nilai antara $60 < \text{IKLH} \leq 70$. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IKLH pada tahun 2019 mengalami peningkatan indeks sebesar 0,87 dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 59,55. Berikut disajikan tabel Predikat Penilaian IKLH.

Tabel 3.3.
Predikat Penilaian IKLH

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	$\text{IKLH} > 80$
2	Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 80$
3	Cukup Baik	$60 < \text{IKLH} \leq 70$
4	Kurang Baik	$50 \leq \text{IKLH} \leq 60$
5	Sangat Kurang Baik	$40 \leq \text{IKLH} > 50$
6	Waspada	$30 \leq \text{IKLH} > 40$

Sumber: IKLH 2018, Kemeterian Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan



bobot 40%. Capaian pada tahun 2019 untuk Indeks Pencemaran Air (IPA) sebesar 47,90, Indeks Pencemaran Udara (IPU) sebesar 88,40, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) sebesar 48,24.

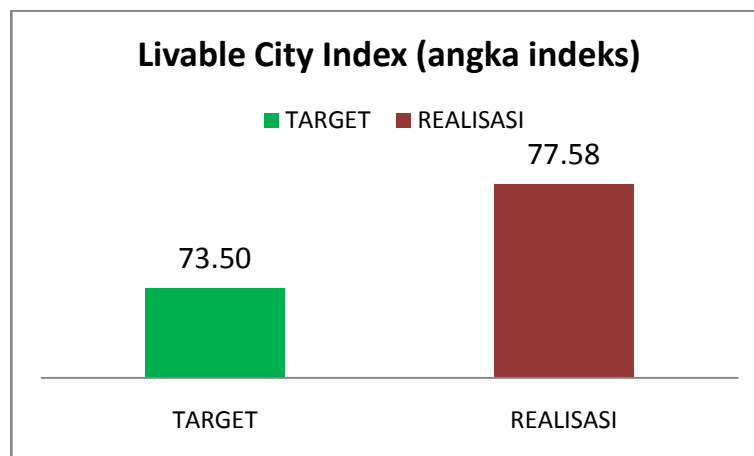
Peningkatan capaian IKLH tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2019 mengarah pada kondisi lingkungan hidup yang cukup baik.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IKLH pada tahun 2019 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, mencegah pengupasan lahan, melakukan rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pembangunan lingkungan, pengembangan kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

j. *Livable City Index (LCI)*

Target IKU *Livable City Index (LCI)* sebesar 73,50 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 77,58. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU LCI antara target dan realisasi sebesar 105,55%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU LCI pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian LCI tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.23
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Livable City Index Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa berdasarkan hasil survey LCI pada tahun 2019 yang diukur dari



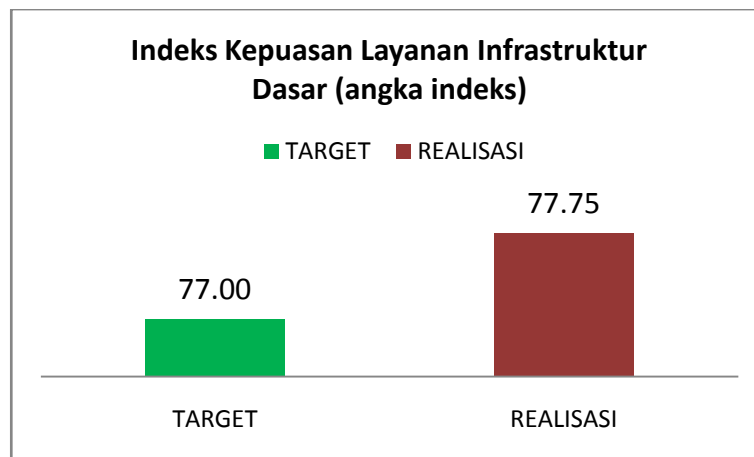
pendapat warga kota tentang kota tempat mereka tinggal dari berbagai aspek seperti air bersih, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, penataan PKL, transportasi, dan pangan. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil survey diperoleh nilai indeks LCI sebesar 77,58. Berdasarkan capaian LCI tersebut menunjukkan adanya kepuasan dari responden yang disurvei berkaitan atas layanan atas air bersih, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, penataan PKL, transportasi, dan ketersediaan pangan. Berkenaan atas kepuasan responden tersebut memberikan kesimpulan bahwa kota Balikpapan merupakan “Kota Layak Huni”. Capaian hasil akuntabilitas kinerja LCI pada tahun 2019 mengalami penurunan indeks sebesar 3,72 dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 81,30.

Upaya dan tindak lanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap penurunan capaian realisasi IKU LCI pada tahun 2019 adalah melakukan peningkatan layanan peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota, layanan ketersediaan akses jalan dan alat transportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

k. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Target IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 77,00 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 77,75. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IKLI antara target dan realisasi sebesar 100,97%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU IKLI pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKLI tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.24

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survey IKLI pada tahun 2019 yang diukur dari pendapat warga kota tentang Kepuasan Layanan Infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil survey diperoleh nilai IKLI sebesar 77,75. Berdasarkan capaian IKLI tersebut menunjukkan adanya kepuasan dari sejumlah responden yang disurvei berkaitan layanan infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat kota Balikpapan. Terkait dengan kepuasan respoden terhadap layanan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan infrastuktur dinilai cukup baik. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IKLI pada tahun 2019 mengalami penurunan indeks sebesar 2,60 dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 80,35.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 100,97% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di kota Balikpapan pada sektor infrastruktur yang meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);

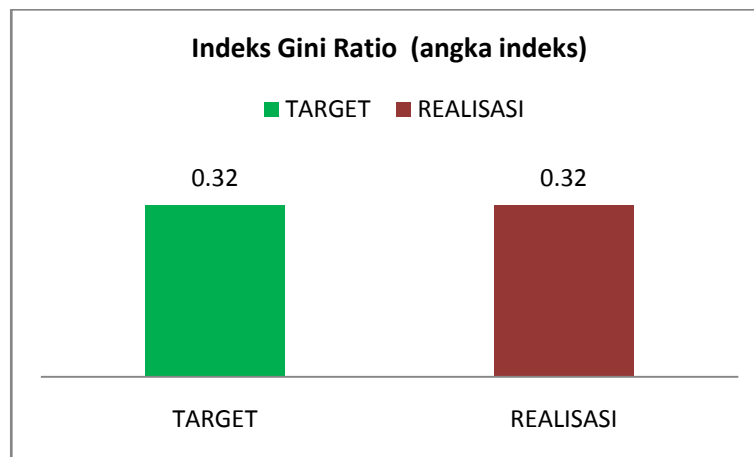
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.

Upaya dan tindak lanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IKLI pada tahun 2019 adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian dan air baku serta menurunkan backlog perumahan.

1. Gini Ratio (GR)

Target IKU Gini Ratio (GR) sebesar 0,32 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar 0,32. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU GR antara target dan realisasi sebesar 100,00%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU Gini Ratio pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Gini Ratio tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.25
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Gini Ratio Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa GR pada Kota Balikpapan bertaraf rendah, artinya pertumbuhan



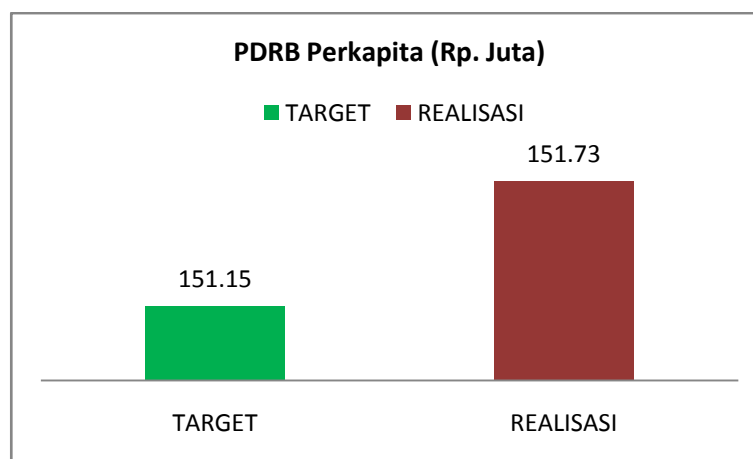
ekonomi telah diikuti dengan pemerataan pendapatan. Hal ini didasarkan atas capaian hasil akuntabilitas indikator terhadap kinerja dimana Nilai GR berkisar antara $0 < 0,32 \leq 1$, Semakin tinggi nilai GR menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Terkait dengan nilai capaian 0,32 tersebut menunjukkan ketimpangan pada taraf rendah. Capaian hasil akuntabilitas kinerja GR pada tahun 2019 mengalami penurunan indeks sebesar 0,01 dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar 0,31. Untuk mengukur ketimpangan adalah *Gini Ratio*.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU GR pada tahun 2019 adalah a) Meningkatkan pengendalian dan mengevaluasi tingkat kemiskinan; b) Efektifitas pendistribusian bantuan sosial; c) Menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja; d) Menciptakan lapangan kerja baru; dan e) Menciptakan wirausaha secara massal.

m. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita sebesar Rp.151,15 Juta sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar Rp. 151,73 Juta. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU PDRB Perkapita antara target dan realisasi sebesar 100,38%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU PDRB Perkapita pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita tergambar pada grafik dibawah ini.





Gambar 3.26
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2019

Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kota Balikpapan selama satu tahun sebesar Rp. 151,73 Juta, artinya tingkat kemakmuran di kota Balikpapan semakin meningkat. Meningkatnya PDRB Perkapita pada tahun 2019 melampaui dari target IKU, dipengaruhi adanya sejumlah kegiatan yang berskala nasional seperti pembangunan perluasan kilang minyak dan akses IKN, dan kegiatan-kegiatan, dan event berskala nasional dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Capaian hasil akuntabilitas kinerja PDRB Perkapita pada tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 9,38 juta dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 142,35 juta.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan yang berperan sebagai penyangga Ibu Kota Negara terhadap peningkatan PDRB Perkapita pada tahun 2019 adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Menumbuhkan usaha sentra industri mikro, kecil dan menengah.
- c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia baik formal maupun informal.
- d. Meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencari kerja lokal.

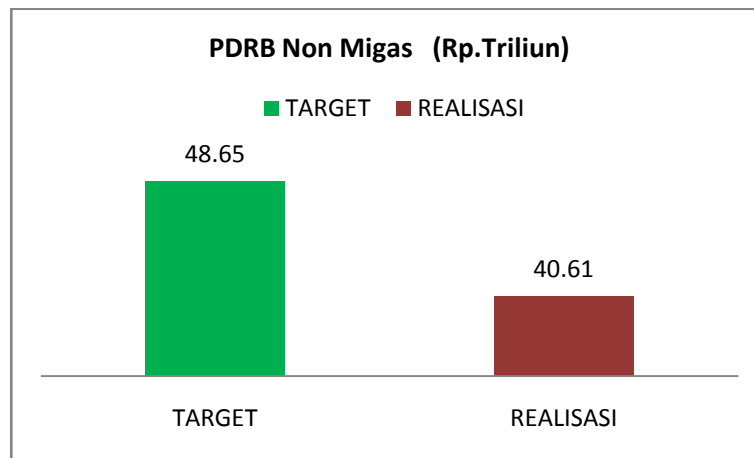
n. Produk Domestik Regional Bruto Non Migas

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas sebesar Rp.48,65 Triliun sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai realisasi sebesar Rp. 40,610 Triliun. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU PDRB Non Migas antara target dan realisasi sebesar 83,47%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU PDRB Non Migas pada tahun 2019 “TIDAK TERCAPAI”. Adapun



perbandingan target terhadap realisasi capaian PDRB Non Migas tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.27

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas Tahun 2019

Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa **terdapat penurunan PDRB non Migas yang dipengaruhi oleh sejumlah sektor lapangan usaha perdagangan dan jasa dikarenakan adanya dampak wabah Corona Wuhan di sejumlah negara yang memiliki orientasi hubungan perdagangan barang dan jasa dengan Indonesia. Efek dari wabah corona tersebut berpengaruh besar pada perekonomian nasional terutama pelemahan ekspor barang dan jasa, pelemahan aktivitas produksi di Tiongkok mempengaruhi impor barang dalam negeri sehingga berdampak terhadap konsumsi dalam negeri, dan terbatasnya aktivitas bisnis.** Capaian hasil akuntabilitas kinerja PDRB Perkapita pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp. 26,85 triliun dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 67,46 triliun.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan PDRB Non Migas antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar daerah kota Balikpapan.

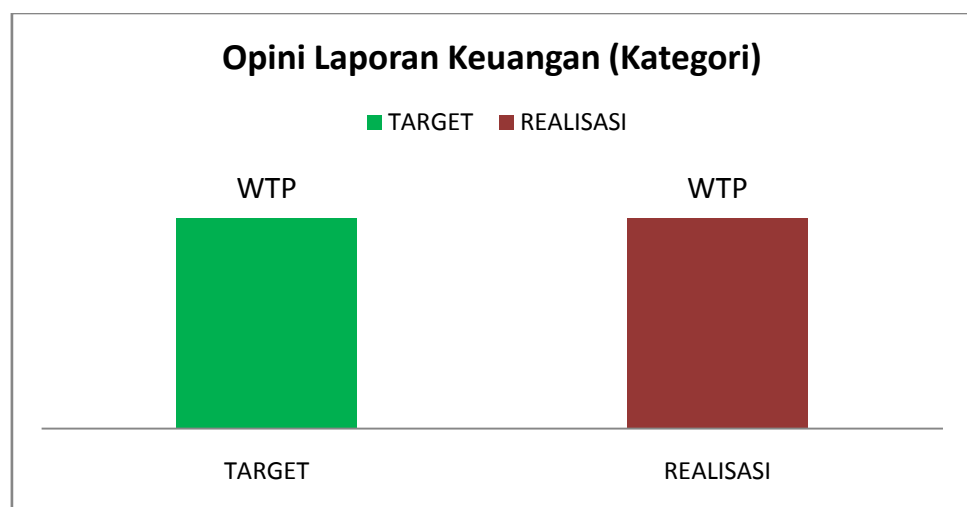


- b. Meningkatkan kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan.
- c. Mempercepat pengembangan kawasan industri kariatang dan melakukan promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di kota Balikpapan.
- d. Pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.

o. Opini Laporan Keuangan (OLK)

Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai dengan kategori “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**”. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU OLK antara target dan realisasi sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU OLK pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian OLK tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.28
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Opini Laporan Keuangan Tahun 2019

Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan dinilai oleh BPK telah akuntabel, wajar, dan transparan hal ini menjadi dasar BPK memberikan opini dengan



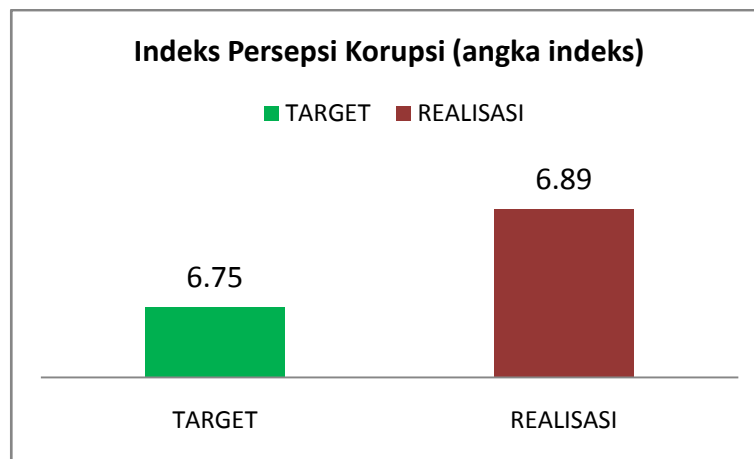
kategori WTP. Capaian hasil akuntabilitas OLK pada tahun 2019 sama dengan capaian 2018 yaitu WTP.

Upaya dan tidak lanjut mempertahankan opini tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen dalam membangun reformasi birokrasi secara baik dan melaksanakan budaya kerja dengan berorientasi pada akuntabilitas hasil terhadap kinerja dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan .

p. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Target IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah 6,75 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai 6,89. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IPK antara target dan realisasi sebesar 102,07%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU IPK pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Indeks Persepsi Korupsi tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.29
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019

Capaian hasil akuntabilitas IPK pada tahun 2019 mengalami peningkatan indeks sebesar 0,02 dari capaian 2018 yaitu 6,87. Upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang



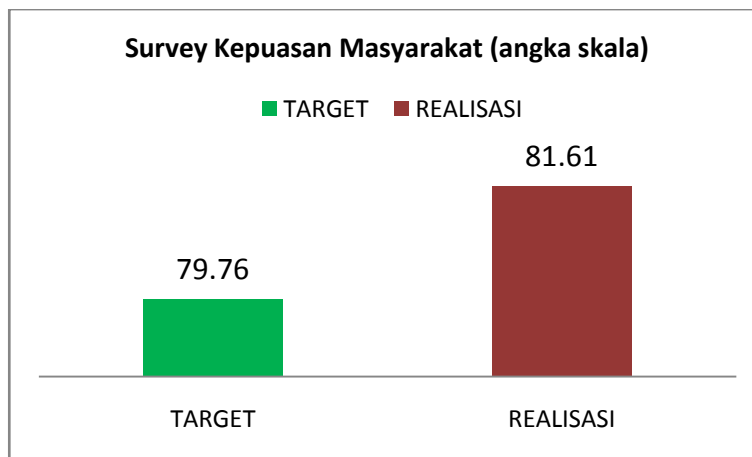
baik (*good governance*). Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, pemerintah kota Balikpapan telah membangun dan menggunakan media aplikasi perencanaan pembangunan daerah (e-planning) sebagai *supporting tool* dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .
- b. Pada tahun 2019, pemerintah kota Balikpapan melakukan pengumpulan data di sejumlah Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan tingkat RT dengan menggunakan aplikasi e-database. Data yang dikumpulkan untuk memberikan dukungan dalam merumuskan perencanaan pembangunan melalui data spasial.
- c. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja perencanaan Pemerintah Kota Balikpapan menggunakan aplikasi SIPEKA.
- d. Pemerintah kota Balikpapan telah memperoleh penghargaan kinerja tata kelola keuangan dari BPK selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2014-tahun 2019) kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

q. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target IKU Survei Kepuasan Masyarakat adalah 79,76 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai 81,61. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU SKM antara target dan realisasi sebesar 102,37%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU SKM pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Survei Kepuasan Masyarakat tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.30
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa berdasarkan hasil survey terhadap layanan pada masyarakat Kota Balikpapan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan mencapai 81,61. Capaian ini merupakan gambaran dari hasil konkrit Pemerintah Kota Balikpapan bersama jajaran perangkat daerah dalam memberikan layanan fasilitas umum yang prima bagi masyarakat sebagai implementasi PERMENPANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Capaian hasil akuntabilitas SKM pada tahun 2019 mengalami peningkatan indeks sebesar 2,87 dari capaian 2018 yaitu 78,78.

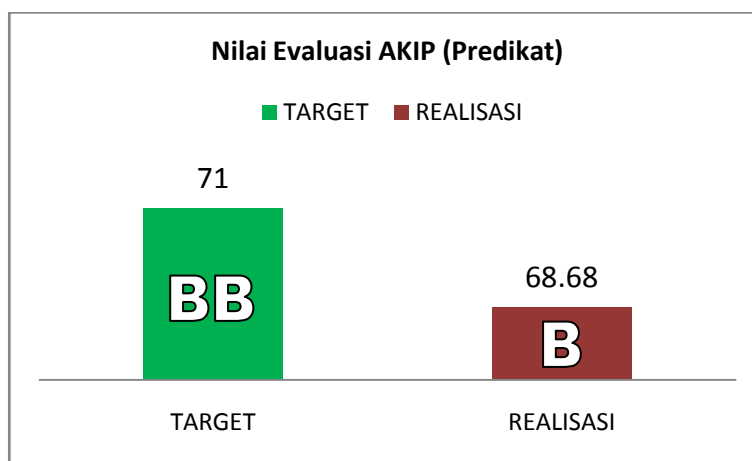
Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitas umum di tekankan pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang kurang tepat menempatkan dagangannya pada setiap kawasan pasar di Kota Balikpapan. Selain itu melakukan rehabilitas fasilitas lapak dagang dan meningkatkan tipe pasar tradisional serta pengelolaan lahan parkir pada pasar.

r. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

Target IKU Evaluasi AKIP adalah 71,00 dengan BB sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai 68,68 dengan predikat B. Berdasarkan realisasi

tersebut maka capaian kinerja IKU Evaluasi AKIP antara target dan realisasi sebesar 96,37%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU SKM pada tahun 2019 “TIDAK TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi Evaluasi AKIP tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.31
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa tidak tercapainya target AKIP menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian hasil akuntabilitas Evaluasi AKIP pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,55 dari capaian 2018 yaitu 68,13.

Hal-hal yang perlu difokuskan atas rekomendasi adalah mengefektifkan penerapan budaya kinerja dengan cara:

- Menerapkan *Performance Based Organization*.
- Menyempurnakan penjabaran kinerja dari level pemerintah kota sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (*logical framework*).
- Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkat organisasi,

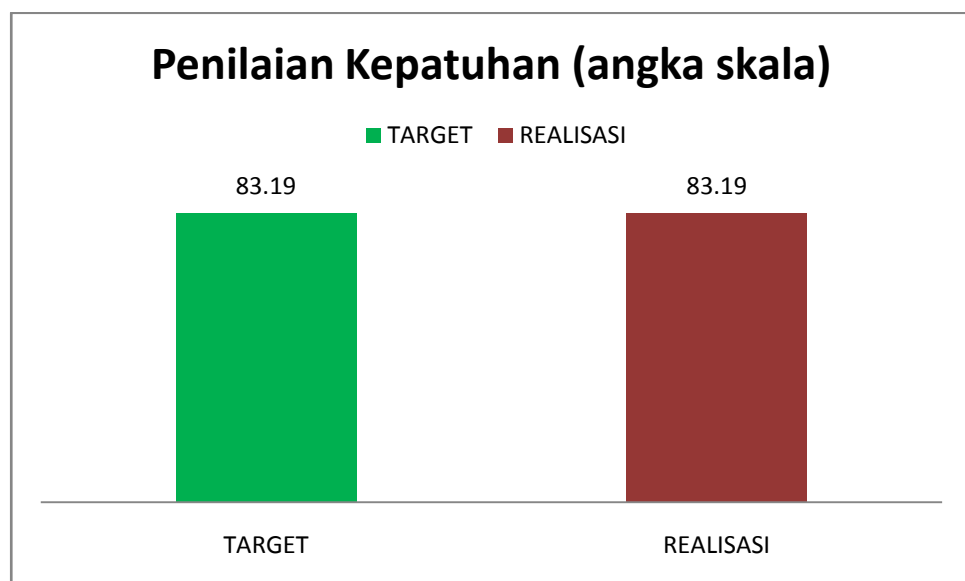


- Menyempurnakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan.
- Penerapan budaya kinerja di lingkungan pemerintah kota Balikpapan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi.
- Memperbaiki penyajian laporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis capaian kinerja dan analisis efektivitas penggunaan anggaran.
- Meningkatkan kapasitas Inspektorat Kota Balikpapan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memastikan terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

s. Penilaian Kepatuhan

Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 83,19 (zona hijau) sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai 83,19 (zona hijau). Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Penilaian Kepatuhan antara target dan realisasi sebesar 100,00%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU Penilaian Kepatuhan pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi Penilaian Kepatuhan tergambar pada grafik dibawah ini



Gambar 3.32
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU



Penilaian Kepatuhan Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi), warna kuning (Kepatuhan Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi pelayan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam kriteria zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Capaian hasil akuntabilitas Penilaian Kepatuhan pada tahun 2019 sama dengan capaian 2018 yaitu 83,19.

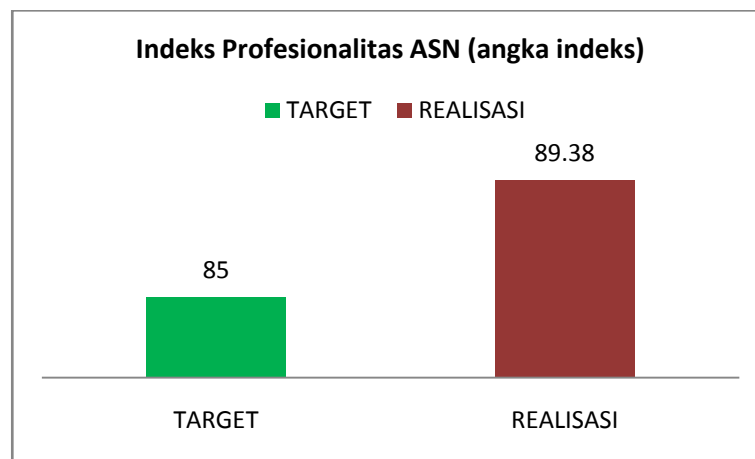
Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada perangkat daerah.
- b. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik ditiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam pelayanan serta adanya unsur gratifikasi dari layanan yang diberikan.
- c. Mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah terhadap layanan publik.

t. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 85 sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai 89,38. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Profesionalitas ASN antara target dan realisasi sebesar 105,15%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2019 “TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi Indeks Profesionalitas ASN tergambar pada grafik dibawah ini



Gambar 3.33
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
IKU Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa Indeks Profesionalitas ASN Kota Balikpapan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, hal ini menggambarkan bahwa ASN telah terdistribusi berdasarkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu pada organisasi perangkat daerah serta terjaminnya keselarasan *job description* dengan latar belakang pendidikan ASN per SKPD.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN adalah:

- Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
- Memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalank tugas dan pelayanan bagi masyarakat.



2.2.2. Analisis Capaian Perbandingan Realisasi IKU Kota Balikpapan Sampai Dengan Tahun 2019 Terhadap Target Capaian Akhir IKU RPJMD 2016-2021 Kota Balikpapan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian target IKU sampai dengan tahun 2019 yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan analisis serta review sebagai evaluasi terhadap capaian realisasi dari 20 IKU tersebut. Adapun capaian realisasi IKU Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2019 terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4

Realisasi Capaian IKU sampai dengan 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline IKU Tahun 2015	Target Akhir IKU RPJMD	Realisasi Capaian			
					2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.43	10.53	10.54	10.55	10.58	10.67
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.73	15.73	13.59	13.75	14.12	14.13
3	Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73.95	74.04	73.96	73.97	73.98	74.41
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5.95	4.55	5.45	10.39	9.52	7.29
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	62.5	64.92	63.28	63.38	64.33	64.66
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	78.18	79.53	78.57	79.01	79.71	80.11
7	Tingkat Kemiskinan (TKm)	Persen	2.35	2.3	2.81	2.82	2.64	2.42
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	89.97	92	90.11	89.73	89.74	89.71



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline IKU Tahun 2015	Target Akhir IKU RPJMD	Realisasi Capaian			
					2016	2017	2018	2019
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	58.58	60.64	62.45	59.18	59.55	60.42
10	<i>Livable City Index</i> (LCI)	Angka Indeks	71.12	74.50	65.80	80.81	81.30	77.58
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	Angka Indeks	73.40	79.00	-	78.10	80.35	77.75
12	Indeks Gini Ratio (GR)	Angka Indeks	0.34	0.3	0.28	0.32	0.31	0.32
13	PDRB perkapita	Rp. (Juta)	120.32	126.64	128.13	137.07	142.4	151.7
14	PDRB non migas	Rp. (Triliun)	33.39	38.62	46.06	42.28	67.46	40.61
15	Opini laporan keuangan (OLK)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Nilai Kriteria	6.62	6.90	6.62	6.64	6.87	6.89
17	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	79.36	80.36	69.38	78.69	78.78	81.65
18	Nilai Evaluasi LAKIP	Predikat	55.19	75	60.85	66,19	68,13	68.68
19	Penilaian Kepatuhan	Angka Indeks	50	79	74.20	83.19	83.19	83.19
20	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Angka Indeks	82	87	83.00	87.73	92.58	89.38

Sumber : Hasil pengolahan data LKJIP, Bappeda Litbang 2019

Berdasarkan tabel realisasi IKU Kota Balikpapan tersebut, analisis perbandingan capaian realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 terhadap target capaian akhir IKU RPJMD 2016-2021 Kota Balikpapan terdeskripsi untuk masing-masing indikator sebagai berikut:



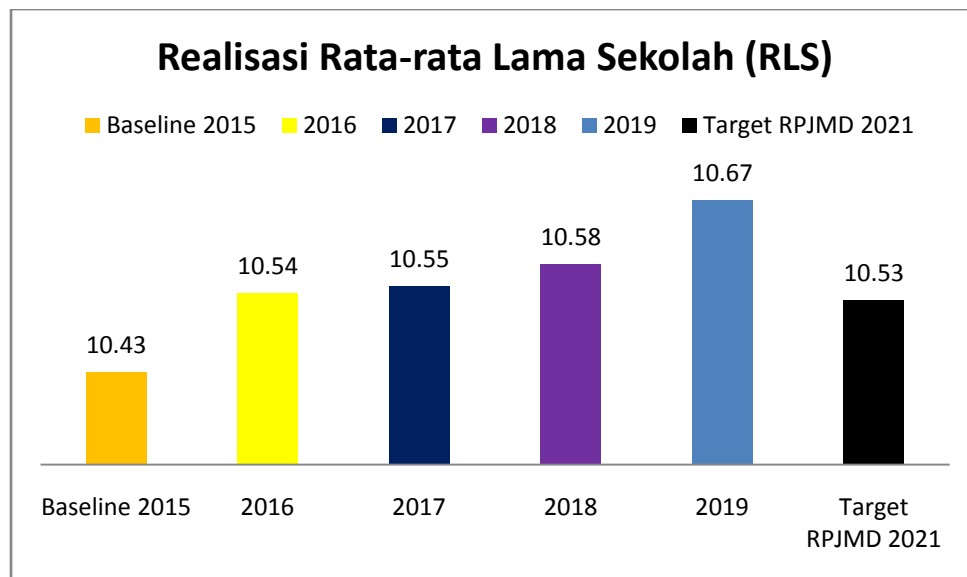
1. Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU RLS pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 10,53 tahun. Berdasarkan realisasi IKU RLS sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 10,67. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU RLS melampaui sebesar 0,14 tahun.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 101,33%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU RLS melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 1,33% terhadap target akhir RPJMD untuk IKU RLS sebesar 10,53 tahun. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU RLS sebesar 10,43 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,24 tahun sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan waktu tempuh pendidikan masyarakat Kota Balikpapan dari kelas X menjadi kelas XI. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terdeskripsi pada gambar grafik dibawah ini.



Gambar 3.34.

Capaian IKU RLS sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU RLS pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU RLS dari baseline tahun 2015, capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU RLS yang positif.

2. Capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap target akhir RPJMD

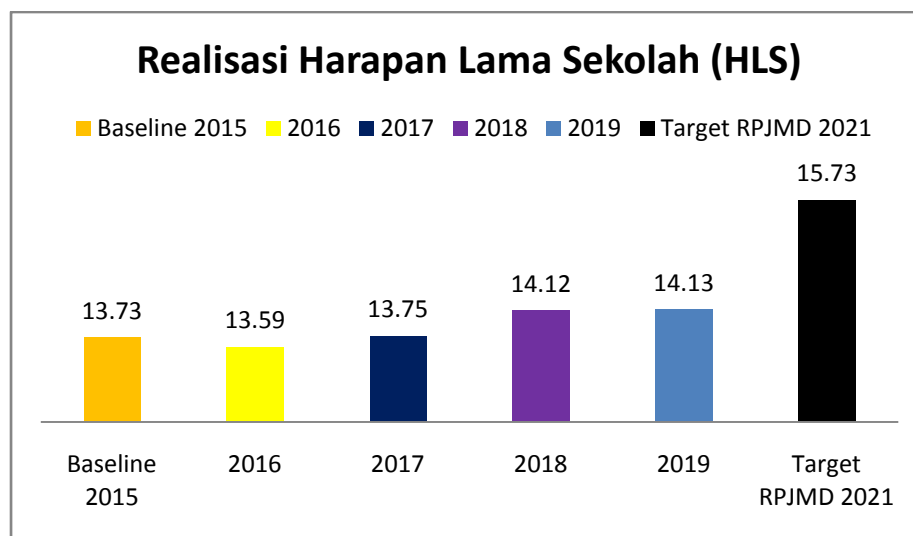
Target akhir IKU Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 15,73. Berdasarkan realisasi IKU HLS sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 14,13. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD hampir tercapai atau pencapaian IKU HLS kurang sebesar 1,6 tahun.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 89,83, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU HLS Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 10,17% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU HLS sebesar 14,13 tahun. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian

IKU HLS sebesar 13,73 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,40 tahun sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan peluang sekolah bagi masyarakat Kota Balikpapan dari tingkat Diploma II menjadi Diploma III. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU HLS sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU HLS tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.34

Capaian IKU HLS sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU HLS pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU HLS dari baseline tahun 2015, capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat cukup signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU HLS yang positif.

3. Capaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap target akhir RPJMD

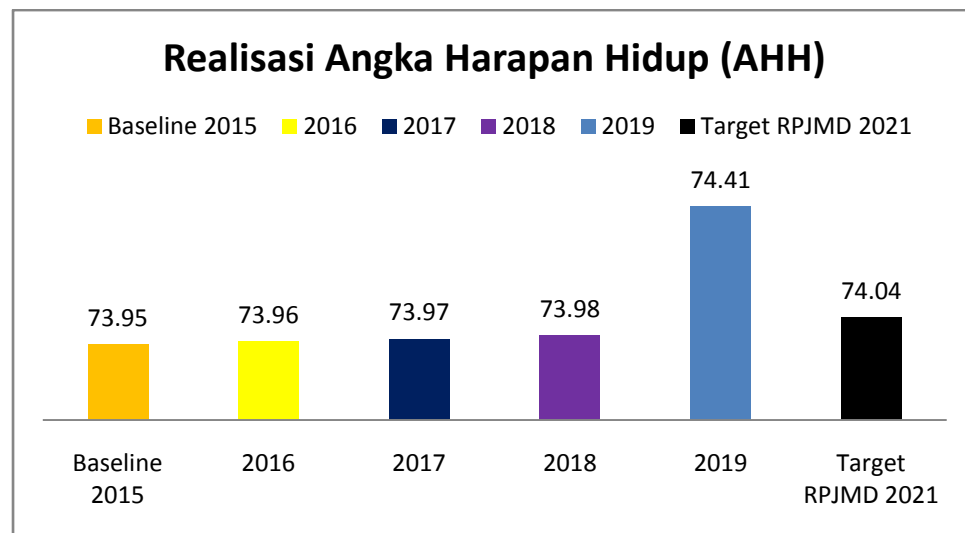
Target akhir IKU Angka Harapan Hidup (AHH) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 74,04. Berdasarkan realisasi IKU AHH sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 74,41. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU AHH lebih melampaui sebesar 0,37 tahun.



Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 100,50%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU AHH melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 0,50% terhadap target akhir RPJMD untuk AHH sebesar 74,04 tahun. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU AHH sebesar 73,95 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,46 tahun sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan harapan hidup bagi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2019 (periode 2015-2017) di Kota Balikpapan dari 73 tahun menjadi 74 tahun. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU AHH sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU AHH tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.36

Capaian IKU AHH sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU AHH pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU AHH dari baseline tahun 2015, capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian



realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU AHH yang positif.

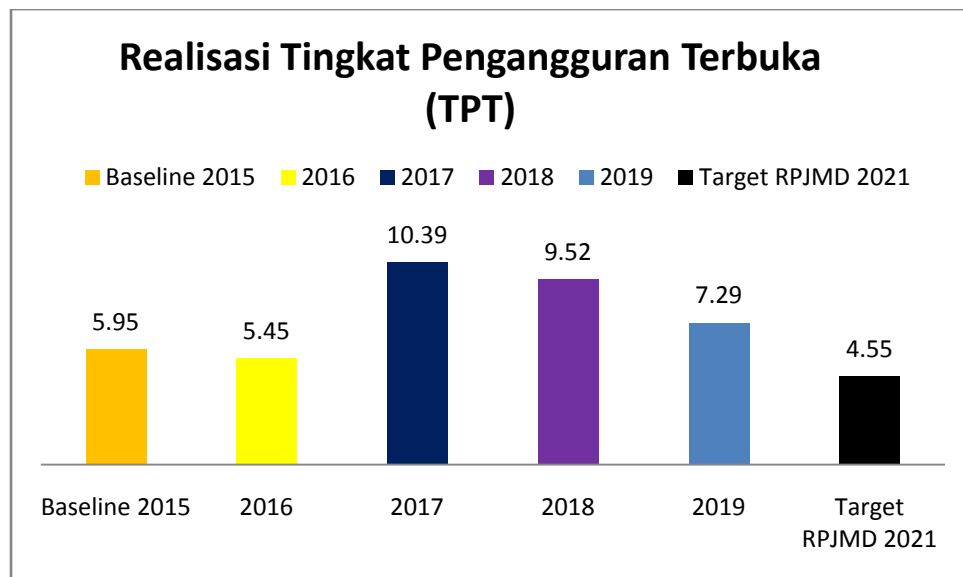
4. Capaian indikator Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 4,55%. Berdasarkan realisasi IKU TPT sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 7,29%. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD belum tercapai atau pencapaian IKU TPT kurang sebesar 2,74 %.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 62,41, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU TPT Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 37,59% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU TPT sebesar 4,55%. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TPT sebesar 5,95% mengalami penurunan kinerja sebesar 1,40% sampai dengan tahun 2019. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan memiliki tugas berat dan harus mampu meningkatkan capaian tersebut secara signifikan dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU TPT sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU TPT tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.37

Capaian IKU TPT sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU TPT pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU TPT dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 menurun sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU TPT yang positif.

5. Capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 64,92%. Berdasarkan realisasi IKU TPAK sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 64,66%. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD hampir tercapai atau pencapaian IKU TPAK kurang sebesar 0,40%.

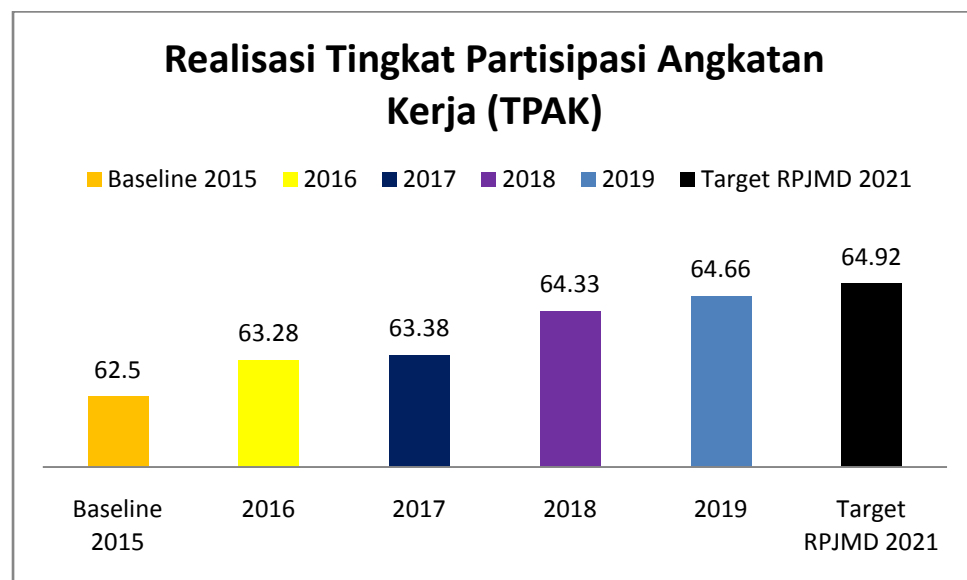
Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 99,60%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU TPAK Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 0,40% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU TPAK



sebesar 64,92%. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TPAK sebesar 62,50% mengalami peningkatan kinerja sebesar 2,61% sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan capaian tersebut secara signifikan dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU TPAK sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU TPAK tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.38

Capaian IKU TPAK sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU TPAK pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU TPAK dari baseline tahun 2015, capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU TPAK yang positif.

6. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap target akhir RPJMD

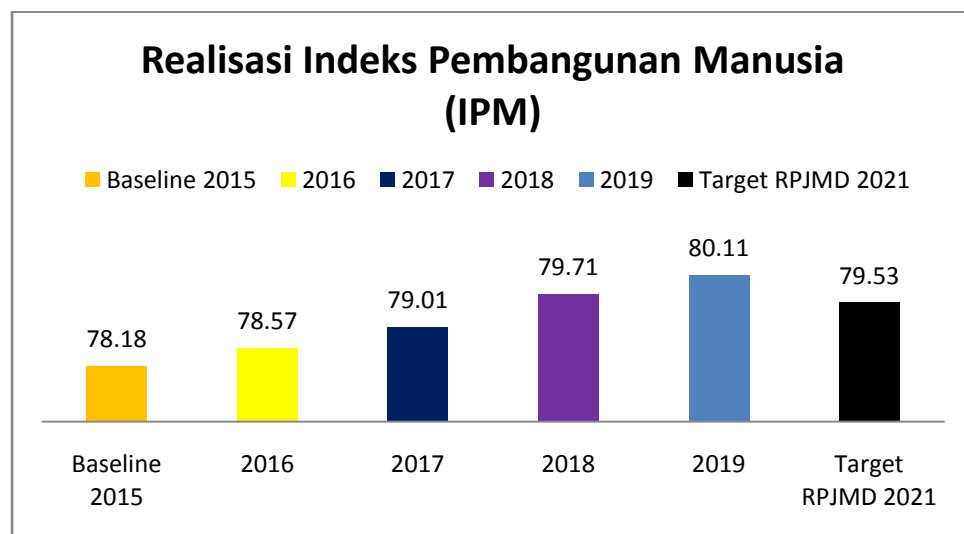
Target akhir IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 79,53. Berdasarkan realisasi IKU IPM sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 80,11. Terkait realisasi IKU



pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU IPM dengan nilai indeks melebihi/melampaui sebesar 0,58. Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 100,73%, capaian tersebut dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPM melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 0,73% terhadap target akhir RPJMD untuk Indikator Kinerja Utama IPM sebesar 79,53. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPM sebesar 78,18 mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,93 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja indikator IPM yang meliputi Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekola (indikator pengungkit dimensi pendidikan), Angka Harapan Hidup (indikator pengungkit dimensi kesehatan) dan Pengeluaran per Kapita (indikator pengungkit dimensi pendapatan). Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU IPM sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU IPM tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.39

Capaian IKU IPM sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IPM pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan



Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU IPM dari baseline tahun 2015, capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU IPM yang positif.

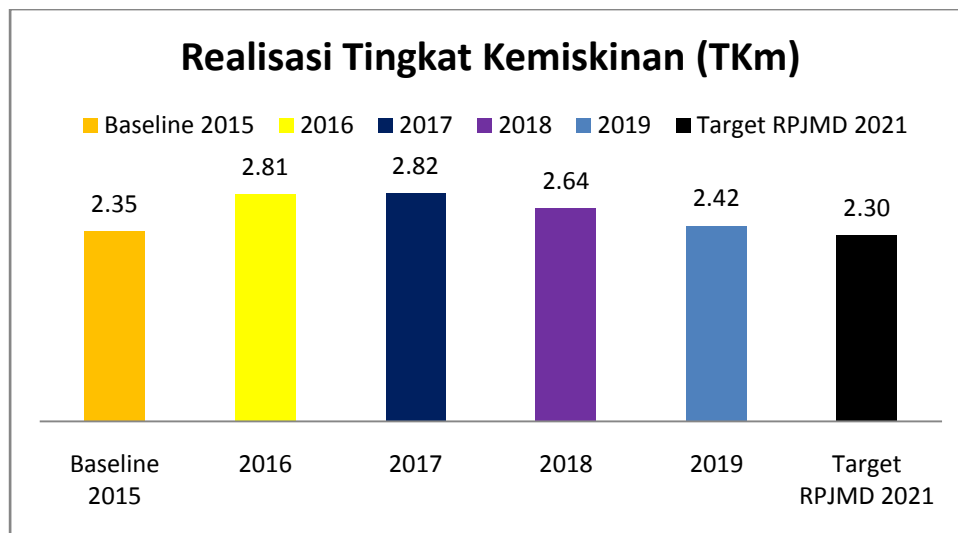
7. Capaian indikator Tingkat Kemiskinan (TKm) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Tingkat Kemiskinan (TKm) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 2,30%. Berdasarkan realisasi TKm sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 2,42%. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang tercapai sebesar 0,12%.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 95,04%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU TKm Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 4,96% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU TKm sebesar 2,30%. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TKm sebesar 2,35% mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,07% sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan capaian tersebut (menurunkan angka TKm) dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU TKm sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU TKm tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.40

Capaian IKU TKm sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU TKm pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU TKm dari baseline tahun 2015, capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU TKm yang positif.

8. Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 92,00. Berdasarkan realisasi IKU IPG sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 89,71. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang tercapai sebesar 2,29%.

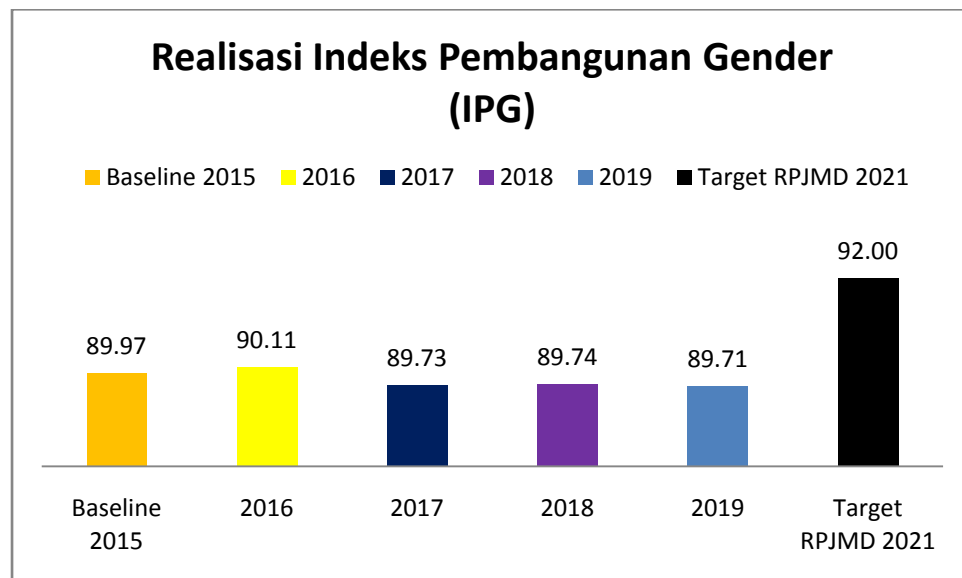
Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 97,51%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPG Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 2,49% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU IPG sebesar 92. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPG sebesar 89,97 mengalami penurunan kinerja sebesar 0,26 sampai dengan tahun 2019. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan memiliki tugas berat dan



harus mampu meningkatkan capaian tersebut secara signifikan dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU IPG sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU IPG tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.41

Capaian IKU IPG sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IPG pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU IPG dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU IPG yang positif.

9. Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 60,64. Berdasarkan realisasi IKU IKLH sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 60,42. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang tercapai sebesar 2,06.

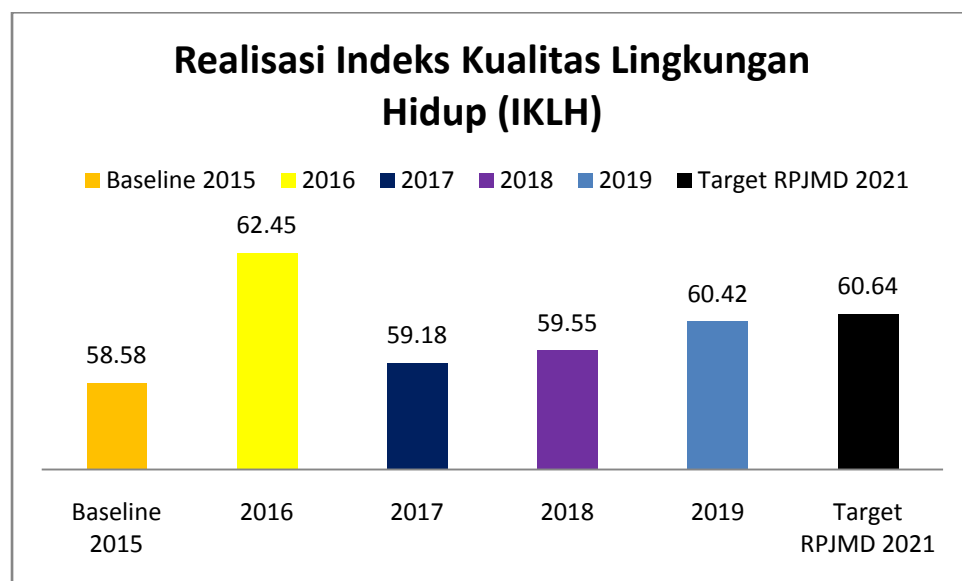
Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 99,64%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS** “Nilai



Akuntabilitas IKU IKLH Kurang dari Target Kinerja RPJMD". Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 0,36% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU IKLH sebesar 60,42. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IKLH sebesar 58,58 mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,84 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU IKLH sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU IKLH tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.42

Capaian IKU IKLH sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IKLH pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU IKLH dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU IKLH yang positif.



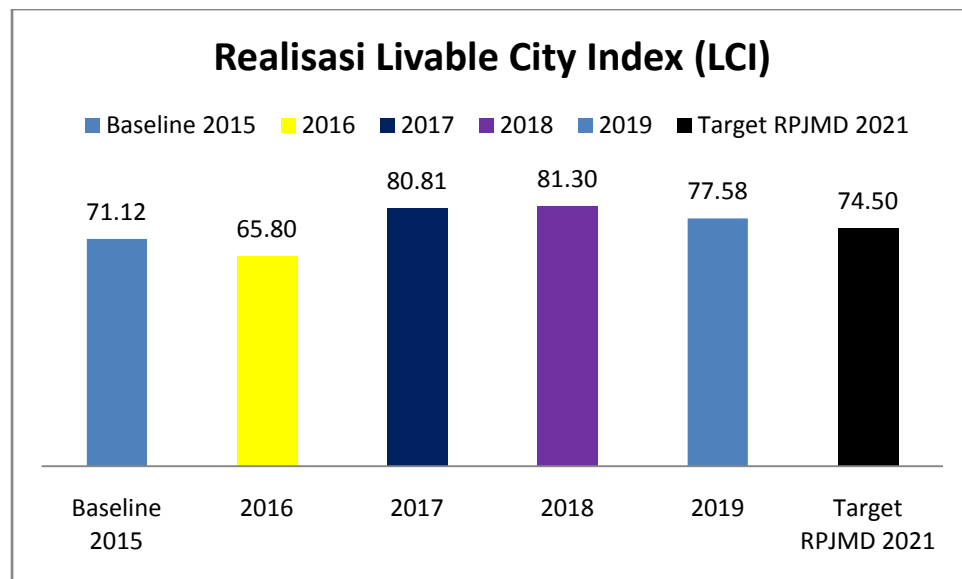
10. Capaian indikator Livable City Index terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Livable City Index (LCI) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 74,50. Berdasarkan realisasi IKU LCI sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 77,58. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 3.38.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 104,31%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU LCI melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 4,31% terhadap target akhir RPJMD untuk IKU LCI sebesar 74,50. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU LCI sebesar 71,12 mengalami peningkatan kinerja sebesar 6,46 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik dan aspek non-fisik baik untuk masyarakat Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU LCI sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU LCI tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.43

Capaian IKU LCI sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU LCI pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU LCI dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU LCI yang positif.

11. Capaian indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 79,00. Berdasarkan realisasi IKU IKLID sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 77,75. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang sebesar 1,25.

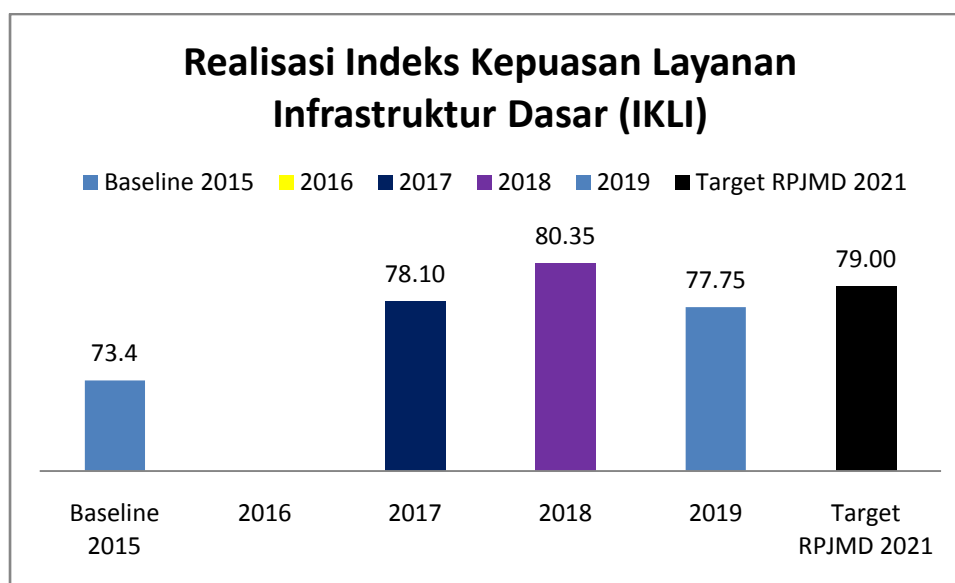
Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 98,42%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IKLID Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 1,58% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU IKLID sebesar 79,00. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IKLID



sebesar 73,40 mengalami peningkatan kinerja sebesar 4,35 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur dasar di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU IKLID sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU IKLID tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.44

Capaian IKU IKLID sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IKLID pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU IKLID dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU IKLID yang positif.

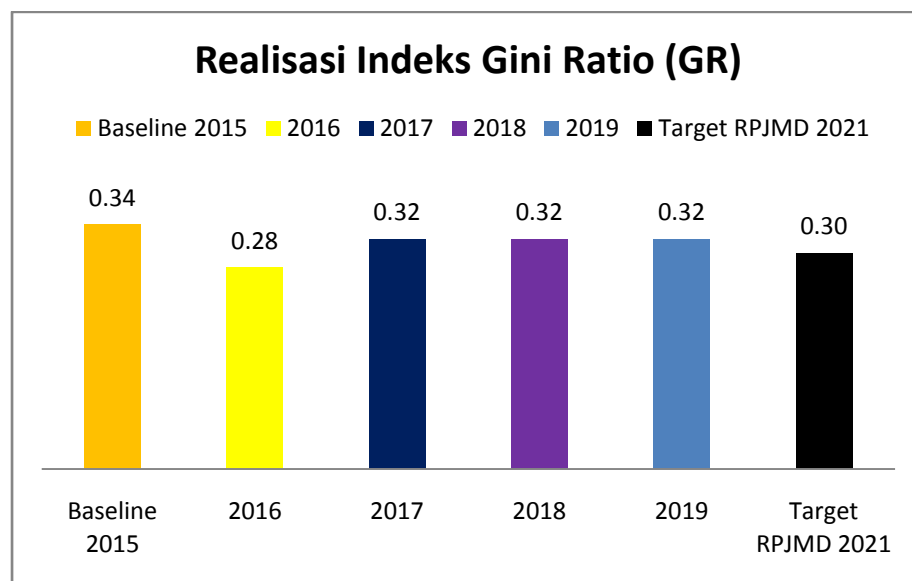
12. Capaian indikator Gini Ratio (GR) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir Gini Ratio (GR) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 0,30. Berdasarkan realisasi IKU GR sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 0,32. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang sebesar 0,02.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 93,75%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU GR Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 6,25% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU GR sebesar 0,30. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Gini Ratio (GR) sebesar 0,34 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,02 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU GR sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU GR tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.45

Capaian IKU Gini Rasio sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Gini Rasio pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU GR dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan



akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU GR yang positif.

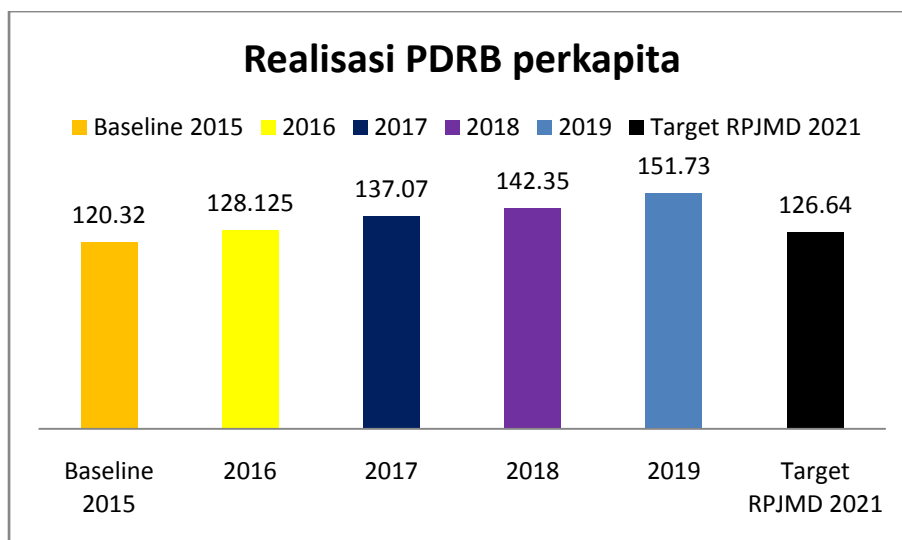
13. Capaian indikator PDRB Perkapita terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU PDRB Perkapita pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah Rp. 126,64 Juta. Berdasarkan realisasi IKU PDRB Perkapita sampai dengan tahun 2019 telah mencapai Rp. 151,73 Juta. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD melebihi sejumlah Rp. 25,09 Juta.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 119,81%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU PDRB Perkapita melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 119,81% terhadap target akhir RPJMD untuk IKU PDRB Perkapita sejumlah Rp. 126,64 Juta. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU PDRB Perkapita sejumlah Rp. 120,32 Juta mengalami peningkatan kinerja sejumlah Rp. 31,41 Juta sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan tetap berupaya meningkatkan, minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU PDRB Perkapita sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU PDRB Perkapita tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.46.

Capaian IKU PDRB Perkapita sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU PDRB Perkapita pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU PDRB Perkapita dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU PDRB Perkapita yang positif.

14. Capaian indikator PDRB Non Migas terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU PDRB Non Migas pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah Rp. 38,62 Triliun. Berdasarkan realisasi IKU PDRB Non Migas sampai dengan tahun 2019 telah mencapai Rp. 40,61 Triliun. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD melebihi sejumlah Rp.1,99 Triliun.

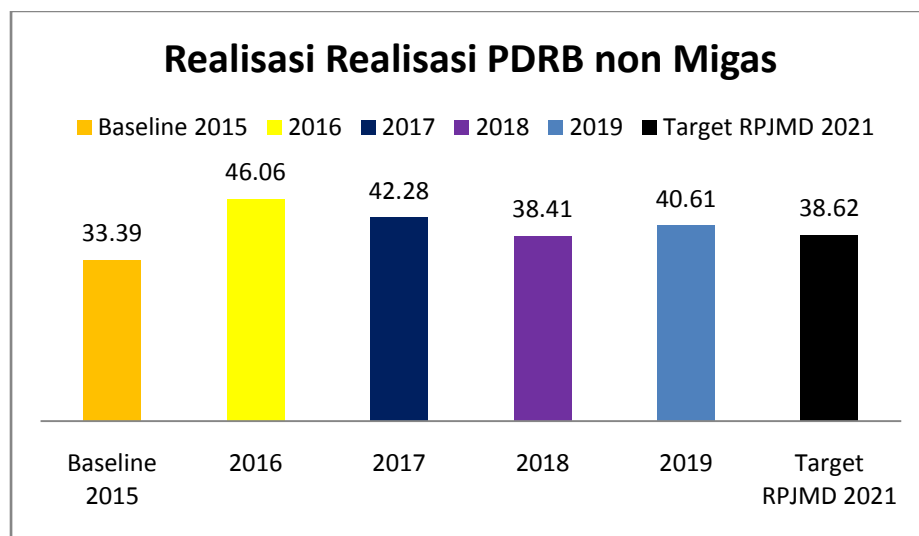
Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,15%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU PDRB Non Migas melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 5,15% terhadap target akhir RPJMD untuk IKU PDRB Non Migas sejumlah Rp. 38,62 Triliun. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU PDRB Non Migas sejumlah Rp. 33,39 Triliun mengalami peningkatan kinerja sejumlah Rp. 7,22 Triliun sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan



kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan yang bersumber dari non migas. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan tetap berupaya meningkatkan, minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU PDRB non Migas sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU PDRB non Migas tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.47.

Capaian IKU PDRB non Migas sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU PDRB non Migas pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU PDRB non Migas dari capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 meningkat sangat signifikan pada arah pertumbuhan hasil kinerja IKU PDRB non Migas yang positif.

15. Capaian indikator Opini Laporan Keuangan terhadap target akhir RPJMD

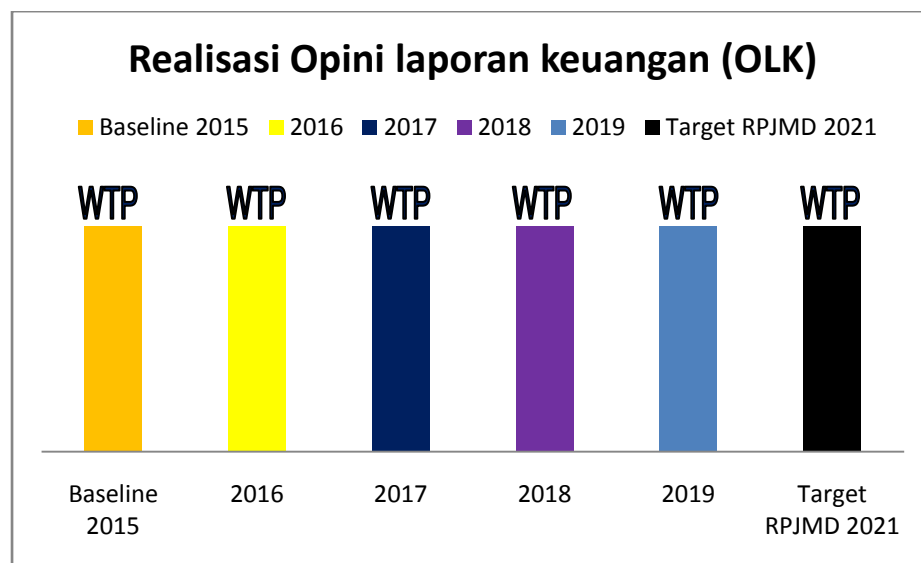
Target akhir IKU Opini Laporan Keuangan (OLK) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan dengan predikat adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan realisasi IKU OLK sampai dengan tahun 2019 dengan predikat adalah WTP. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD adalah 100%. Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,15%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat



diartikan TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU OLK melampaui Target Kinerja RPJMD”. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi target akhir RPJMD untuk IKU OLK dengan predikat WTP. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU OLK sama dengan capaian sampai dengan tahun 2019 untuk IKU OLK adalah WTP. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah mampu mempertahankan predikat tata kelola keuangan dalam rangka mewujudkan good governance (Kepemerintahan yang Baik) di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU OLK sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU OLK tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.48.

Capaian IKU Opini Laporan Keuangan (OLK) sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Opini Laporan Keuangan (OLK) pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU OLK dari capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 hal ini menunjukkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kota Balikpapan di nilai baik dan hasil kinerja menunjukkan pada capaian IKU OLK yang positif.



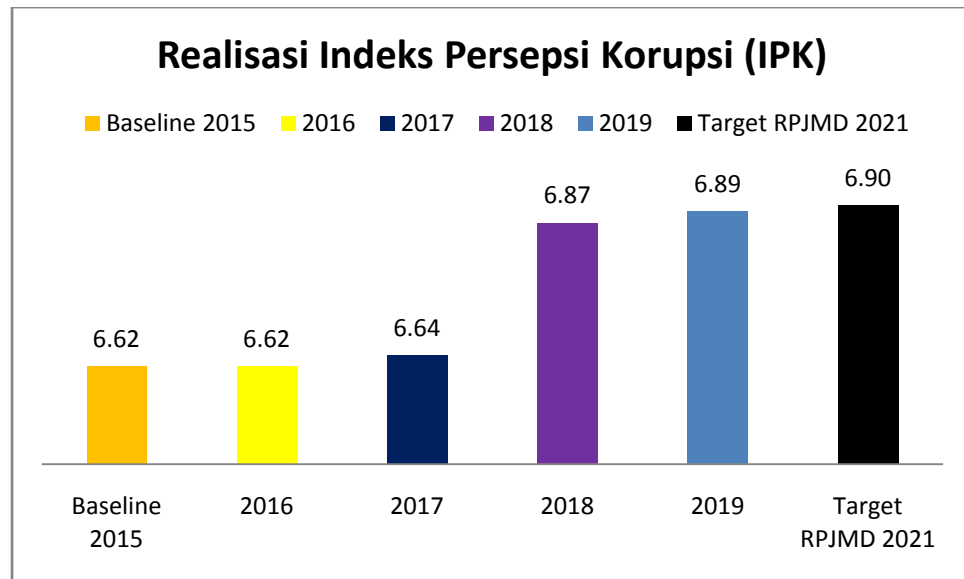
16. Capaian indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 6,90. Berdasarkan realisasi IKU IPK sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 6,89. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang sebesar 0,01.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 99,86%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPK Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 0,14% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU IPK sebesar 6,90. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 6,62 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,27 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus berupaya meningkatkan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU IPK sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU Indeks Persepsi Korupsi tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.49.

Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU IPK dari capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 hal ini menunjukkan persepsi korupsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kota Balikpapan berada pada “Skala Sedang” atau dapat dikatakan adanya arah persepsi publik terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang menolak KKN. Nilai persepsi tersebut didasarkan atas skala 0 – 10, dimana jika IPK sama dengan 0 berarti sangat korup dan sebaliknya. Berkenaan dengan capaian realisasi IPK tersebut, akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan dinilai tumbuh positif.

17. Capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 80,36. Berdasarkan realisasi IKU SKM sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 81,65. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 1,29.

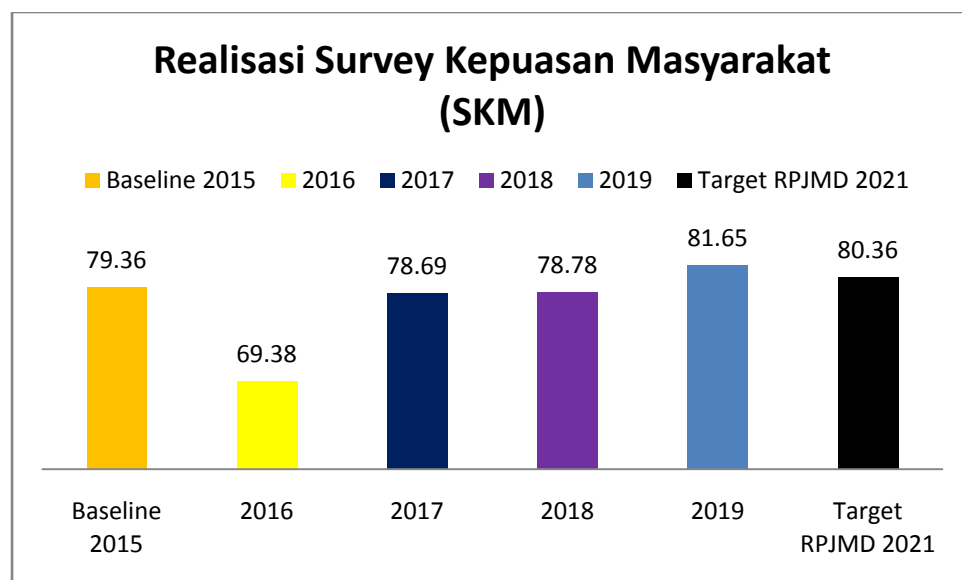
Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar



101,61%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU SKM melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 1,61% terhadap target akhir RPJMD untuk Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 80,36. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU SKM sebesar 79,36 mengalami peningkatan kinerja sejumlah 2,29 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap layanan public yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri atas layanan kelurahan, layanan puskesmas, layanan pasar, layanan perijinan, dan layanan kependudukan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan tetap berupaya meningkatkan, minimal mampu mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU SKM sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU SKM tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.50.

Capaian IKU Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan



Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU SKM dari capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 hal ini menunjukkan akuntabilitas dalam layanan Pemerintah Kota Balikpapan meningkat sangat signifikan kearah pertumbuhan yang positif.

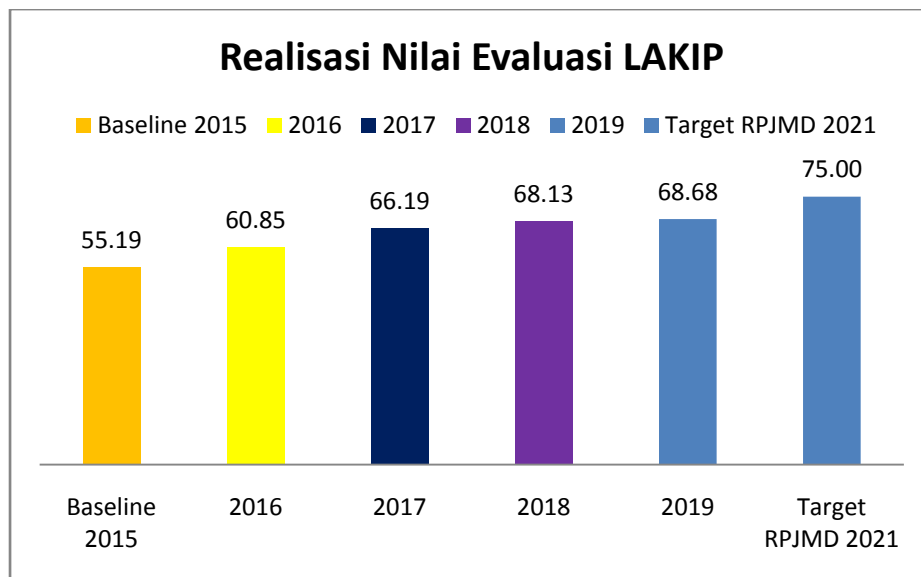
18. Capaian indikator Nilai Evaluasi LAKIP terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Nilai Evaluasi LAKIP pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 75 dengan predikat BB. Berdasarkan realisasi IKU Nilai Evaluasi LAKIP sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 68,68. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang sebesar 6,32.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 91,57%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU Nilai Evaluasi LAKIP Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 8,43% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU Nilai Evaluasi LAKIP sebesar 75,00. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP sebesar 6,62 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,27 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus berupaya meningkatkan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU Nilai Evaluasi LAKIP tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.51.

Capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Nilai Evaluasi LAKIP pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU Nilai Evaluasi LAKIP dari capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 hal ini menunjukkan akuntabilitas dalam layanan Pemerintah Kota Balikpapan meningkat sangat signifikan kearah pertumbuhan yang positif.

19. Capaian indikator Penilaian Kepatuhan terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Penilaian Kepatuhan (Ombudsman RI) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 79,00. Berdasarkan realisasi IKU Penilaian Kepatuhan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 83,19. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 4,19.

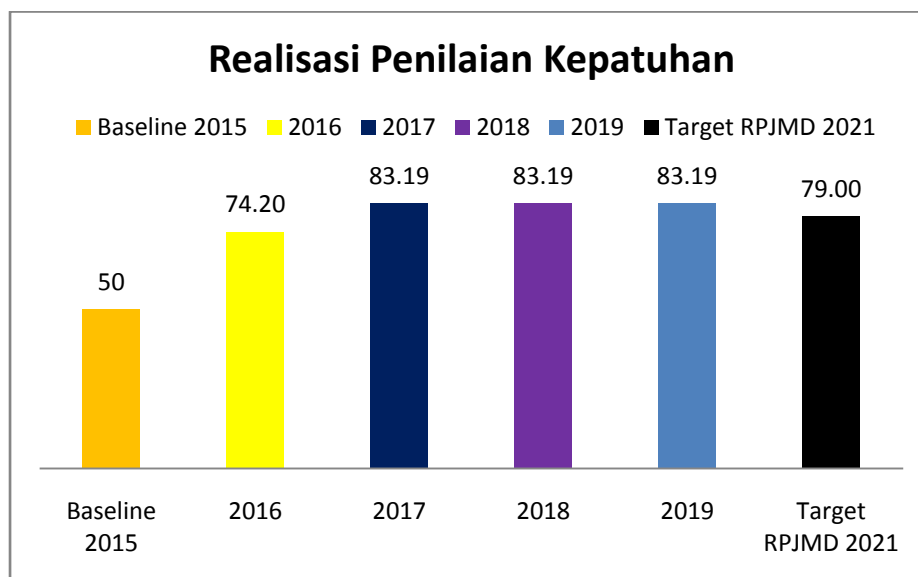
Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,30%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU Penilaian Kepatuhan melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 5,30% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU Penilaian



Kepatuhan sebesar 79,00. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 50 mengalami peningkatan kinerja sebesar 33,19 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan tersu berupaya meningkatkan, minimal mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU Penilaian Kepatuhan sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU Penilaian Kepatuhan tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.52.

Capaian IKU Penilaian Kepatuhan sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU Penilaian Kepatuhan pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU Penilaian Kepatuhan dari capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 hal ini menunjukkan Nilai Kepatuhan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan berada pada Zonasi Pewarnaan Hijau. Bahwa berdasarkan penilaian kepatuhan rata-rata layanan yang diberikan pemerintah kota bagi masyarakat telah mengikuti SOP layanan dan rendahnya pengaruh negatif (suap dalam proses layanan, gratifikasi, unsur nepotisme dsb) atas kepentingan aparatur dalam memberikan layanan. Terkait



dengan capaian realisasi tersebut menunjukkan akuntabilitas terhadap kinerja layanan Pemerintah Kota Balikpapan meningkat sangat signifikan dengan arah pertumbuhan yang positif.

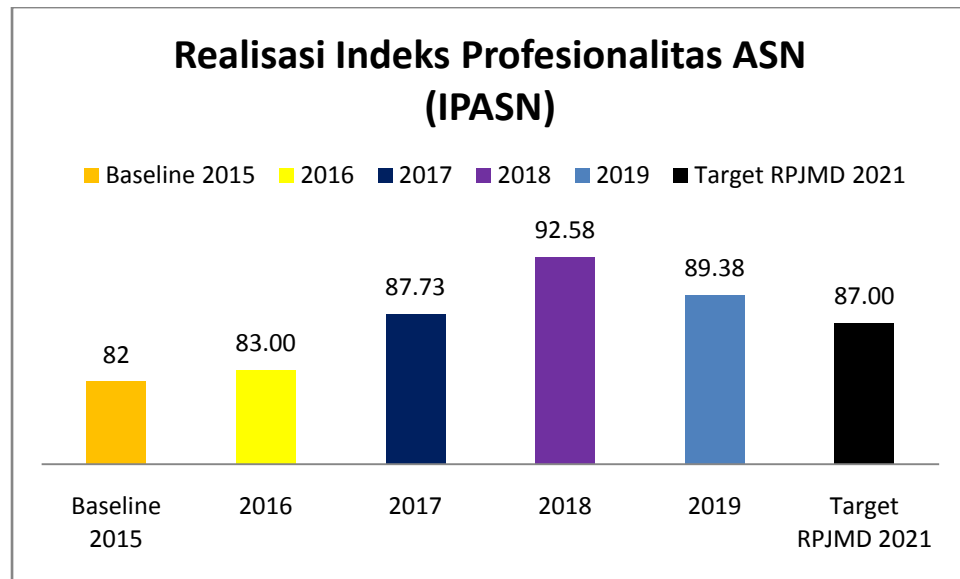
20. Capaian indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 87. Berdasarkan realisasi IKU IPASN sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 83,19. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 4,19.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,30%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPASN melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 5,30% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU IPASN sebesar 79,00. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPASN sebesar 50 mengalami peningkatan kinerja sebesar 33,19 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus berupaya meningkatkan, minimal mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian IKU IPASN sampai dengan tahun 2019 berbanding terhadap target akhir IKU Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN) tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.53.

Capaian IKU IPASN sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir IKU IPASN pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik, hasil akuntabilitas terhadap IKU IPASN dari capaian realisasi tahun 2016, capaian realisasi tahun 2017, capaian realisasi tahun 2018 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 hal ini menunjukkan Nilai Kepatuhan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan berada pada Zonasi Pewarnaan Hijau. Bahwa berdasarkan penilaian kepatuhan rata-rata layanan yang diberikan pemerintah kota bagi masyarakat telah mengikuti SOP layanan dan rendahnya pengaruh negatif (suap dalam proses layanan, gratifikasi, unsur nepotisme dsb) atas kepentingan aparatur dalam memberikan layanan. Terkait dengan capaian realisasi tersebut menunjukkan akuntabilitas terhadap kinerja layanan Pemerintah Kota Balikpapan meningkat sangat signifikan dengan arah pertumbuhan yang positif.

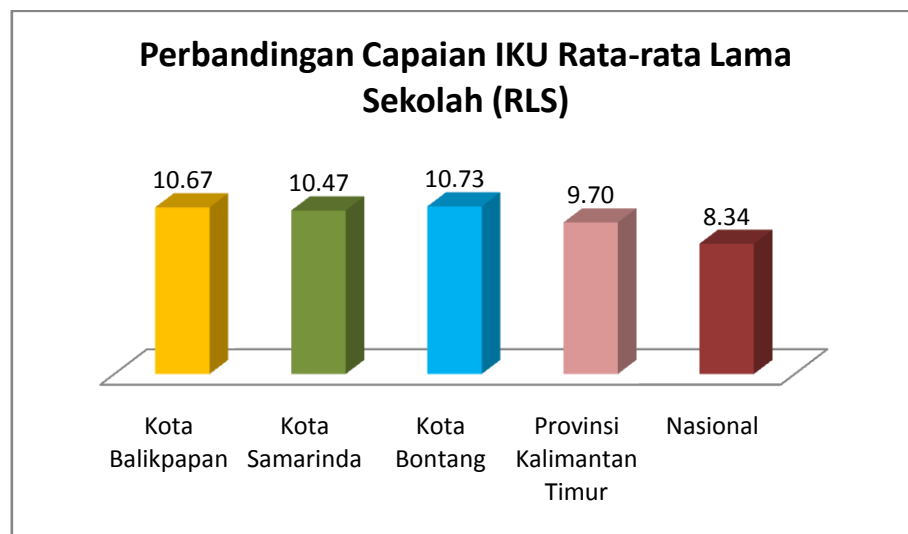
2.2.3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2019 terhadap Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Nasional, Provinsi dan Kota di Kalimantan Timur

Pada sub bab ini selanjutnya akan dibahas perbandingan antara capaian realisasi 20 (dua puluh) yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan tahun 2019 terhadap realisasi IKU Nasional tahun 2019, realisasi IKU Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, realisasi IKU Kota Samarinda tahun 2019

dan realisasi IKU Kota Bontang tahun 2019. Adapun perbandingan antar capaian IKU terdeskripsi sebagai berikut :

1. Perbandingan capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perbandingan capaian IKU RLS Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.54.

Perbandingan Capaian Realisasi IKU RLS Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU RLS Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-2 atau dibawah capaian realisasi IKU RLS Kota Bontang dengan selisih capaian 0,06 tahun, dan lebih tinggi dari capaian realisasi IKU RLS Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan realisasi IKU RLS Nasional. Terkait hasil perbandingan tersebut, upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU RLS pada tahun 2020 adalah:

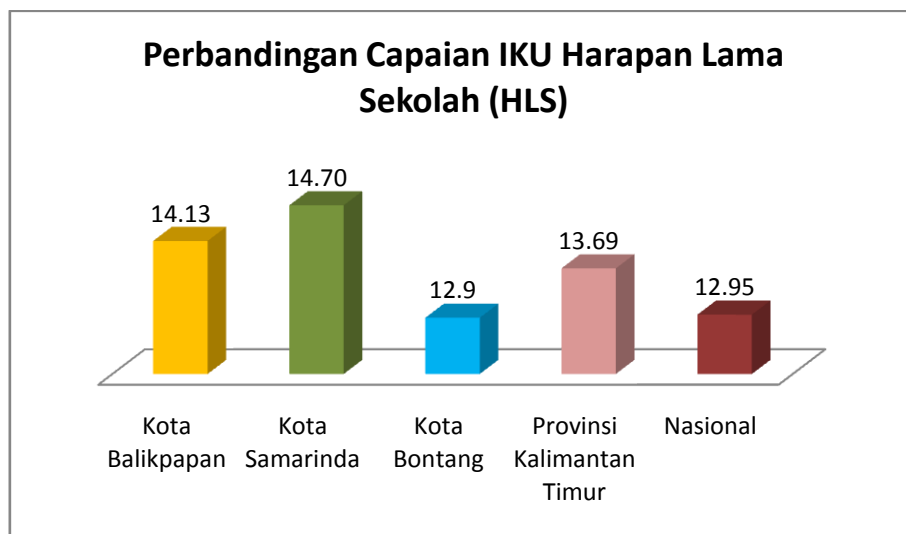
- Memperkecil angka putus sekolah.
- Meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.
- Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu.
- Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah.



- f. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta
- g. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

2. Perbandingan capaian IKU Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perbandingan capaian IKU HLS Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.55.

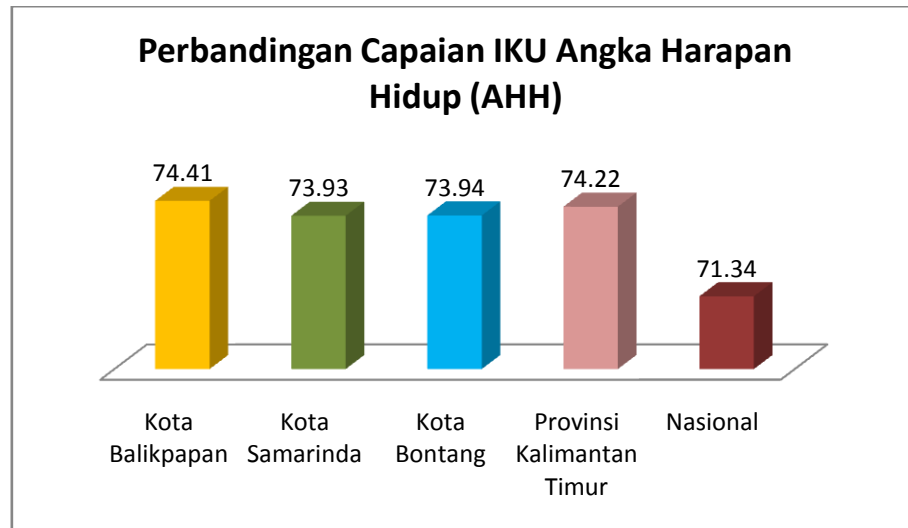
Perbandingan Capaian Realisasi IKU HLS Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU HLS Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-2 atau dibawah capaian realisasi IKU RLS Kota Samarinda dengan selisih capaian 0,57 tahun, dan lebih tinggi dari capaian realisasi IKU HLS Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Terkait hasil perbandingan tersebut, upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU HLS pada tahun 2020 adalah:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- b. Meningkatkan APM SMP.
- c. Menurunkan angka kemiskinan.
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga pendidik.

3. Perbandingan capaian IKU Angka Harapan Hidup (AHH)

Perbandingan capaian IKU AHH Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.56.

Perbandingan Capaian Realisasi IKU AHH Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

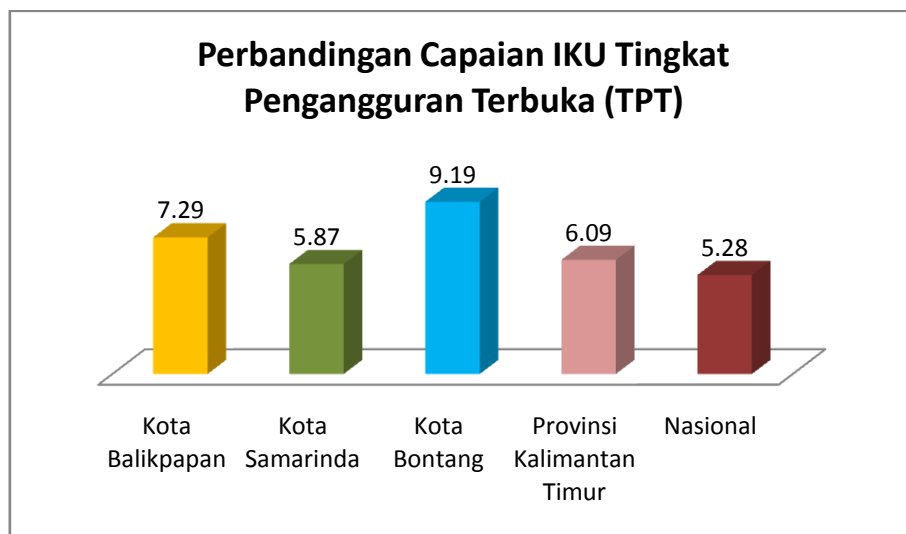
Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU AHH Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-1 atau diatas capaian realisasi Kota Samarinda Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Terkait hasil perbandingan tersebut, upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah mempertahankan capaian IKU AHH dan meningkatkan capaian IKU AHH pada tahun 2020 adalah:

- Meningkatkan harapan subyektif bagi penduduk di Kota Balikpapan.
- Meningkatkan kondisi kesehatan penduduk terhadap penyakit berat seperti hipertensi, osteoartritis, TBC, asma, diabetes, kanker, tumor, depresi, sirosis hati, gagal ginjal dan sebagainya.
- Meningkatkan kesehatan dan sanitasi lingkungan untuk masyarakat yang meliputi kondisi lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, dan seluruh lingkungan aktivitas bagi publik baik formal maupun informal.
- Mencegah pencemaran lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk seluruh masyarakat.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat.
- f. Menggalakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

4. Perbandingan capaian IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perbandingan capaian IKU TPT Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.57.

Perbandingan Capaian Realisasi IKU TPT Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU TPT Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-2 atau di bawah capaian realisasi IKU TPT Kota Bontang dengan selisih capaian 1,9%, dan lebih rendah dari capaian realisasi IKU TPT Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Terkait hasil perbandingan tersebut, upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah:

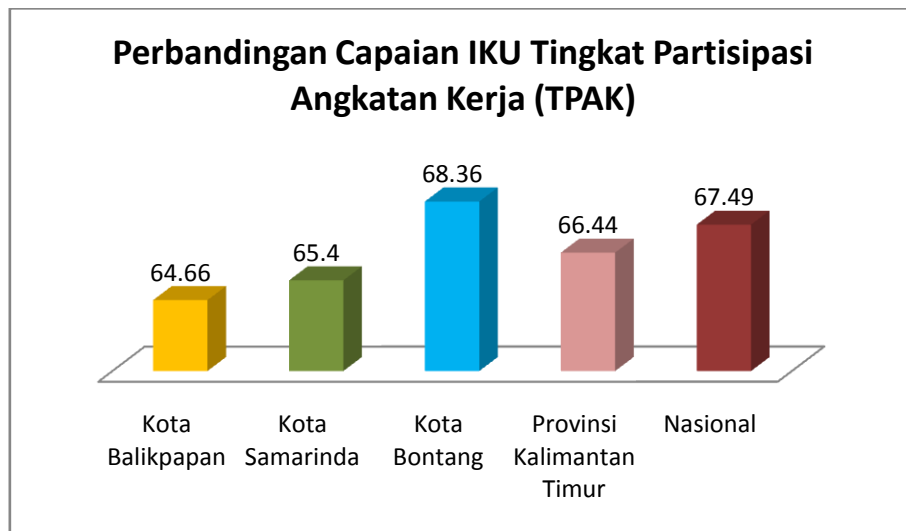
- a. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja lokal melalui pengembangan dan pelatihan kerja yang berkesuaian dengan kebutuhan bursa tenaga kerja.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan sejumlah perusahaan di Kota Balikpapan dalam pengembangan lapangan pekerjaan sesuai dengan ketersediaan SDM pencaker.



- c. Menekan tingkat pemutusan hubungan kerja.
- d. Membuka dan mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Kota Balikpapan.
- e. Revitalisasi layanan tata kelola perijinan dalam rangka percepatan investasi di Kota Balikpapan.
- f. Mengendalikan jumlah penduduk.
- g. Memanfaatkan penduduk pada masa produktifnya untuk meningkatkan kerja dan kinerja.

5. Perbandingan capaian IKU Tingkat Partisiapasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perbandingan capaian IKU TPAK Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.58

Perbandingan Capaian Realisasi IKU TPAK Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

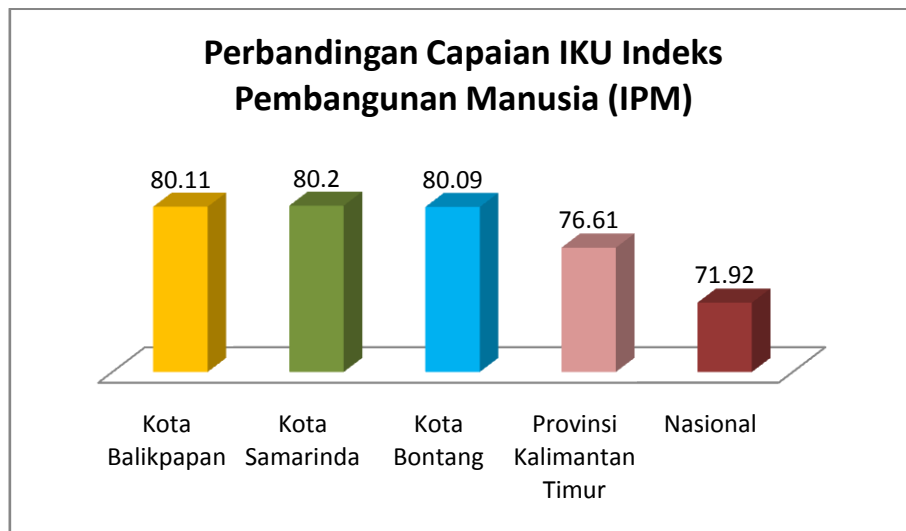
Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU TPAK Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-5 atau dibawah capaian realisasi Kota Samarinda dengan selisih capaian 0,74%, dan lebih rendah dari capaian realisaisi Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Terkait hasil perbandingan tersebut, upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah:

- Melaksanakan pemerataan pendidikan bagi masyarakat untuk wajib sekolah 9 (Sembilan) tahun.
- Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di daerah.
- Menurunkan gap gender antara laki-laki dan perempuan.

6. Perbandingan capaian IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perbandingan capaian IKU IPM Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.59

Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPM Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU IPM Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-2 atau dibawah capaian realisasi IKU IPM Kota Samarinda dengan selisih capaian 0,09, dan lebih tinggi dari capaian realisasi Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan realisasi Nasional. Terkait hasil perbandingan tersebut, upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk:

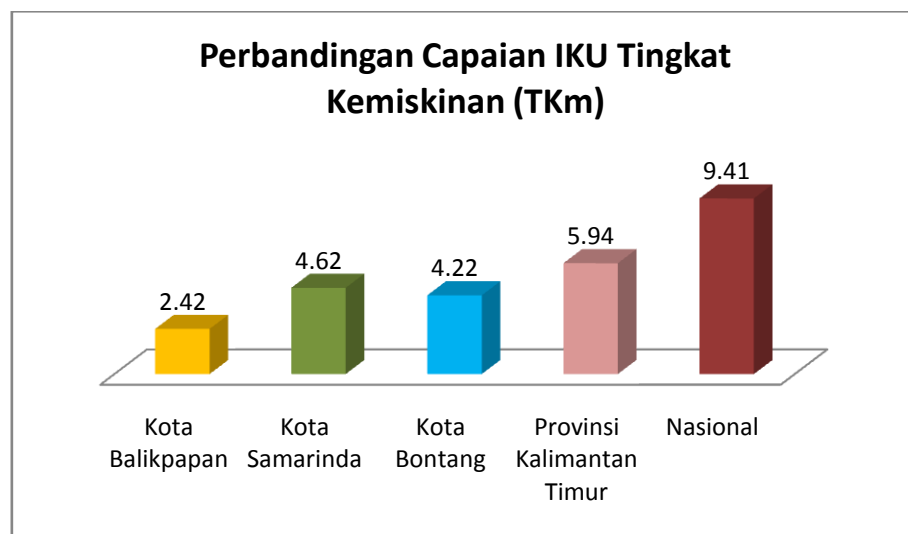
- Meningkatkan capaian indikator kinerja urusan bidang pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.



- b. Meningkatkan capaian indikator kinerja urusan bidang kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup.
- c. Meningkatkan capaian indikator kinerja urusan bidang penanaman modal, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu pengeluaran per kapita.

7. Perbandingan capaian IKU Tingkat Kemiskinan (TKm)

Perbandingan capaian IKU TKm Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.60

Perbandingan Capaian Realisasi IKU TKm Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU TKm Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-1 atau tingkat kemiskinan paling rendah dari capaian realisasi Kota Bontang dengan selisih capaian 1,8, dan lebih rendah dari capaian realisasi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan realisasi Nasional. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mempertahankan capaian IKU TKm melalui:

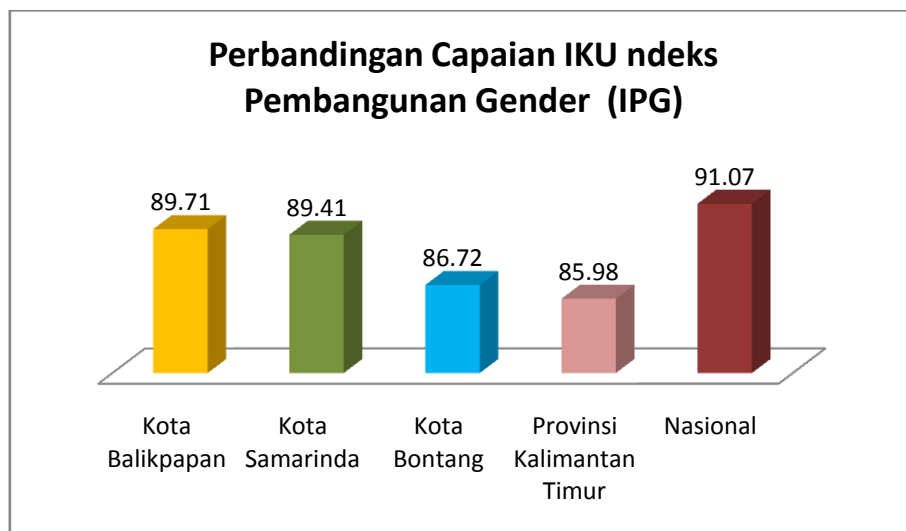
- a. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- b. Menjaga stabilitas harga produk/barang konsumsi primer masyarakat.



- c. Meminimalisasi tingkat pengangguran terbuka.
- d. Menggerakkan sendi-sendi perekonomian daerah terhadap sektor lapangan usaha.
- e. Meningkatkan promosi layanan jasa dan perdagangan serta mempercepat investasi dunia usaha di daerah.
- f. Inovasi pengembangan lapangan kerja untuk memfasilitasi partisipasi angkatan kerja.
- g. Pemerataan pembangunan sosial ekonomi di daerah.
- h. Optimalisasi pencegahan praktek KKN di daerah.

8. Perbandingan capaian IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perbandingan capaian IKU IPG Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.61

Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPG Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

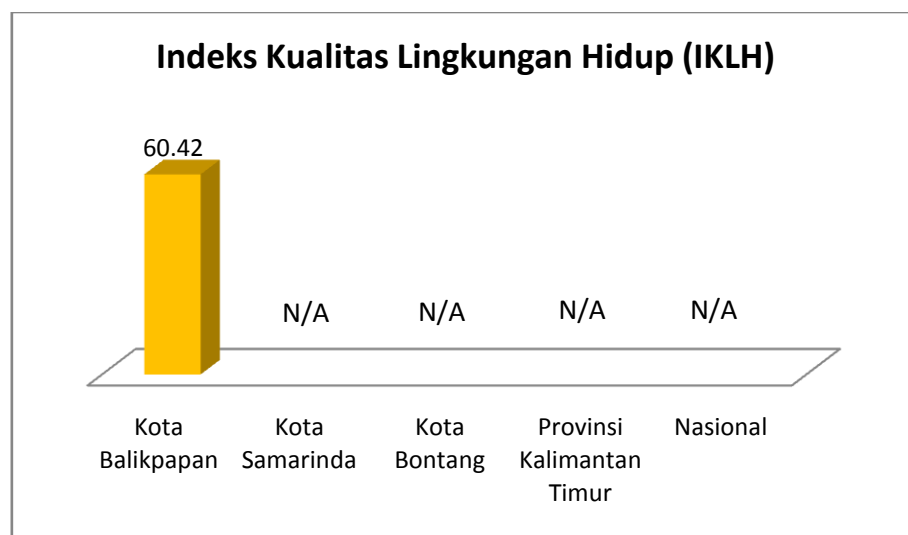
Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU IPG Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-2 atau capaian IKU IPG lebih rendah dari capaian realisasi Nasional dengan selisih capaian 1,36, dan lebih tinggi dari capaian realisaisi Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Provinsi Kalimantan Timur. Terkait hasil perbandingan tersebut, upaya yang

perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU IPG melalui:

- Menurunkan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan.
- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di daerah.
- Meningkatkan persentase jumlah perempuan dalam tata kelola pemerintahan.
- Meningkatkan persentase jumlah perempuan yang duduk pada dewan perwakilan rakyat daerah.
- Menurunkan jumlah kasus KDRT terhadap perempuan.
- Meningkatkan dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi pendapatan bagi perempuan.

9. Perbandingan capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perbandingan capaian IKU IKLH Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.62

Perbandingan Capaian Realisasi IKU IKLH Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

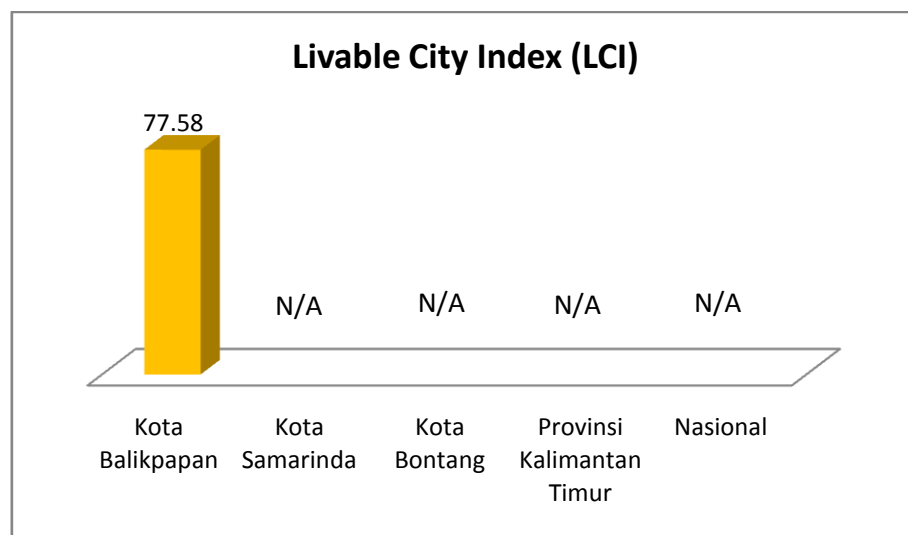
Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU IKLH Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota



Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat lakukan karena belum ada publikasi data capaian IKLH untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah meningkatkan capaian IKU IKLH melalui pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap indikator IKLH yang meliputi Pencemaran Udara, Pencemaran Air dan Tutupan Lahan.

10. Perbandingan capaian IKU Livable City Index (LCI)

Perbandingan capaian IKU LCI Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.63

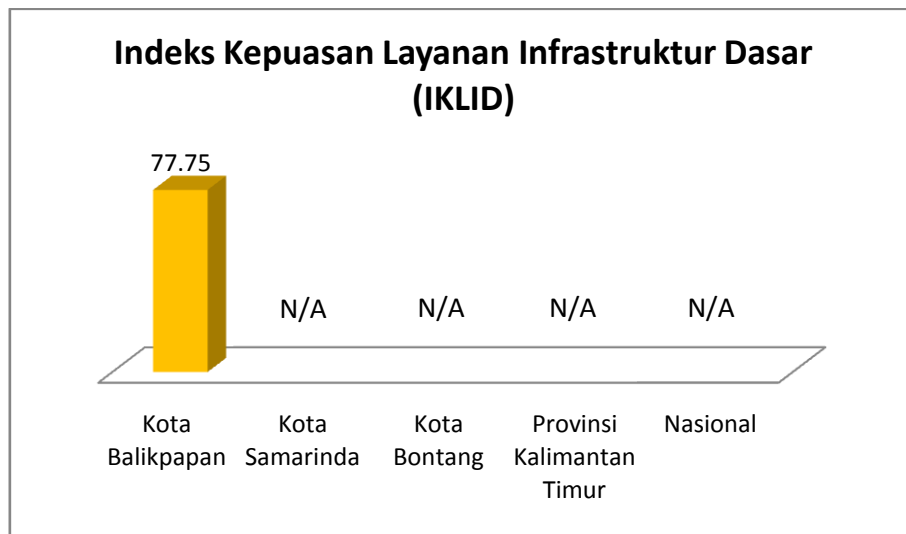
Perbandingan Capaian Realisasi IKU LCI Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU LCI Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat lakukan karena belum ada publikasi data capaian LCI untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU LCI melalui layanan ketersediaan sarana dan prasarana kota, aspek keamanan dan ketertiban serta daya dukung utilitas yang memadai.



11. Perbandingan capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID)

Perbandingan capaian IKU IKLID Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



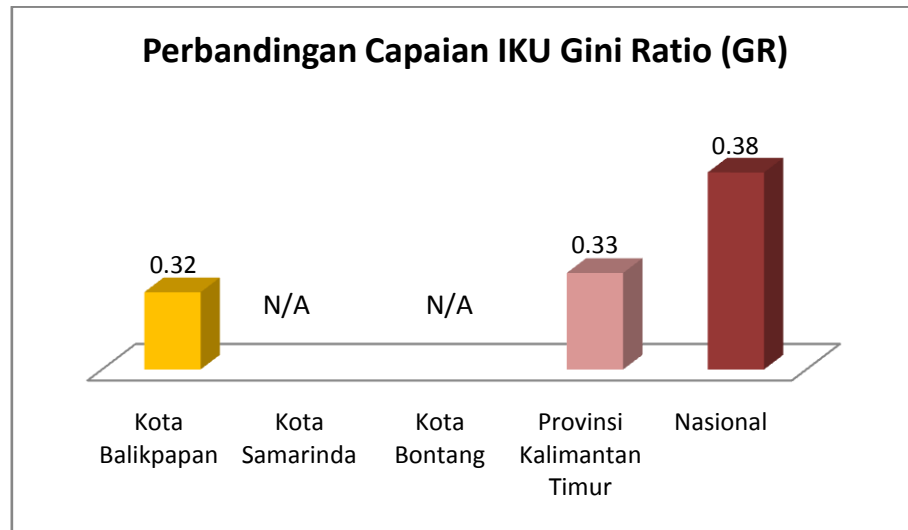
Gambar 3.64

Perbandingan Capaian Realisasi IKU IKLID Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU IKLID Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat dilakukan karena belum ada publikasi data capaian IKLID untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU IKLID melalui penyediaan dan pemeliharaan secara kontinu terhadap infrastruktur dasar bagi masyarakat yang meliputi tersedianya aksesibilitas yang lancar dan baik dikawasan perkotaan dan kawasan lingkungan masyarakat, normalisasi drainase, pengolahan air bersih dan limbah serta tersedianya fasilitas umum dan fasilitas social yang memadai.

12. Perbandingan capaian IKU Gini Ratio (GR)

Perbandingan capaian IKU GR Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.65

Perbandingan Capaian Realisasi IKU GR Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

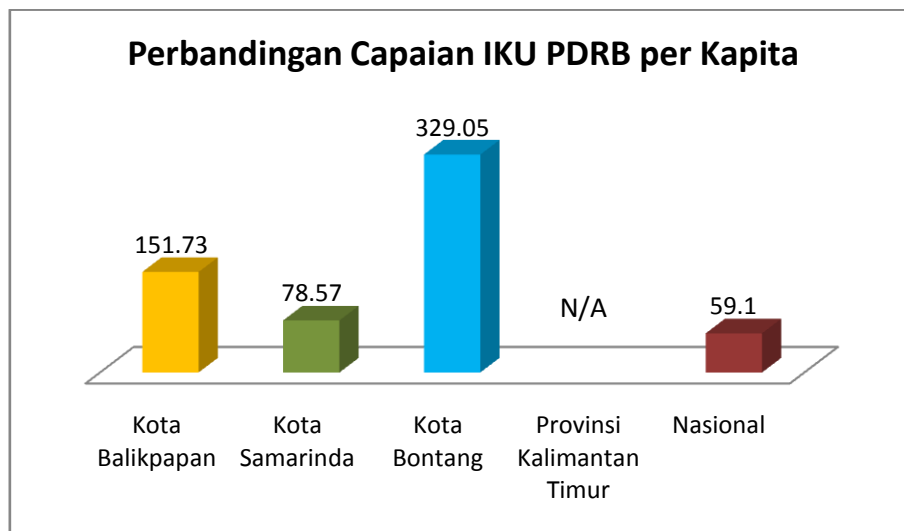
Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU GR Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-1 atau capaian IKU GR lebih rendah dari capaian realisasi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU GR melalui:

- Meminimalisasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan.
- Distribusi pelaksanaan pembangunan yang merata.
- Memperluas sebaran lapangan kerja yang tidak hanya terfokus pada kawasan perkotaan .
- Memberikan subsidi kepada keluarga miskin dan pra sejahtera.



13. Perbandingan capaian IKU PDRB Per Kapita (PDRBPK)

Perbandingan capaian IKU PDRBPK Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.66

Perbandingan Capaian Realisasi IKU PDRBPK Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa perbandingan capaian realisasi IKU PDRBPK Kota Balikpapan berada pada peringkat ke-2 atau capaian IKU PDRBPK lebih rendah dari capaian realisasi Kota Bontang dengan selisih Rp. 177,32 juta dan lebih tinggi dari capaian realisasi Kota Samarinda dan Nasional. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah meningkatkan capaian IKU PDRBPK melalui parameter:

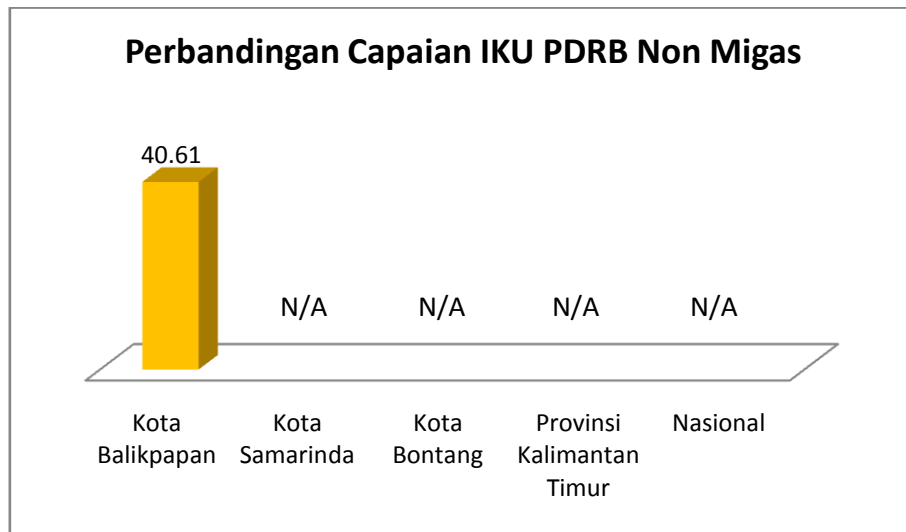
- Meningkatkan PAD dan Retribusi Daerah
- Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan.
- Pemerataan perekonomian terkait pendapatan yang diterima masyarakat.

14. Perbandingan capaian IKU PDRB Non Migas (PDRBNM)

Perbandingan capaian IKU PDRBNM Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan



Pusat Statistik Kota Balikpapan pada tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.67

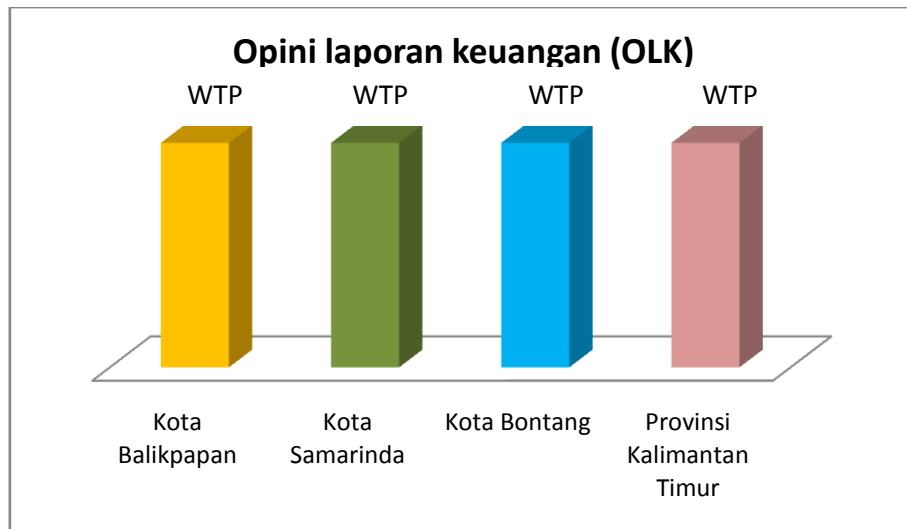
Perbandingan Capaian Realisasi IKU PDRBNM Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU PDRBNM Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat dilakukan karena belum ada publikasi data capaian PDRBNM untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah meningkatkan capaian IKU PDRBNM melalui parameter:

- a. Meningkatkan PAD dan Retribusi Daerah
- b. Meningkatkan kontribusi lapangan usaha non migas.

15. Perbandingan capaian IKU Opini Laporan Keuangan (OLK)

Perbandingan capaian IKU OLK Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Kota Balikpapan tahun 2020. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.68

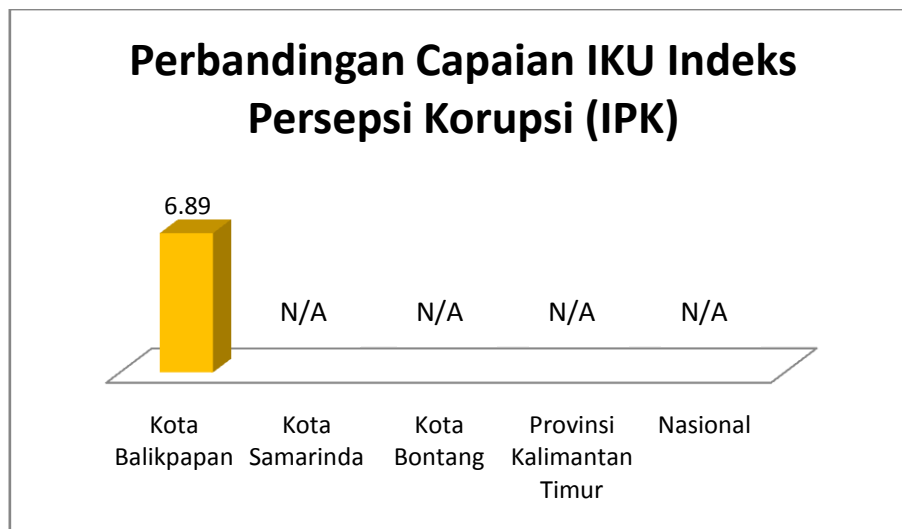
Perbandingan Capaian Realisasi IKU OLC Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU OLC Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian pada tahun 2019 yang sama yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mempertahankan capaian IKU OLC melalui parameter:

- Meningkatkan tata kelola keuangan dan asset daerah.
- Memastikan pengadaan barang/jasa pada belanja daerah tidak diintimidasi oleh kepentingan perseorangan dan kelompok.
- Pengelolaan perencanaan berbasis e-planning.
- Daya dukung pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

16. Perbandingan capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Perbandingan capaian IKU IPK Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 Kota Balikpapan. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.69

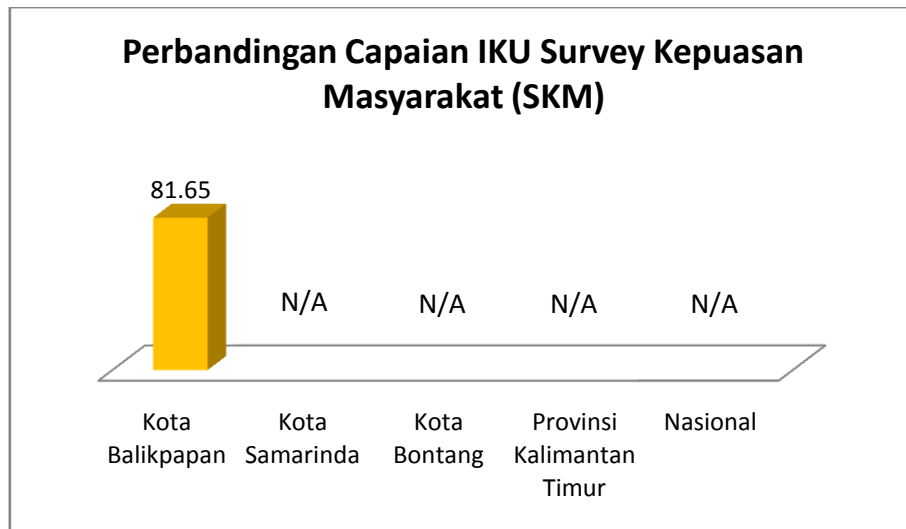
Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPK Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU IPK Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat dilakukan karena tidak diperoleh data capaian IPK untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU IPK melalui parameter:

- Menerapkan RAD pencegahan korupsi pada setiap perangkat daerah.
- Penyusunan SOP layanan khususnya perangkat daerah yang memberikan layanan kepada publik seperti Kelurahan, Kecamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
- Mencegah dan memangkas pungli dengan membentuk saber pungli.
- Komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam pencegahan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

17. Perbandingan capaian IKU Survey kepuasan Masyarakat (SKM)

Perbandingan capaian IKU SKM Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 Kota Balikpapan. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



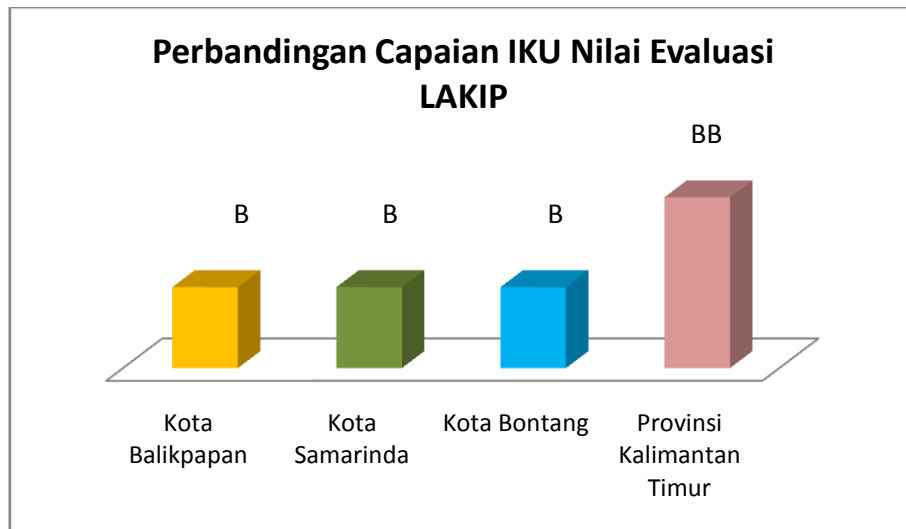
Gambar 3.70

Perbandingan Capaian Realisasi IKU SKM Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU SKM Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat dilakukan karena belum ada publikasi data capaian SKM untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU IPK melalui parameter perbaikan dan peningkatan layanan yang humanis pada setiap lapak layanan pemerintah kepada masyarakat. Selain layanan yang humanis dibutuhkan pula transparansi, kecepatan, kemudahan, dan berkesesuaian dengan SOP layanan.

18. Perbandingan capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP (LAKIP)

Perbandingan capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 Kota Balikpapan. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.71

Perbandingan Capaian Realisasi IKU Nilai Evaluasi LAKIP Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa berdasarkan perbandingan capaian realisasi IKU Nilai Evaluasi LAKIP Kota Balikpapan lebih rendah dari Nilai AKIP Provinsi Kalimantan Timur dan sama dengan capaian realisasi Kota Samarinda dan Kota Bontang. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP melalui parameter utama yaitu Komitmen Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata kelola kinerja pemerintah yang meliputi:

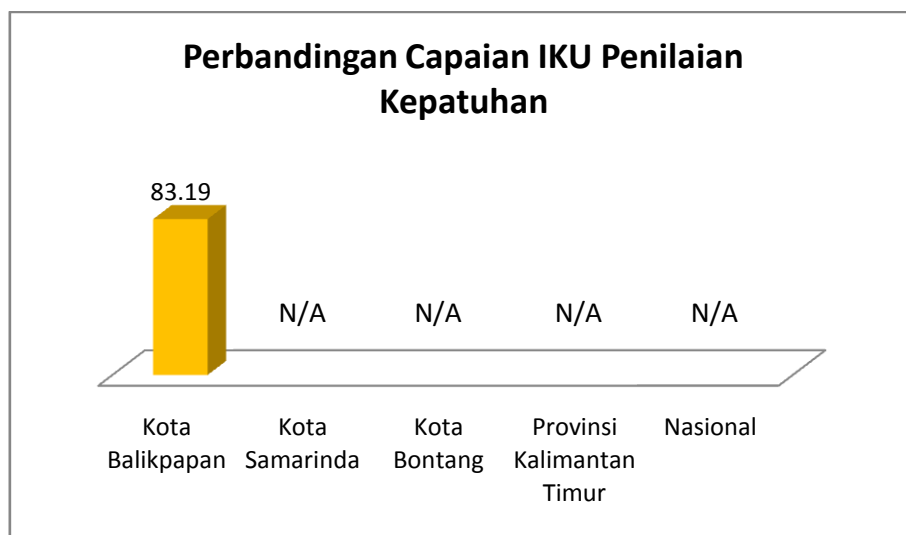
- a. Melaksanakan *Performance Based Organization*
- b. Melakukan penjabaran kinerja dari level pemerintah kota sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (*logical framework*)
- c. Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkat organisasi
- d. Menyempurnakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar reward and punishment
- e. penerapan budaya kinerja di lingkungan pemerintah kota Balikpapan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi



- f. Memperbaiki penyajian laporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis capaian kinerja dan analisis efektivitas penggunaan anggaran serta tingkat akurasi data
- g. Melakukan reviu dan *refocusing* terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU
- h. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Kota Balikpapan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

19. Perbandingan capaian IKU Penilaian Kepatuhan (PK)

Perbandingan capaian IKU PK Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 Kota Balikpapan. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.72

Perbandingan Capaian Realisasi IKU PK Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

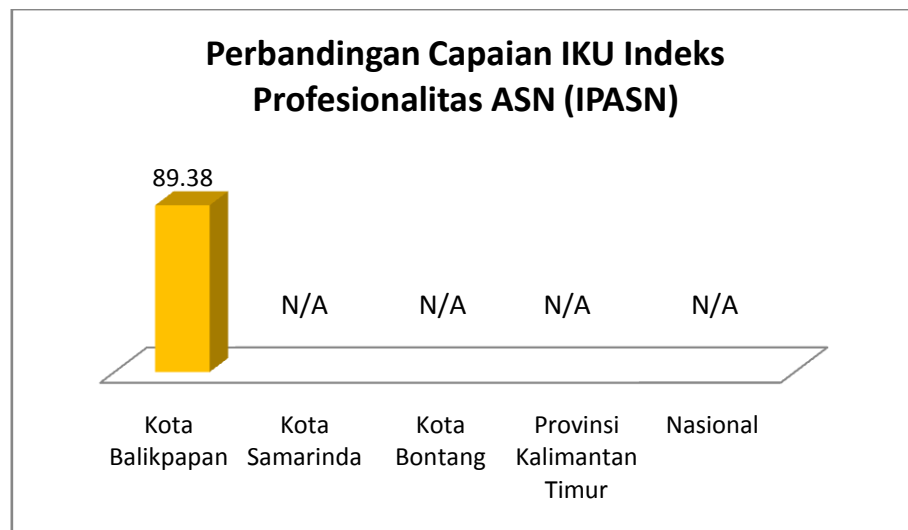
Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU PK Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat lakukan karena belum ada publikasi data capaian PK untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian IKU PK melalui parameter:



- Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam pemberian layanan pemerintah berdasarkan Undang undang dan peraturan yang berlaku.
- Mencegah praktek suap terhadap aparat pelaksana layanan bagi masyarakat.
- Menjamin prosedural layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada azas good governance.

20. Perbandingan capaian IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)

Perbandingan capaian IKU IPASN Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional didasarkan atas data realisasi tahun 2019 Kota Balikpapan. Terkait hasil publikasi tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.73

Perbandingan Capaian Realisasi IKU IPASN Tahun 2019 Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Berdasarkan gambar grafik tersebut, bahwa untuk perbandingan capaian realisasi IKU IPASN Kota Balikpapan terhadap Kota Samarinda, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tidak dapat lakukan karena belum ada publikasi data capaian IPASN untuk perbandingan. Upaya yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan capaian

IKU IPASN melalui parameter peningkatan capaian dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam APBD ditargetkan sebesar Rp. **2.527.027.291.918,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 2.469.528.438.671,23** atau mencapai sebesar 97,72%. Adapun rincian target rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komposisi Pendapatan	Pendapatan Tahun 2019 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	688.424.448.700,00	764.087.178.241,05	110,99
2	Dana Perimbangan	1.247.784.803.353,00	1.136.041.501.529,00	91,04
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	590.818.039.865,00	569.399.749.901,18	96,37
Jumlah		2.527.027.291.918,00	2.469.528.438.671,23	97.72

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.5 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Target rencana Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 688.424.448.700,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi jajaran perangkat daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 764.087.178.241,05. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 110,99% atau meningkat dari target sejumlah Rp.75.662.729.541,05 atau lebih 10,99%.
- b. Target rencana Dana Perimbangan tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 1.247.784.803.353,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.136.041.501.529,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja

sebesar 91,04% kurang dari target Dana Perimbangan sejumlah Rp.111.743.301.824 atau kurang 8,96%.

- c. Target Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 590.818.039.865,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 569.399.749.901,18. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 96,37% atau dengan kurang dari target sejumlah Rp. 21.418.289.963,82 atau kurang 3,63%.

Berdasarkan penjelasan komposisi pendapatan pada Tahun Anggaran 2019, digambarkan pula sumber pendapatan dari masing-masing komposisi pendapatan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar atau kecil dapat menjadi suatu argumentasi untuk menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama periode tahun 2012-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2012-2019

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan
2012	290.007.283.203,00	352.034.256.557,17	1.647.132.469.666,19
2013	354.840.272.692,00	470.465.949.932,97	2.214.991.437.841,00
2014	638.630.681.123,00	729.037.647.063,32	2.474.995.562.245,32
2015	539.892.356.090,00	582.744.865.141,84	2.529.001.945.784,00



Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan
2016	555.970.991.413,00	560.364.263.457,29	1.993.392.160.506,29
2017	568.575.283.786,00	612.300.113.260,09	1.808.970.163.703,09
2018	678.500.000.000,00	566.281.230.974,33	2.086.964.532.422,00
2019	688.424.448.700,00	764.087.178.241,05	2.469.528.438.671,23

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel Perkembangan Target dan Realisasi PAD, bahwa realisasi PAD Kota Balikpapan pada tahun 2019 mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2018 sejumlah Rp. 197.805.947.266,72 atau 34,93%. Laju pertumbuhan PAD pada tahun 2019 mencapai 1,71%, meningkat dari tahun 2018 dengan laju pertumbuhan 0,61%. Selanjutnya ditinjau dari Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah diperoleh nilai kontribusi sebesar 30,94% dari total pendapatan daerah sejumlah 2.469.528.438.671,23. Hal ini menunjukkan kinerja dari PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Merujuk pada sumber-sumber PAD Tahun Anggaran 2019 dapat dirincikan sebagai berikut .

Tabel 3.7
Komponen Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2019 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Tahun 2019 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1.	Hasil Pajak Daerah	501.950.000.000,00	565.236.192.479,07	112,61
2.	Hasil Retribusi Daerah	69.023.618.000,00	55.653.797.069,87	80,63
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.100.000.000,00	16.870.674.739,20	119,65
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.350.830.700,00	126.326.522.952,91	122,23
Jumlah		688.424.448.700,00	764.087.178.241,05	110,99

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.7. menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :



1. Target rencana Hasil Pajak Daerah (HPD) tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 501.950.000.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 565.236.192.479,07. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 112,61% atau dengan peningkatan pendapatan dari target sejumlah Rp. 63.286.192.479,07 atau meningkat 12,61%.
2. Target rencana Hasil Retribusi Daerah (HRD) tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 69.023.618.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 55.653.797.069,87. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 80,63% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 13.369.820.930,13 atau menurun 19,37%.
3. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 14.100.000.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 16.870.674.739,20. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 119,65% atau dengan peningkatan pendapatan dari target sejumlah Rp. 2.770.674.739,20 atau meningkat 19,65%.
4. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipisahkan tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 103.350.830.700,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 126.326.522.952,91. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 122,23% atau dengan peningkatan pendapatan dari Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 73.391.308.298,20 atau Meningkat 22,23%.

Sebagaimana penjelasan atas komponen tergambar pencapaian 4 (empat) komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019. Dari 4 (empat) Komponen tersebut, Hasil Retribusi Daerah menunjukkan kontribusi kurang



tercapai atas target yang direncanakan. Hambatan terhadap pencapaian target Retribusi Daerah tahun 2019 yaitu :

- a. Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis.
- b. Database wajib pajak retribusi daerah kurang update.
- c. Efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah masih rendah.
- d. Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap capaian retribusi daerah.

Sejalan kurang tercapainya target Retribusi Daerah tersebut Pemerintah Kota berupaya dengan tidak lanjut :

1. Memperbaiki metode dalam penentuan target retribusi daerah yang didasarkan atas data potensi retribusi daerah.
2. Melaksanakan updating terhadap data wajib retribusi daerah secara real time.
3. Meningkatkan keahlian dan profesionala SDM untuk pemungut retribusi daerah.
4. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pemungutan retribusi daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dan Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi perkembangan penerimaan Dana Perimbangan Kota Balikpapan selama periode tahun 2012-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Balikpapan
Tahun 2012-2019

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Kontribusi Dana Perimbangan
2012	1,074,521,018,050.00	1,647,132,469,666.19	65.24%
2013	1,173,881,648,321.00	2,214,991,437,841.00	53.00%



2014	2,635,068,224,864.00	2,474,995,562,245.32	106.47%
2015	1,430,910,142,069.00	2,529,001,945,784.00	56.58%
2016	1,066,561,649,134.00	1,993,392,160,506.29	53.50%
2017	922,960,601,526.00	1,808,970,163,703.09	51.02%
2018	1,096,230,492,809.00	2,086,964,532,422.00	52.53%
2019	1,136,041,501,529.00	2,469,528,438,671.23	46.00%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel Perkembangan Target dan Realisasi PAD, bahwa realisasi PAD Kota Balikpapan pada tahun 2019 mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2018 sejumlah Rp. 382.563.906.249,23 atau 18,33%. Laju pertumbuhan PAD pada tahun 2019 mencapai 0,50%, meningkat dari tahun 2018 dengan laju pertumbuhan 0,27%. Selanjutnya ditinjau dari Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah diperoleh nilai kontribusi sebesar 46% dari total pendapatan daerah sejumlah 2.469.528.438.671,23. Hal ini menunjukkan kinerja dari PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sejumlah **Rp. 1.247.784.803.353,00** dan dapat direalisasikan sejumlah **Rp.1.136.041.501.529,00** atau target tercapai sebesar **91,04%** sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Perincian Dana Perimbangan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Dana Perimbangan	Penerimaan Tahun 2019 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	611.735.992.353,00	524.878.519.044,00	85,80
2	Dana Alokasi Umum	445.818.661.000,00	439.818.664.000,00	98,65
3	Dana Alokasi Khusus	190.230.150.000,00	171.344.318.485,00	90,07
Jumlah		1.247.784.803.353,00	1.136.041.501.529,00	91,04

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020



Berdasarkan tabel 3.7 menggambarkan kondisi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 611.735.992.353,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 524.878.519.044,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 85,80% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 86.857.473.309,00 atau menurun 14,20%.
2. Target Dana Alokasi Umum tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp.445.818.661.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 439.818.664.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 98,65% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 5.999.997.000,00 atau menurun 1,35%.
3. Target Dana Alokasi Khusus tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp.190.230.150.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.171.344.318.485,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 90,07% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 18.885.831.515,00 atau menurun 9,93%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar **Rp.590.818.039.865,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.569.399.749.901,18** atau mencapai **96,37%**, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.10
Perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Penerimaan Tahun 2019 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	65.745.400.000,00	67.556.501.863,18	102,75
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	321.988.453.865,00	298.759.062.038,00	92,79
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46.534.186.000,00	46.534.186.000,00	100,00
4	Bantuan Keuangan	156.550.000.000,00	156.550.000.000,00	100,00
Jumlah		590.818.039.865,00	569.399.749.901,18	96,37%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 3.10 menggambarkan kondisi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Hibah tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp.65.745.400.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 67.556.501.863,18. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102,75% atau dengan peningkatan pendapatan dari target sejumlah Rp. 1.811.101.863,18 atau meningkat 2,75%.
2. Target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 321.988.453.865,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 298.759.062.038,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 92,79% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 23.229.391.827,00 atau penurunan 7,21%.
3. Target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp. 156.550.000.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 156.550.000.000,00. Artinya perbandingan



antara realisasi terhadap target menunjukkan capaian target kinerja tercapai sebesar 100,00%.

4. Target Bantuan Keuangan tahun 2019 setelah perubahan sejumlah Rp.50.829.412.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.50.829.412.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan capaian target kinerja tercapai sebesar 100,00%.

2. Permasalahan Dan Solusi terhadap Pendapatan Daerah

Pencapaian target pendapatan pada tahun 2019 tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan, secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat akurasi data retribusi berpengaruh terhadap data wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber retribusi.

b. Dana Perimbangan

Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.



Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) **BELANJA TIDAK LANGSUNG**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) **BELANJA LANGSUNG**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar **Rp.2.789.437.578.346,00** dan dapat direalisasikan **Rp.2.408.461.974.189,33** atau mencapai **86.34%**, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Belanja Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	957.379.584.841,00	868.514.656.220,34	90,72
2	Belanja Langsung	1.832.057.993.505,00	1.539.947.317.968,99	84,06
Total Belanja		2.789.437.578.346,00	2.408.461.974.189,33	86,34

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Jika dilihat dari komposisi Belanja Daerah pada tabel 3.11, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Besaran Belanja Tidak Langsung memberikan realisasi kontribusi pada struktur APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 868.514.656.220,34 atau 36,06% (hasil perbandingan realisasi belanja tidak langsung terhadap total realisasi belanja). Capaian kinerja realisasi terhadap target Belanja Tidak Langsung sebesar 90,72%.
2. Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD.
3. Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD dengan mengotimalkan kualitas petugas pengelola administrasi PAD.



4. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan.

Review peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Besaran Belanja langsung memberikan realisasi kontribusi pada struktur APBD Tahun 2019 sebesar Rp. atau 63,94% (hasil perbandingan realisasi belanja langsung terhadap total realisasi belanja langsung). Capaian kinerja realisasi terhadap target Belanja Langsung sebesar 84,06%.

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing Belanja untuk Tahun Anggaran 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.957.379.584.841,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.868.514.656.220,34 atau 90,72%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Perincian Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi BTL	%
1	Belanja Pegawai	800.437.989.997,00	745.557.517.225,34	93,14
2	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
3	Belanja Hibah	137.867.676.844,00	114.721.353.514,00	83,21
4	Belanja Bantuan Sosial	3.672.501.000,00	2.228.826.800,00	60,69
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kab /Kota	3.160.000.000,00	3.141.232.527,00	99,41
6	Belanja Tidak Terduga	11.241.417.000,00	1.865.726.154,00	16,60
JUMLAH		957.379.584.841,00	868.514.656.220,34	95,87

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020



1. Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.800.437.989.997,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.745.557.517.225,34 atau 93,14%, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

2. Belanja Subsidi

Belanja ini pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau 100%, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.137.867.676.844,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.114.721.353.514,00 atau 83,21%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini diberikan kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 3.672.501.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.228.826.800,00 atau 60,69%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini digunakan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada Tahun 2019 dianggarkan Rp.3.160.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.141.232.527,00 atau 99,41 % sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.11.241.417.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.1.865.726.154,00 atau 16,60% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.



b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2019 dianggarkan sebesar **Rp. 1.832.057.993.505,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.539.947.317.968,99** atau **84,06%** sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Balikpapan.

Adapun perincian Belanja Langsung pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	%
1	Belanja Pegawai	252.098.966.123,00	230.111.913.445,35	91,28
2	Belanja Barang & Jasa	748.175.381.188,00	622.064.723.166,62	83,14
3	Belanja Modal	831.783.646.194,00	687.770.681.357,02	82,69
JUMLAH		1.832.057.993.505,00	1.539.947.317.968,99	84,06

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

1. Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 252.098.966.123,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 230.111.913.445,35 atau 91,28%, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja ini pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 748.175.381.188,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 622.064.723.166,62 atau 83,14%, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI. Belanja ini digunakan untuk penyediaan barang dan jasa pada program/kegiatan aparatur pada tiap perangkat daerah.

3. Belanja Modal



Belanja Hibah pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 831.783.646.194,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 687.770.681.357,02 atau 82,69%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini digunakan untuk barang atau jasa yang menghasilkan asset Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

Pendayagunaan komponen pembiayaan pada struktur APBD tahun Anggaran 2018 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat. Penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka menyeimbangkan antara bidang Penerimaan dan bidang Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.



Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019, dianggarkan sebesar **Rp. 262.410.286.428,00** dan telah direalisasikan sebesar minus **Rp. 262.765.199.606,15** atau **100,14%** sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar **Rp. 291.635.286.428,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 291.631.786.428,00** atau **100%**, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar **Rp. 29.225.000.000,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 28.866.586.822,40** atau **98,77%**, sehingga Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah **Rp. 262.765.199.606,15** atau **100,14%**, dan Realisasi Sisa lebih pembiayaan sejumlah **Rp. 323.831.664.088,05**.

Tabel 3.14
Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	%
1	Penerimaan Pembiayaan	291.635.286.428,00	291.631.786.428,00	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.225.000.000,00	28.866.586.822,40	98,77
Total Pembiayaan		262.410.286.428,00	262.765.199.606,15	100,14

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 39 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15. Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
1	Panji Keberhasilan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Inspektorat	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
	Korupsi					
2	Panji Keberhasilan Bidang Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Kominfo	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
3	Panji Keberhasilan Bidang Industri	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
4	Panji Keberhasilan Bidang Perdagangan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas perdagangan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
5	Panji Keberhasilan Bidang Koperasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
6	Panji Keberhasilan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Panyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	BNN Kota	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
7	Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas perhubungan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
8	Panji Keberhasilan Bidang Pendidikan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pendidikan dan kebudayaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
9	Panji Keberhasilan Bidang Apresiasi Bunda PAUD	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	TP-PKK	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
10	Panji Keberhasilan Bidang Kebudayaan Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pendidikan dan kebudayaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
11	Panji Keberhasilan Bidang Kesehatan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas kesehatan kota	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
12	Panji Keberhasilan Bidang Perpustakaan dan Minat Baca	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas arisp dan perpustakaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
13	Panji Keberhasilan Bidang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
14	Panji Keberhasilan Bidang Kepemudaan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
15	Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	TP-PKK	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
16	Panji Keberhasilan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	BPBD	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
17	Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas lingkungan hidup	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
18	Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
19	Panji Keberhasilan Bidang Pariwisata	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
20	Terbaik II Bidang Keberhasilan Pengelolaan e-Government	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Diskominfo	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
21	Terbaik II Bidang Dekranasda	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
22	Terbaik II Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
23	Terbaik II Bidang Daya Saing Daerah	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
24	Terbaik II Bidang Tata Kelola Kearsipan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas arisp dan perpustakaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
25	Terbaik II Bidang Keolahragaan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
26	Terbaik II Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
27	Terbaik II Bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	DP3AKB	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
28	Terbaik II Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakn Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	DP3AKB	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
29	Terbaik II Bidang Kondusifitas Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Kesbangpol	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
30	Terbaik II Bidang Pengembangan Iptek dan Inovasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bappedalitbang	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
31	Terbaik III Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
32	Adipura (XXII)	Nasional	Kementerian LHK	DLH		WALIKOTA
33	Keterlibatan dan partisipasi aktif aparaturn damkar	Nasional	Kemendagri	BPBD	HUT Damkar ke 100	WALIKOTA
34	Indonesian creative Leader	Nasional	MNC Group		Malam Apresiasi Government award	WALIKOTA
35	Pembina UKS	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Disdikbud	Peringatan hardiknas Prov Kaltim	Sahli Ekonomi
36	Pakarti Utama III	Nasional	TP-PKK Pusat	Kelurahan Lamaru	Peringatan Harganas XXVI	Ketua TP-PKK Balikpapan
37	Juara Umum HKG-PKK	Provinsi	TP-PKK Prov Kaltim	TP-PKK	Peringatan HKG-PKK kaltim	Ketua TP-PKK Balikpapan
38	Public Service of the Year	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	RSUD Beriman		Direktur RSUD
39	Penghargaan Proper Hijau	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	RSUD Beriman		Direktur RSUD
40	Sekolah Adiwiyata	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	SDN 004, 005, 016, 017, 018, 026, 029 Balteng	Peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia	Kepala Sekolah
				SDN 008, 009, 010, 012, 014, 023, 028, 029, 032 Balut		
41	Opini WTP	Nasional	BPK Perwakilan Kaltim	BPKD, Inspektorat	Penyerahan LHP TA 2018	Walikota
42	Aditya Karya Mahatva Yodha Award	Nasional	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Anugerah Penghargaan nasional	Wawali
43	Menuju Kota Layak Anak Kategori Nindya	Nasional	Kemen PPPA	DP3AKB	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
44	Penghargaan Kelembagaan	Nasional	Kemen PPPA	DP3AKB	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
	UPTD PPA Terbaik I					
45	Puspaga mandiri terbaik II kategori Kota	Nasional	Kemen PPPA	DP3AKB	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
46	Sekolah Ramah Anak Terbaik II	Nasional	Kemen PPPA	SDN 003 Balkot	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
47	Sekolah Ramah Anak Terbaik III kategori SLB	Nasional	Kemen PPPA	SLBN Bpp	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
48	Puskesmas Ramah Anak	Nasional	Kemen PPPA	Puskesmas Baru Tengah	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
49	Pakarti Madya I Tingkat nasional Pelaksana Terbaik IVA Test Kategori Kota	Nasional	TP PKK Pusat	Kec Balikpapan Tengah	Peringatan HKG-PKK Nasional	Ketua TP-PKK Balikpapan
50	Juara I Lomba Cipta Menu	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	TP-PKK	Festival Pangan Lokal B2SA	Ka. DPPP
51	Upakarya Wanua Nugraha	Nasional	Kemendagri		Temu Karya Nasional Desa dan Kelurahan	Camat Bpp Timur
52	Juara 1 Lomba Kelurahan	Nasional	Kemendagri	Kelurahan Teritip		Lurah teritip
53	Apresiasi Kota Terpopuler di Medsos	Nasional	Ikatan Humas Indonesia	Bagian Humaspro	Anugerah Humas 2019	WALIKOTA
54	Wahana Tata nugraha	Nasional	Kemenhub	Dishub	Peringatan hari Perhubungan	WALIKOTA
55	BKN Award 2019	Nasional	BKN RI	BKPSDM	BKn Awards 2019	Sekda
56	Natamukti Award Bidang UMKM	Nasional	International Council for Small Business (ICSB) Indonesia / Kemenkop UKM	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	Galang UMKM	WALIKOTA
57	Penghargaan atas opini WTP	Nasional	Kemenkeu	BPKD, Inspektorat	Penyerahan Penghargaan dan alokasi bankeu TA 2020	Sekda
58	Anugrah Aksara Utama	Nasional	kemendikbud	Disdikbud	Peringatan Hari Aksara Internasional	WALIKOTA
59	Juara III MTQ ke-41 Kaltim	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bag. Kesra	MTQ ke-41 kaltim	As II
60	Kota Layak Pemuda kategori Utama	Nasional	Kemenpora	DPOP	Peringatan hari Sumpah Pemuda 2019	WALIKOTA
61	PR Indonesia Most Populer Leader in Social Media	Nasional	PR Indonesia	Walikota	Jambore PR Indonesia	Kabag Humaspro



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
62	Peringkat III Penilaian Fasilitas Kesehatan Tk I Berprestasi Tk. Nasional Kriteria Puskesmas Perkotaan	Nasional	Kemenkes	Dinkes / Puskesmas Karang Rejo	Hari Kesehatan Nasional	Ka. DKK
63	Dokter Teladan Nasional	Nasional	Kemenkes	Puskesmas Kr jati	Penganugerahan Nakes Teladan 2019	an dr. Niken Dayu Anggarini
64	Juara III LSS UKS/M Tingkat TK/RA	Nasional	Kemenkes	TK Kemala Bhayangkari	Lomba sekolah sehat	WALIKOTA
65	Juara III Pembina UKS	Nasional	Kemenkes	PKM Klandasan Ilir	Lomba sekolah sehat	WALIKOTA
66	Kota Sehat / Swasti Saba	Nasional	Kemendagri	Dinkes		Wawali
67	Bunda Paud Tingkat Nasional	Nasional	kemendikbud	Bunda Paud Balikpapan	apresiasi bunda PAUD nasional 2019	Bunda Paud Balikpapan
68	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori sangat Baik	Nasional	Kemenpan RB	DPMPT		Kadis DPMPT
69	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima	Nasional	Kemenpan RB	RSUD Beriman		Direktur RSUD
70	Korpri Award	Nasional	Korpri DP Nasional	Korpri Balikpapan	HUT Korpri	Sekda
71	Predikat terbaik capaian aksi kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi	Nasional	Kemendagri	Inspektorat	Peringatan hari Anti Korupsi	WALIKOTA
72	Kota Peduli HAM	Nasional	Kemenkumham	Bag Hukum	Peringatan Hari HAM sedunia	Wawali
73	Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Nasional	Kemenpan RB	RSUD Beriman	Peringatan hari Anti Korupsi	Direktur RSUD
74	Adiwiyata Mandiri	Nasional	Kemen LH	Disdikbud		Ka Sekolah
75	Adiwiyata Nasiona;	Nasional	Kemen LH	Disdikbud		Ka Sekolah
76	IRSA Kategori Manajemen Keselamatan Jalan dan Kategori jalan Yang berkeselamatan	Nasional	Bappenas	Dishub		Kadishub
77	Anugerah Sapta Pesona Kategori Destinasi Belanja	Nasional	Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DPOP	Anugerah Pesona Indonesia (API)	Kadis DPOP



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
	Terpopuler				2019	

Sumber: Sekreatariat Daerah Kota Balikpapan, data diolah tahun 2020

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Tabel 5.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Tingkat Rata-rata Capaian (%)	Capaian IKU Terhadap Sasaran Strategis	Hasil
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	95,58	Belum Tercapai	Tercapai
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	100,50	Tercapai	Tercapai
3	Menurunnya jumlah pengangguran	81,01	Belum Tercapai	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	97,76	Belum Tercapai	Tidak Tercapai



5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	99,64	Belum Tercapai	Tercapai
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	104,13	Tercapai	Tercapai
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	98,42	Belum Tercapai	Tercapai
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	106,78	Tercapai	Tercapai
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	105,15	Tercapai	Tercapai
10	Tata kelola pemerintahan yang baik	100,18	Tercapai	Tercapai

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 10 sasaran strategis beserta indikatornya, pencapaian sasaran strategis atas capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019 secara keseluruhan tercapai dengan realisasi sebesar 50% tercapai dan 50% belum tercapai dari 20 IKU yang di Perjanjikan oleh Wali Kota Balikpapan.

Sehubungan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 menunjukkan ketercapaian pada 10 indikator namun terdapat pula 10 IKU yang belum tercapai yaitu IKU HLS, TPT, TPAK, TKm, IPG, IKLH, IKLID, GR, IPK, dan Nilai Evaluasi LAKIP. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan secara langsung dengan beberapa indikator diatas. Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.

Balikpapan 27 April 2020

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 22 Januari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI

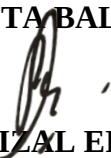


**PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,49
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,73
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	UsiaHarapanHidup (tahun)	73,99
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,05%
		2.	AngkaPartisipasi AngkatanKerja (%)	64,09
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,13
		2.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,32
		3.	Indeks Pembangunan Gender	92
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,82
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i>	73,50
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	77
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio	0,32
		2.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	151,15
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	48,65
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini Laporan Keuangan (Kategori)	WTP
		2.	Indeks Persepsi Korupsi	6,75
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	79,76
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	71,00 (BB)
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	83,19
		6.	Indeks Profesionalitas ASN	85

Balikpapan, 22 Januari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN


H. M. RIZAL EFFENDI



**PROGRAM DAN ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2019**

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
I	PROGRAM PRIORITAS			
1	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara	10,610,567,500	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	1.01.05.01.1.05.01.02.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	8,346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.01.05.01.1.05.01.04	Program Sarana dan Prasarana Logistik	1,100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	680,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9,684,886,900	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RSKB Sayang Ibu
6	3.00.02.3.00.02.01.01	Program Penelitian dan Pengembangan	1,786,626,000	Bappeda Litbang
7	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,306,171,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
9	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,864,250,000	Dinas Kesehatan
10	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	34,559,915,000	Dinas Kesehatan
11	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	45,028,273,400	Dinas Kesehatan
12	1.02.10.10.2.10.10.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	889,350,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	22,863,748,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
14	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	53,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
15	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	71,500,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
16	1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,142,567,500	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
17	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	55,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
18	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	105,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
19	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	68,683,374,500	Dinas Lingkungan Hidup
20	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,442,974,390	Dinas Lingkungan Hidup
21	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
22	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4,600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
23	2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1,523,700,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
24	2.00.03.2.00.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	200,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
25	2.00.01.2.00.03.01.20.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,348,194,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
26	2.00.03.2.00.03.01.18.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	393,500,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
27	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,519,090,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
28	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	12,821,375,500	Dinas Pekerjaan Umum
29	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan Pedestrian Kota	9,787,505,000	Dinas Pekerjaan Umum
30	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	41,188,125,000	Dinas Pekerjaan Umum



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
31	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	27,261,011,000	Dinas Pekerjaan Umum
32	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	27,422,083,250	Dinas Pekerjaan Umum
33	1.01.03.1.01.03.01.71.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	39,212,950,000	Dinas Pekerjaan Umum
34	1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	123,245,960,000	Dinas Pekerjaan Umum
35	1.02.02.01.1.2.2.1.15.	Program Keluarga Berencana	3,392,363,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
36	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3,598,686,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	1.02.02.1.02.02.01.22.	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	556,203,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	1.02.02.1.02.02.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	214,097,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	7,516,085,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
41	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,605,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,319,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
43	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	100,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
44	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,480,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
				Pariwisata
45	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2,615,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
46	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	18,252,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
47	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,752,040,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
48	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,936,124,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	194,655,494,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	17,303,102,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,326,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2,532,552,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	287,500,000	Dinas Perdagangan
54	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	4,894,925,700	Dinas Perdagangan
55	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	11,625,959,000	Dinas Perdagangan
56	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	912,500,000	Dinas Perdagangan
57	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	34,000,000,000	Dinas Perdagangan
58	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	500,000,000	Dinas Perhubungan
59	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1,400,000,000	Dinas Perhubungan
60	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	335,000,000	Dinas Perhubungan
61	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	237,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
62	1.01.01.1.02.17.01.01.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4,180,168,700	Dinas Perpustakaan dan Arsip
63	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	540,775,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kecamatan



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
64	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	1,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
65	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5,517,576,250	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
66	1.02.04.1.02.04.01.29	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	220,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
67	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	300,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	1.01.06.1.01.06.01.27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	50,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
69	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,777,961,700	Dinas Sosial
70	1.01.06.1.01.06.01.28.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	825,000,000	Dinas Sosial
71	1.01.02.1.01.02.00.35.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	9,061,724,100	Dinas Sosial
72	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	177,949,000	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan
73	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	717,712,500	Dinas Tenaga Kerja
74	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	189,933,500	Dinas Tenaga Kerja
75	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	908,736,000	Dinas Tenaga Kerja
76	5.00.01.1.01.05.02.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3,099,100,000	Inspektorat
77	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
78	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	360,999,700	Satuan Polisi Pamong Praja
79	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	146,436,500	Sekretariat Daerah
80	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	616,097,000	Sekretariat Daerah
81	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	15,780,500,000	Sekretariat Daerah
82	1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	300,000,000	Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Investasi		
83	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	9,253,001,804	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
84	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	500,000,000	Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH I			890,122,503,094	
II PROGRAM PENUNJANG				
85	6.00.01.6.00.01.01.44.	Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	506,264,400	Kecamatan Se Kota Balikpapan
86	5.00.01.1.01.05.01.27	Program Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	400,000,000	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
87	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	898,346,000	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
88	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	123,710,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
89	4.00.01.4.00.01.01.69.	Program Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	269,097,500	Badan Pengelola Keuangan Daerah
90	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	3,378,125,000	Bappeda Litbang
91	2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	387,300,000	Bappeda Litbang
92	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55,100,000	Bappeda Litbang
93	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	220,000,000	Dinas Kesehatan
94	6.00.01.6.00.01.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	887,805,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
95	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,646,665,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
96	4.00.01.4.00.01.01.02.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3,778,885,900	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
97	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	125,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
98	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	19,854,600,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
99	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	980,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
100	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	500,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
101	4.00.01.4.00.01.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	199,650,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
102	1.02.04.1.02.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	520,473,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
103	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,082,049,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
104	2.00.03.2.00.03.01.21.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	847,600,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
105	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	1,367,281,000	Dinas Pekerjaan Umum
106	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
107	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	27,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
108	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	22,920,800,000	Dinas Pekerjaan Umum
109	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	574,600,000	Dinas Pekerjaan Umum
110	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
111	1.02.12.1.02.12.02.20	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
112	1.02.10.1.02.10.10.10.	Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	81,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
113	1.01.04.1.01.04.01.04.	Program pengelolaan areal pemakaman	4,387,180,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,750,049,200	Dinas Perdagangan



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
115	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6,940,756,500	Dinas Perdagangan
116	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	660,000,000	Dinas Perhubungan
117	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
118	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	95,000,000	Dinas Perhubungan
119	1.02.05.1.01.04.01.05.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17,685,015,000	Dinas Perhubungan
120	1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Pengelolaan Rumah Susun	4,500,000,000	Dinas Perhubungan
121	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	200,000,000	Dinas Perhubungan
122	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	866,486,000	Dinas Perhubungan
123	1.02.01.1.02.01.01.19	Program Pengembangan Data dan Informasi	100,340,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
124	1.02.09.1.02.09.01.26.	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	700,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
125	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	618,760,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
126	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	123,900,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
127	4.00.01.4.00.01.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	479,682,715	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
128	2.00.01.2.00.03.01.24.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	64,218,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
129	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,007,339,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
130	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	385,796,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
131	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	547,300,000	Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah
132	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	653,500,000	Dinas Sosial
133	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	596,007,500	Dinas Sosial dan Dina Tenaga Kerja
134	5.00.01.5.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,136,290,000	Inspektorat



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
135	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,583,824,000	Kantor Kesbangpol
136	4.00.01.4.00.01.01.22.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	1,131,601,000	Kantor Kesbangpol
137	2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	645,935,000	Kantor Kesbangpol
138	1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	18,124,046,300	Kantor Kesbangpol
139	1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	112,875,953,700	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
140	4.00.01.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	265,000,000	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
141	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21,179,494,000	Kecamatan Se Kota Balikpapan
142	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,450,973,000	Kecamatan Se Kota Balikpapan
143	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	986,640,000	Kecamatan, Sekretariat Daerah
144	3.00.04.3.00.04.01.20.	Program Peningkatan Kinerja ASN	72,871,450	Kecamatan, Sekretariat Daerah
145	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	204,095,400	RSKB Sayang Ibu
146	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	84,789,825,000	Sekretariat Daerah
147	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,028,050,000	Sekretariat Daerah
148	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,951,993,300	Sekretariat Daerah
149	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	16,000,000,000	Sekretariat Daerah
150	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,187,301,500	Sekretariat Daerah
151	5.00.01.5.00.01.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	50,000,000	Sekretariat Daerah
152	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5,792,146,700	Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
153	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,153,000,000	Sekretariat Daerah
154	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	19,834,209,650	Sekretariat Daerah
155	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	377,840,000	Sekretariat Daerah
156	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,086,997,200	Sekretariat Daerah
157	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	330,000,000	Sekretariat Daerah
158	1.02.10.1.02.10.10.19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	2,608,500,000	Sekretariat Daerah
159	1.02.10.1.02.10.10.01.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50,000,000	Sekretariat Daerah
160	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	150,000,000	Sekretariat Daerah
161	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	400,000,000	Sekretariat Daerah
162	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,209,888,300	Sekretariat Daerah
163	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	607,000,000	Sekretariat Daerah
164	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,250,000,000	Sekretariat Daerah
165	1.01.03.1.01.03.01.22.	Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum	68,320,000	Sekretariat Daerah
166	1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	338,500,000	Sekretariat Daerah
167	5.00.01.1.01.05.01.17.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	230,000,000	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah
168	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133,679,572,750	Sekretariat DPRD
169	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	495,000,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
170	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	200,000,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
171	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	489,836,500	Seluruh OPD Kota Balikpapan



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
JUMLAH II			658,180,387,165	
JUMLAH I + JUMLAH II			1,548,302,890,259	

Balikpapan, 22 Januari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M. RIZAL EFFENDI

Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 28 Februari 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI

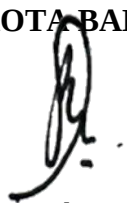


**PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,67
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,93
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,41
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,85
		2.	AngkaPartisipasi AngkatanKerja (%)	64,66
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,11
		2.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,31
		3.	Indeks Pembangunan Gender	92
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,42
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i>	80,15
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	78,00
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio	0,31
		2.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	157,39
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	43,20
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini Laporan Keuangan (Kategori)	WTP
		2.	Indeks Persepsi Korupsi	7,00
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	82.25
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	70,15 (BB)
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	83,19
		6.	Indeks Profesionalitas ASN	89,50

Balikpapan, 28 Februari 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN


H. M. RIZAL EFFENDI



**PROGRAM DAN ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
I	PROGRAM PRIORITAS			
1	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara	19,935,718,250	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	1.01.05.01.1.05.01.02.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	7,300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.01.05.01.1.05.01.04	Program Sarana dan Prasarana Logistik	1,375,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	79,860,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RSKB Sayang Ibu
6	3.00.02.3.00.02.01.01	Program Penelitian dan Pengembangan	1,812,643,000	Bappeda Litbang
7	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,695,013,500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5,940,969,000	Dinas Kesehatan
9	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,510,287,000	Dinas Kesehatan
10	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	17,270,629,450	Dinas Kesehatan
11	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	49,442,183,550	Dinas Kesehatan
12	1.02.10.10.2.10.10.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
13	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	10,233,500,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
14	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	169,448,350	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
15	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	70,165,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
16	1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,142,110,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
17	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	519,193,750	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
18	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	717,358,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
19	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70,673,093,300	Dinas Lingkungan Hidup
20	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,480,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
21	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	825,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
22	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	6,855,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
23	2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1,149,730,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
24	2.00.03.2.00.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	180,450,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
25	2.00.01.2.00.03.01.20.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	950,200,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
26	2.00.03.2.00.03.01.18.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	380,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
27	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,217,855,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
28	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	56,571,393,800	Dinas Pekerjaan Umum
29	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan	14,660,830,000	Dinas Pekerjaan Umum



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Pedestrian Kota		
30	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	65,164,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
31	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	15,728,400,000	Dinas Pekerjaan Umum
32	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	36,217,727,500	Dinas Pekerjaan Umum
33	1.01.03.1.01.03.01.71.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	28,875,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
34	1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	94,352,403,000	Dinas Pekerjaan Umum
35	1.02.02.01.1.2.2.1.15.	Program Keluarga Berencana	3,963,803,620	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
36	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3,495,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	1.02.02.1.02.02.01.22.	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,820,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	1.02.02.1.02.02.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	18,150,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
41	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,770,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,400,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
43	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	631,025,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
44	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3,055,779,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
45	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2,795,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
46	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	20,663,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
47	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,925,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
48	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7,430,943,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	214,120,035,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	17,702,791,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,801,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2,907,241,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	600,000,000	Dinas Perdagangan
54	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	5,285,960,600	Dinas Perdagangan
55	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	3,347,866,700	Dinas Perdagangan
56	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1,407,100,000	Dinas Perdagangan
57	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	Dinas Perdagangan
58	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2,600,000,000	Dinas Perhubungan
59	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3,882,500,000	Dinas Perhubungan
60	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	370,000,000	Dinas Perhubungan
61	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
62	1.01.01.1.02.17.01.01.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4,597,097,530	Dinas Perpustakaan dan Arsip
63	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kecamatan
64	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	1,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
65	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9,753,332,600	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
66	1.02.04.1.02.04.01.29	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	2,180,625,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
67	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	250,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	1.01.06.1.01.06.01.27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	73,440,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
69	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,378,873,600	Dinas Sosial
70	1.01.06.1.01.06.01.28.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,135,410,000	Dinas Sosial
71	1.01.02.1.01.02.00.35.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	150,000,000	Dinas Sosial
72	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	190,838,000	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan
73	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,024,374,300	Dinas Tenaga Kerja
74	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	358,476,000	Dinas Tenaga Kerja
75	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,192,472,000	Dinas Tenaga Kerja
76	5.00.01.1.01.05.02.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2,200,000,000	Inspektorat
77	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	182,540,000	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
78	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	360,999,700	Satuan Polisi Pamong Praja
79	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	140,188,000	Sekretariat Daerah
80	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200,000,000	Sekretariat Daerah
81	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	15,026,837,787	Sekretariat Daerah
82	1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	300,000,000	Sekretariat Daerah
83	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	4,450,000,000	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
84	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	686,000,000	Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH I			882,093,861,587	
II	PROGRAM PENUNJANG			
85	6.00.01.6.00.01.01.44.	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	661,529,750	Kecamatan Se Kota Balikpapan
86	5.00.01.1.01.05.01.27	Program Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	-	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
87	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	898,346,000	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
88	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	159,122,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
89	4.00.01.4.00.01.01.69.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	250,981,300	Badan Pengelola Keuangan Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
90	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	4,500,000,000	Bappeda Litbang
91	2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	381,750,000	Bappeda Litbang
92	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55,100,000	Bappeda Litbang
93	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	500,000,000	Dinas Kesehatan
94	6.00.01.6.00.01.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
95	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,960,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
96	4.00.01.4.00.01.01.02.	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,874,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
97	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	271,875,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
98	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	20,994,497,500	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
99	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	1,800,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
100	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	800,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
101	4.00.01.4.00.01.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	199,650,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
102	1.02.04.1.02.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	689,999,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
103	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	1,082,049,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
104	2.00.03.2.00.03.01.21.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	853,800,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
105	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	2,645,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
106	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Jembatan		
107	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	27,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
108	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	18,042,500,000	Dinas Pekerjaan Umum
109	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	759,990,000	Dinas Pekerjaan Umum
110	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	958,300,000	Dinas Pekerjaan Umum
111	1.02.12.1.02.12.02.20	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
112	1.02.10.1.02.10.10.10.	Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	169,895,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
113	1.01.04.1.01.04.01.04.	Program pengelolaan areal pemakaman	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,705,049,200	Dinas Perdagangan
115	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3,256,250,000	Dinas Perdagangan
116	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	1,455,000,000	Dinas Perhubungan
117	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	5,150,000,000	Dinas Perhubungan
118	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	125,000,000	Dinas Perhubungan
119	1.02.05.1.01.04.01.05.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18,530,648,450	Dinas Perhubungan
120	1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Pengelolaan Rumah Susun	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
121	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	-	Dinas Perhubungan
122	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
123	1.02.01.1.02.01.01.19	Program Pengembangan Data dan Informasi	64,225,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
124	1.02.09.1.02.09.01.26.	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi	2,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.		
125	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	805,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
126	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	297,825,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
127	4.00.01.4.00.01.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	479,682,700	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
128	2.00.01.2.00.03.01.24.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	75,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
129	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	350,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
130	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
131	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	655,538,000	Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah
132	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	1,153,500,000	Dinas Sosial
133	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	189,058,000	Dinas Sosial dan Dina Tenaga Kerja
134	5.00.01.5.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,950,000,000	Inspektorat
135	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	102,400,000	Kantor Kesbangpol
136	4.00.01.4.00.01.01.22.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	1,211,659,700	Kantor Kesbangpol
137	2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	Kantor Kesbangpol
138	1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	12,417,542,800	Kantor Kesbangpol
139	1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	66,322,457,200	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
140	4.00.01.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	250,000,000	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
141	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	28,993,234,870	Kecamatan Se Kota Balikpapan
142	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	151,642,500	Kecamatan Se Kota Balikpapan
143	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1,488,240,000	Kecamatan, Sekretariat Daerah
144	3.00.04.3.00.04.01.20.	Program Peningkatan Kinerja ASN	75,292,500	Kecamatan, Sekretariat Daerah
145	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	335,347,750	RSKB Sayang Ibu
146	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	27,713,908,300	Sekretariat Daerah
147	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,002,950,000	Sekretariat Daerah
148	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	1,356,473,800	Sekretariat Daerah
149	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	17,000,000,000	Sekretariat Daerah
150	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,235,570,000	Sekretariat Daerah
151	5.00.01.5.00.01.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	65,000,000	Sekretariat Daerah
152	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	6,216,769,000	Sekretariat Daerah
153	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	Sekretariat Daerah
154	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3,447,835,250	Sekretariat Daerah
155	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1,037,840,000	Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
156	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,094,178,000	Sekretariat Daerah
157	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	-	Sekretariat Daerah
158	1.02.10.1.02.10.10.19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	19,107,300	Sekretariat Daerah
159	1.02.10.1.02.10.10.01.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	Sekretariat Daerah
160	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	-	Sekretariat Daerah
161	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	206,750,000	Sekretariat Daerah
162	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	Sekretariat Daerah
163	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	663,927,000	Sekretariat Daerah
164	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
165	1.01.03.1.01.03.01.22.	Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum	-	Sekretariat Daerah
166	1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	Sekretariat Daerah
167	5.00.01.1.01.05.01.17.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	455,000,000	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah
168	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,732,200,640	Sekretariat DPRD
169	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	706,000,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
170	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	727,500,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
171	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	489,836,500	Seluruh OPD Kota Balikpapan
JUMLAH II			321,894,074,010	



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
JUMLAH I + JUMLAH II			1,203,987,935,597	

Balikpapan, 28 Februari 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-14/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator Kinerja Utama 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 33);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berisi sasaran strategis dan indikator utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya mengacu pada indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk:
- a. Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Indikator Kinerja Utama 5 (lima) tahun dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Penetapan Kinerja setiap tahun dituangkan dalam dokumen yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan diketahui Wali Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Januari 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kcpada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Kota Balikpapan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
NOMOR 188.45-14/2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Asumsi bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan tidak mengalami penurunan	5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.	6 $RLS = \frac{1}{P_{25+}} \sum_{i=1}^{P_{25+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-}i)$ Keterangan : RLS = Rata-rata Lama Sekolah P_{25+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun keatas Lama Sekolah Penduduk ke- i = terdiri atas : • Jumlah penduduk tidak pernah sekolah = 0 • Masih sekolah di SD s.d. S1 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 • Masih sekolah di S2/S3 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir	7 BPS, Disdikbud	8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan bentuk pendidikan (dalam tahun) diharapkan dicapai oleh anak di Kota Balikpapan	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$HLS_g = FK \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ Keterangan : HLS_g = Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t FK = Faktor koreksi pesantren E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah	BPS, Disdikbud, Disdukcapil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	Mengetahui derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.	AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010	BPS, Dinkes, Disdukcapil	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
3.	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan di Kota Balikpapan	Nilai Persentase (%) jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS, Disdikbud, Disdukcapil	Dinas Ketenagakerjaan
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Mengetahui potensi angkatan kerja yang tersedia di Kota Balikpapan	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun +}} \times 100\%$	BPS, Disdikbud, Disdukcapil	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1		3	4	5	6	7	8
4.	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	- mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). - Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sebagaimana.	$IPM = \sqrt[3]{I_{pendidikan} \times I_{kesehatan} \times I_{pendapatan}}$ Dimensi pembentuk IPM : $I_{pendidikan} = \frac{RLS+HLE}{2}$ = Nilai Rata-rata atas = $I_{kesehatan} = \text{Angka Harapan Hidup (AHH)}$ $I_{pendapatan} = \text{PDRB Perkapita}$	BPS, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, DPPAKB
		2. Tingkat Kemiskinan (TKm)	Mengetahui proporsi penduduk miskin di Kota Balikpapan	Tingkat kemiskinan adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	$TKm = \frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Disdukcapil	Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Mengetahui tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.	$IPG = \frac{1}{3} [(X_{ese(1)} + X_{ese(2)} + inc.dsi)]$ Keterangan : $X_{ese(1)} = \text{Xede untuk harapan hidup}$ $X_{ese(2)} = \text{Xede untuk harapan pendidikan}$ $Inc-dsi = \text{indeks distribusi pendapatan}$	BPS, DPPAKB Disdukcapil	DPPAKB

No.	Sasaran Strategis	Indikator/Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Mengetahui Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	IKLH merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu daerah, dimana Tujuan disusunnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	IKLH= (IPA $\times$ 30%) + (IPU $\times$ 30%) + (ITH $\times$ 40%) Keterangan : IPA = Indeks Pencemaran Air Sungai IPU = Indeks Pencemaran Udara	DLH, Bappeda Litbang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
6.	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Livable City Index (LCI)	Mengetahui tingkat kenyamanan suatu kota berdasarkan persepsi warganya.	Kota layak huni atau <i>Livable City</i> adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahweg (1997), kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Menurut Evan (2002), konsep <i>livable city</i> digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya.	Metode pengukuran kualitas atas penilaian <i>Livable City Index</i> (LCI) oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), yang menilai tingkat kenyamanan hidup kota-kota di Indonesia.	Bappeda Litbang	DPP, DPU, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang



No.	Sasaran Strategis	Indikator-Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Mengetahui tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan infrastruktur dasar di Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah	Hasil pengukuran diasumsikan bahwa tingginya indeks kepuasan layanan infrastruktur mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (skala 1-10)	Bappeda Litbang	DPU, Dishub Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
8.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Gini Ratio (GR)	Mengetahui pemerataan pendapatan berdasarkan kelas pendapatan Kota Balikpapan	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ketidakteraturan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.	$GR = 1 - \frac{\sum f_i [Y_i + Y_{i+1}]}{\sum f_i Y_i}$ Keterangan : $\sum f_i$ = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas Ke - i Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. - Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. - Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. - Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.	BPS, Bappeda Litbang	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Bag. Perekonomian



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Mengetahui nilai tambah produksi per kapita penduduk Kota Balikpapan	Merupakan alat (<i>tool</i>) ukur kinerja pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (<i>quantitative change</i>) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita	$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Bappeda Litbang	Bappeda Litbang
9.	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas	Mengetahui nilai tambah produksi kota Balikpapan tanpa memperhitungkan sektor migas	Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah tanpa sektor migas	$\text{PDRB Non Migas} = \frac{\text{PDRB} - \text{Migas}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Bappeda Litbang	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, DPMPT, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini laporan keuangan	Mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Keuangan merupakan pernyataan pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Indikator terukur kualitatif atas opini BPK atas pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Tidak Wajar dan Tidak menyatakan pendapat	BPKD, Bappeda Litbang, Inspektorat, BPKD, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD, Bappeda Litbang, Inspektorat, BPKD, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Mengetahui persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis	<i>Corruption Perception Index (CPI)</i> atau Indeks Persepsi Korupsi merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi.	Indikator Indeks Persepsi Korupsi menggunakan Skala numerik untuk mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di sejumlah kota di Indonesia. Disusun berdasarkan jawaban dari pelaku bisnis. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10, 0 berarti sangat korup, 10 sangat bersih	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Survei Kepuasan Masyarakat at (SKM)	Mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan	Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.	Survei Kepuasan Masyarakat terukur atas Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan oleh Tim penyusunan indeks kepuasan masyarakat atau unit independen yang sudah berpengalaman, perlu dilakukan melalui "Perjanjian kerja sama" dengan unit independen seperti BPS, Perguruan Tinggi, LSM. Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk).	Perangkat Daerah se Kota Balikpapan	Bappeda Litbang
		4. Nilai Evaluasi AKIP	Mengetahui penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Balikpapan	Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik	Penilaian hasil evaluasi AKIP berdasarkan predikat dengan Skala Skoring: AA = 90 - 100 A = 80 - 90 BB = 70 - 80 B = 60 - 70 CC = 50 - 60 C = 30 - 50 D = 0 - 30	BPS, Bappeda Litbang, Bagian Organisasi	Bappeda Litbang



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Penilaian Kepatuhan	Mengetahui hasil evaluasi kinerja unit pelayanan publik pemerintah Kota Balikpapan	Penilaian Kepatuhan adalah nilai hasil pengukuran kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan terhadap standar pelayanan publik.	Nilai Kepatuhan berdasarkan hasil evaluasi persepsi Pelayanan Publik. Kriteria Nilai Kepatuhan didasarkan atas 3 (tiga) Zonasi Pewarnaan yaitu - Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi), - Zona Kuning (Kepatuhan Sedang), dan	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	Bappeda Litbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah
		6. Indeks Profesionalitas ASN	Mengetahui tingkat profesionalitas ASN yang dihitung dengan mengkomposisikan : 1. kesesuaian antara PNS kompetensi dengan syarat jabatan (kompetensi gab) 2. Kinerja yang diukur dengan pengukuran SKP Kompensasi Gab yang diukur dengan selisih tunjangan yang diterima PNS secara	Sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi	$IdxPro = koef(1-gaps) + koef(Kj) + koef(1-5Si_{max})$ $\pm koef(1-InDiscpl)$ Keterangan : gaps = Persentase ASN yang tidak kompeten Kj = Angka SKP Si = Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama (%) Discpl = Jumlah pelanggaran disiplin	BKPSDM, Perangkat Daerah se Kota Balikpapan	BKPSDM, Perangkat Daerah se Kota Balikpapan





**MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN**

